



RENCANA STRATEGIS

Balai Bahasa
Provinsi Jawa Timur
Tahun 2025—2029

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



RENCANA STRATEGIS

Balai Bahasa
Provinsi Jawa Timur
Tahun 2025—2029

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Gebang Putih Nomor 10, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya 60117
Telepon (031) 5925972; Pos-el: balaibahasa.jawatimur@dikdasmen.go.id
Laman: balaibahasajatim.kemendikdasmen.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH NOMOR: 2733/I5.8/PR.00.02/2025 TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025—2029

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025—2029;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tentang Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025—2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 283);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025—2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 764).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR, BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025—2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025—2029, yang selanjutnya disebut Renstra Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025—2029, yang merupakan dokumen perencanaan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur ini.

KEDUA : Renstra Balai Bahasa Jawa Timur 2025—2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi setiap tim kerja di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan program, kegiatan, dan anggaran 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

KETIGA : Renstra Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur 2025—2029 termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang merupakan dokumen Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur untuk periode 1 (satu) tahun.

KEEMPAT: Renstra Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur 2025—2029 dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap tim kerja di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur untuk penetapan Rencana Kerja Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025—2029.

KELIMA : Seluruh tim kerja di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Renstra Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur 2025—2029 yang telah dituangkan dalam Renja Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur.

KEENAM : Renstra Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur 2025—2029 dapat diubah dan disesuaikan sepanjang:

- a. terdapat peraturan dan/atau kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengamanatkan perubahan Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; atau
- b. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

KETUJUH : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 27 Oktober 2025
Kepala,



Puji Retno Hadiningtyas
NIP 198103092006042002

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029. Dokumen ini merupakan pedoman arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025, serta selaras dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, sasaran, serta indikator kinerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Provinsi Jawa Timur.

Rencana strategis ini juga menjadi penjabaran dari komitmen Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur untuk turut mewujudkan visi nasional “Terwujudnya Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan Dukungan Partisipasi Semesta dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 melalui Bahasa dan Sastra”. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung peningkatan kecakapan literasi, pemertabatan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa dan sastra daerah, serta penginternasionalan bahasa Indonesia.

Renstra ini terdiri atas lima bab. *Bab pertama* merupakan pendahuluan yang berisikan (1) kondisi umum dan (2) permasalahan dan potensi. *Bab kedua* memaparkan (1) visi, (2) misi, (3) tujuan dan indikator kinerja tujuan, dan (4) sasaran dan indikator kinerja sasaran. *Bab ketiga* mengulas (1) arah kebijakan dan strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (2) arah kebijakan dan strategi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, (3) kerangka regulasi, (4) kerangka kelembagaan, dan (5) Enam Area Perubahan Reformasi Birokrasi dalam Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi. *Bab keempat* menyajikan (1) target kinerja dan (2) kerangka pendanaan. *Bab kelima* merupakan bab penutup.

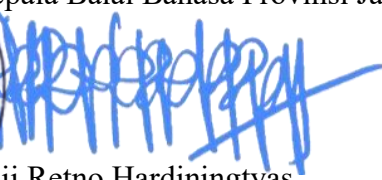
Selain itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik instansi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas literasi, maupun masyarakat luas, dalam mengembangkan kolaborasi dan sinergi program kebahasaan dan kesastraan. Partisipasi aktif dari berbagai pihak menjadi kunci dalam upaya mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang literat, berkarakter, serta bangga terhadap bahasa dan sastra daerah dan nasional.

Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penyusun, para pemangku kepentingan, serta pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, dan dukungan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025—2029 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul melalui bahasa dan sastra.



Surabaya, November 2025

Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur


Puji Retno Hardiningtyas
NIP 198103092006042002

DAFTAR ISI

SK KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	3
1.1.1 Capaian Kinerja 2020—2024	3
a. Capaian Kinerja Tahun 2020—2021	4
b. Capaian Kinerja Tahun 2022—2024	6
1.2 Permasalahan dan Potensi	16
1.2.1 Permasalahan dan Analisis	16
1.2.2 Potensi di Jawa Timur	18
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	21
2.1 Visi	22
2.2 Misi	22
2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	23
2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan	24
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	26
3.1 3.1Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	27
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	28
3.3 Kerangka Regulasi	30
3.4 Kerangka Kelembagaan	31
3.4.1 Struktur Organisasi	31
3.4.2 Reformasi Birokrasi (Pencanangan WBBM)	32
3.4.3 Proyeksi Pengelolaan SDM.....	34
3.4.4 Proyeksi Peningkatan Tata Kelola Lembaga.....	36
3.4.5 Proyeksi Pengembangan Inovasi Layanan Publik.....	38
3.4.6 Proyeksi Pemenuhan Sarana Prasarana	40
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	42
4.1 Target Kinerja	43
4.2. Kerangka Pendanaan	44
BAB V PENUTUP	45
LAMPIRAN	47



BAB I

PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia merupakan salah satu bentuk jati diri keindonesiaan bangsa. Melalui bahasa Indonesia, ribuan suku yang tersebar di seluruh Indonesia dengan bahasa daerah masing-masing dipersatukan. Posisi bahasa Indonesia juga diperkukuh dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni bahasa diposisikan sejajar dengan simbol kenegaraan yang lain, seperti bendera, lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Bangsa Indonesia yang multikultural membuat warganya memiliki kemampuan berbahasa yang bilingual bahkan multilingual. Warga negara Indonesia minimal menguasai dua bahasa sekaligus sepanjang hidupnya, yaitu bahasa daerah sebagai bahasa ibunya dan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan dalam situasi formal. Selain itu, warga negara Indonesia yang mengenyam pendidikan menengah hingga tinggi juga menguasai bahasa asing.

Kemampuan berbahasa Indonesia, berbahasa daerah, dan berbahasa asing merupakan kemampuan ideal manusia Indonesia untuk dapat berkompetisi secara global dengan mengikuti perkembangan kemutakhiran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks). Salah satu pembentuk kualitas sumber daya manusia yang unggul adalah peningkatan kompetensi berbahasa penuturnya, baik secara lisan, tulis, maupun isyarat. Oleh sebab itu, pembangunan manusia Indonesia harus dilaksanakan dengan melibatkan aspek kebahasaan.

Pembangunan bidang kebahasaan yang tepat sasaran akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan akan berdampak pada kemampuan literasi seseorang. Kemampuan literasi merupakan kemampuan individu dalam mengolah dan memahami informasi ketika melakukan kegiatan membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, definisi literasi berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, saat ini istilah literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas dan sudah merambah pada praktik kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial dan politik.

Definisi baru dari literasi menunjukkan paradigma baru dalam upaya memaknai literasi dan pembelajarannya. Kini ungkapan literasi memiliki banyak variasi, seperti literasi media, literasi komputer, literasi sains, literasi sekolah, dan lain sebagainya. Hakikat berliterasi secara kritis dalam masyarakat demokratis diringkas dalam lima verba: memahami, melibatkan, menggunakan, menganalisis, dan mentransformasi teks. Kesemuanya merujuk pada kompetensi atau kemampuan yang lebih dari sekedar kemampuan membaca dan menulis.

Sehubungan dengan itu, peningkatan kemampuan berliterasi yang berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul memerlukan perencanaan strategis dan terstruktur. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur sebagai unit pelaksana

teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki kewenangan dalam bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta sebagai lembaga strategis dalam pembentukan SDM di wilayah Provinsi Jawa Timur. Berikut ini kondisi umum, potensi dan permasalahan, serta tantangan yang ada dalam perencanaan strategis pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Capaian Kinerja 2020—2024

Selama periode pembangunan kebahasaan dan kesastraan tahun 2020–2024, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur melaksanakan tiga program prioritas utama, yaitu **(1) Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan**, **(2) Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah**, dan **(3) Internasionalisasi Bahasa Indonesia**. Ketiga program tersebut menjadi pilar strategis dalam mendukung peningkatan kualitas kebahasaan dan kesastraan di wilayah Jawa Timur, serta berkontribusi terhadap pencapaian sasaran nasional dalam bidang pengembangan dan pembinaan bahasa.

Dalam program **Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan**, berbagai capaian penting berhasil diraih, antara lain tersedianya *produk penerjemahan* dan *produk kodifikasi bahasa* sebagai wujud hasil pengembangan sumber daya kebahasaan; terlaksananya *pengujian kemahiran berbahasa Indonesia adaptif* sebagai bentuk peningkatan kompetensi berbahasa masyarakat; serta meningkatnya jumlah *lembaga yang terfasilitasi layanan profesional kebahasaan dan kesastraan*. Selain itu, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur juga berhasil membina sejumlah *komunitas literasi*, *generasi muda dalam program literasi kebahasaan dan kesastraan*, serta *penutur bahasa Indonesia* melalui berbagai kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan. Upaya ini turut memperkuat ekosistem literasi masyarakat Jawa Timur secara berkelanjutan.

Pada bidang **Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah**, capaian program diwujudkan melalui pelaksanaan *Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah (RBD)* yang secara bertahap diperluas dari tahun ke tahun. Kegiatan ini dimulai pada tahun 2021 di satu kabupaten dengan melibatkan 50 generasi muda, dan pada tahun 2022 juga mencakup satu kabupaten dengan jumlah peserta yang sama. Selanjutnya, pada tahun 2023 program ini berkembang mencakup lima kabupaten dengan dua bahasa daerah yang direvitalisasi, dan meningkat menjadi tujuh kabupaten dengan dua bahasa pada tahun 2024. Program revitalisasi ini direncanakan terus berlanjut hingga tahun 2025 dengan cakupan sepuluh kabupaten dan tiga bahasa daerah.

Peningkatan tersebut menunjukkan komitmen Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dalam menjaga kelestarian bahasa dan sastra daerah sebagai warisan budaya takbenda.

Sementara itu, dalam program **Internasionalisasi Bahasa Indonesia**, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur berperan aktif dalam mendukung penyebarluasan bahasa Indonesia di tingkat nasional dan internasional melalui program *Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)*. Capaian utama program ini meliputi meningkatnya jumlah *pemelajar BIPA* di Jawa Timur selama periode 2021–2024, terbentuknya *lembaga-lembaga BIPA binaan* yang aktif melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, serta bertambahnya *pengajar BIPA terbina* yang memiliki kompetensi profesional di bidang pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing.

Secara keseluruhan, capaian dari ketiga program prioritas tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam efektivitas pelaksanaan program, baik dari segi kuantitas maupun kualitas output yang dihasilkan. Ringkasan capaian kinerja selama dua masa nomenklatur, yakni 2020—2021 dan 2022—2024, memperlihatkan bahwa Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur mampu mempertahankan konsistensi kinerja dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan literasi, pelindungan bahasa daerah, serta penguatan posisi bahasa Indonesia di tingkat internasional.

a. Capaian Kinerja Tahun 2020—2021

Pada periode 2020, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur menetapkan enam sasaran kegiatan (SK), yakni (1): Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia; (2) Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa (3) Terwujudnya Penggunaan Bahasa di Ruang Publik; dan (4) Meningkatnya Penutur Bahasa Terbina; (5) Terlindunginya Bahasa dan Sastra Kritis yang Terancam Punah; (6) Meningkatnya Tata Kelola Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Berikut ini capaian Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur 2020.

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	%
1. Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia	1.1	Jumlah Kosakata Indonesia	500	1.250	250
2. Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa	2.1	Jumlah Rekomendasi Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian	1	1	100
3. Terwujudnya Penggunaan Bahasa di Ruang Publik	3.1	Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Terbina	18	18	100

4. Meningkatnya Penutur Bahasa Terbina	4.1	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	1300	948	72.92
5. Terlindunginya Bahasa dan Sastra Kritis yang Terancam Punah	5.1	Bahasa Terbina Jumlah Penutur Muda yang Terlibat Pelindungan Bahasa Daerah Kritis yang Terancam Punah	50	50	100
	5.2	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat Pelindungan Sastra Daerah Kritis yang Terancam Punah	50	50	100
	5.3	Jumlah Produk Sastra yang “Terkembangkan”	1	1	100
6. Meningkatnya Tata Kelola Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	6.1	Predikat Nilai SAKIP BB	BB	B	-
	6.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL Satker Minimal 91”	91	98,4	100

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Tahun 2020

Pada periode 2021, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur menetapkan lima sasaran kegiatan (SK), yakni (1): Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia; (2) Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik; (3) Meningkatnya Penutur Bahasa Terbina; (4) Terlindunginya Bahasa dan Sastra Kritis yang Terancam Punah; (5) Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Berikut ini capaian Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur tahun 2021.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Capaian 2021	%Capaian
1	Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	1000 Kosakata	1000 Kosakata	100%
2	Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina	13 Lembaga	13 Lembaga	100%
3	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	704	1285	183%
4	Terlindunginya bahasa dan Sastra daerah yang kritis dan terancam	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	50 Orang	50 Orang	100%
		Jumlah Produk Kesastraan “Terkembangkan”	20 Produk	20 Produk	100%
5	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan	Predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	BB	100%

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91	92	91,1	99%
---	---	----	------	-----

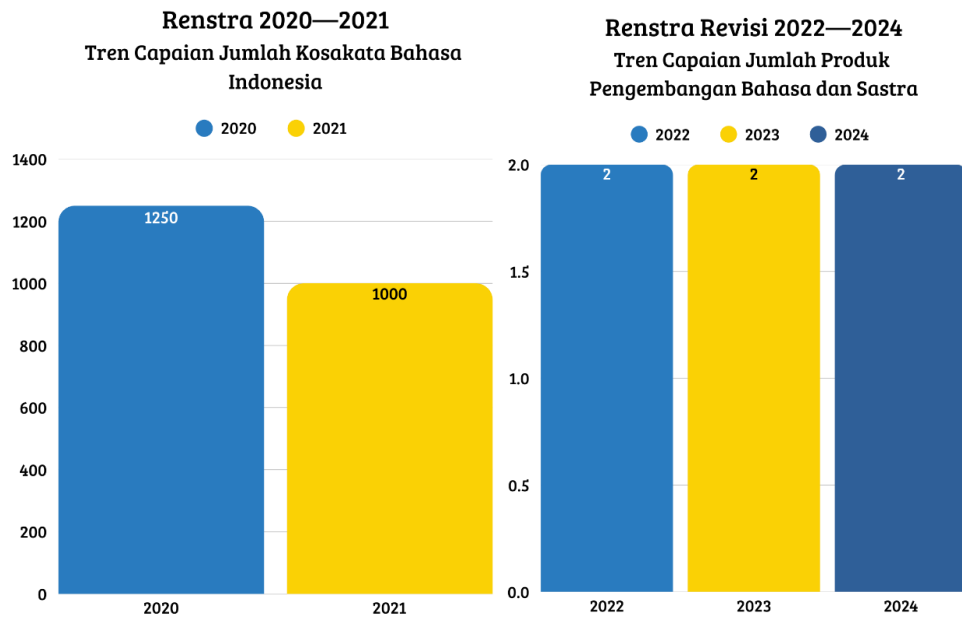
Tabel 1.2 Capaian Kinerja Tahun 2021

b. Capaian Kinerja Tahun 2022—2024

Pada periode 2021, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur menetapkan tujuh sasaran kegiatan (SK), yakni, (1) Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra, (2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan, (3) Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan, (4) Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA, (5) Tersedianya produk diplomasi bahasa, (6) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah, (7) Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Jawa Timur. Berikut ini capaian Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur tahun 2022—2024.

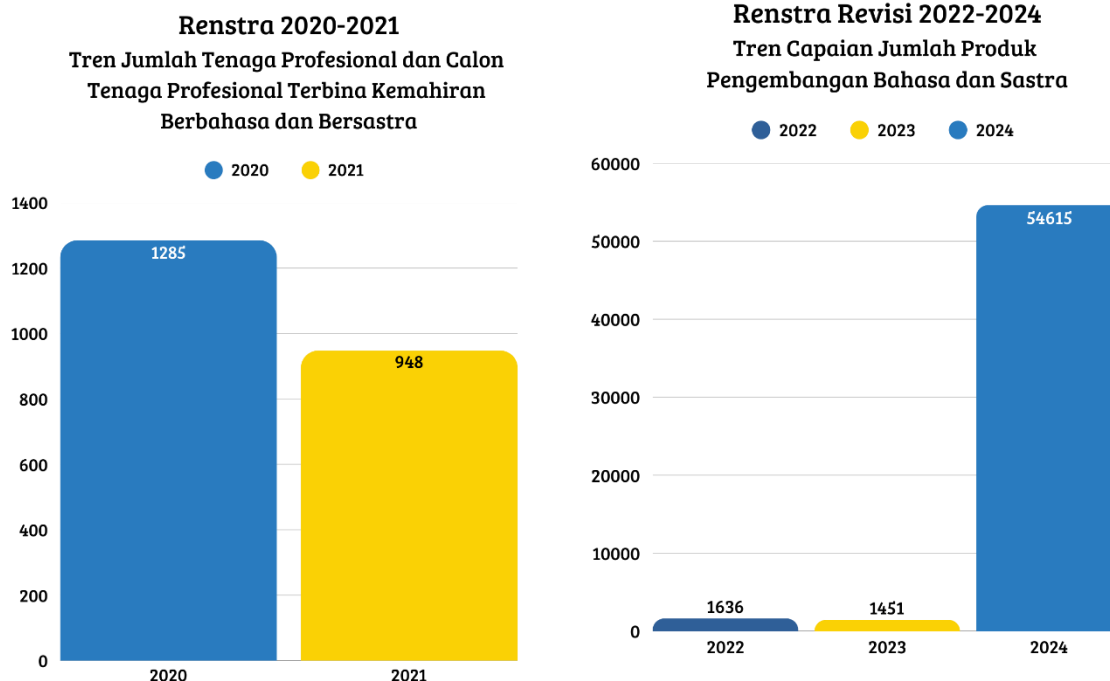
Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target			Capaian		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024
SK 1.0	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	IKK 1.1	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	Produk	2	2	2	2 (100%)	2 (100%)	2 (100%)
SK 2.0	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	IKK 2.1	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	Orang	978	1.008	16.735	1.636 (167%)	1.451 (144%)	58.879 (351%)
SK 3.0	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	IKK 3.1	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	Lembaga	45	45	45	45 (100%)	45 (100%)	45 (100%)
		IKK 3.2	Jumlah komunitas penggerak literasi terbina	Lembaga	10	10	13	12 (120%)	12 (120%)	19 (146%)
SK 4.0	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	IKK 4.1	Jumlah pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	Orang	185	185	234	204 (110)	233 (126%)	281 (120%)
SK 5.0	Tersedianya produk diplomasi bahasa	IKK 5.1	Jumlah produk penerjemahan	Produk	15	97	100	16 (107%)	110 (113%)	113 (113%)
SK 6.0	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah	IKK 6.1	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	Orang	22	251	315	50 (227%)	314 (125%)	378 (120%)
SK 7.0	Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Jawa Timur	IKK 7.1	Predikat SAKIP Balai Bahasa Jawa Timur	Predikat	BB	BB	A	A (119%)	A (120%)	A (107%)
		IKK 7.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Jawa Timur	Nilai	91	91	93	92.84 (102%)	96.89 (106%)	98.72 (106%)

Tabel 1.3 Capaian Kinerja Tahun 2022—2024



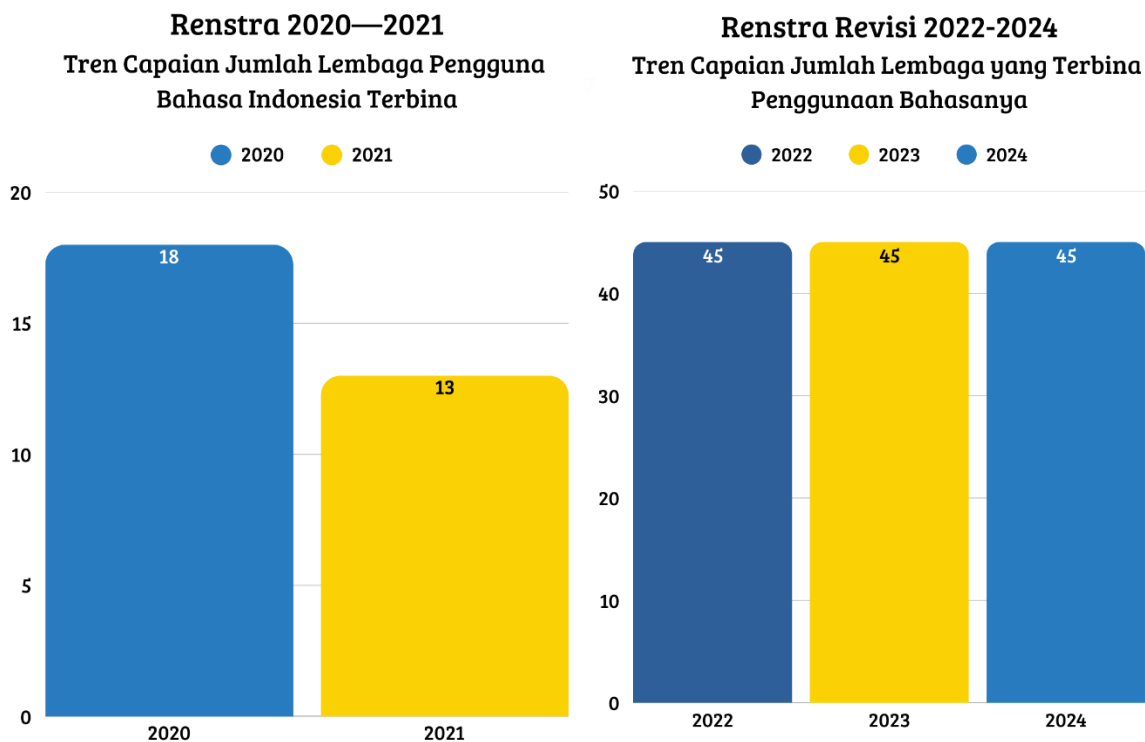
Grafik 1.1 Tren Capaian Jumlah Penutur Bahasa yang Terbina melalui Program Literasi Kebahasaan dan Kesastraan
2020—2024

Sasaran kegiatan pertama ialah *Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra* yang didukung oleh indikator kinerja kegiatan berupa Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra. Penyediaan produk pengembangan bahasa dan sastra dilakukan dengan menyediakan produk kodifikasi bahasa. Dalam upaya menyediakan produk kodifikasi bahasa, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan pemerkayaan kosakata dan pengembangan kamus. Pemerkayaan kosakata dilakukan dengan melakukan pengusulan sejumlah kosakata bahasa Jawa dan Madura di Jawa Timur sebagai bahan pengayaan kosakata pada KBBI, sedangkan pengembangan kamus dilakukan dengan penambahan data pada aplikasi kamus digital Kasada Jatim.



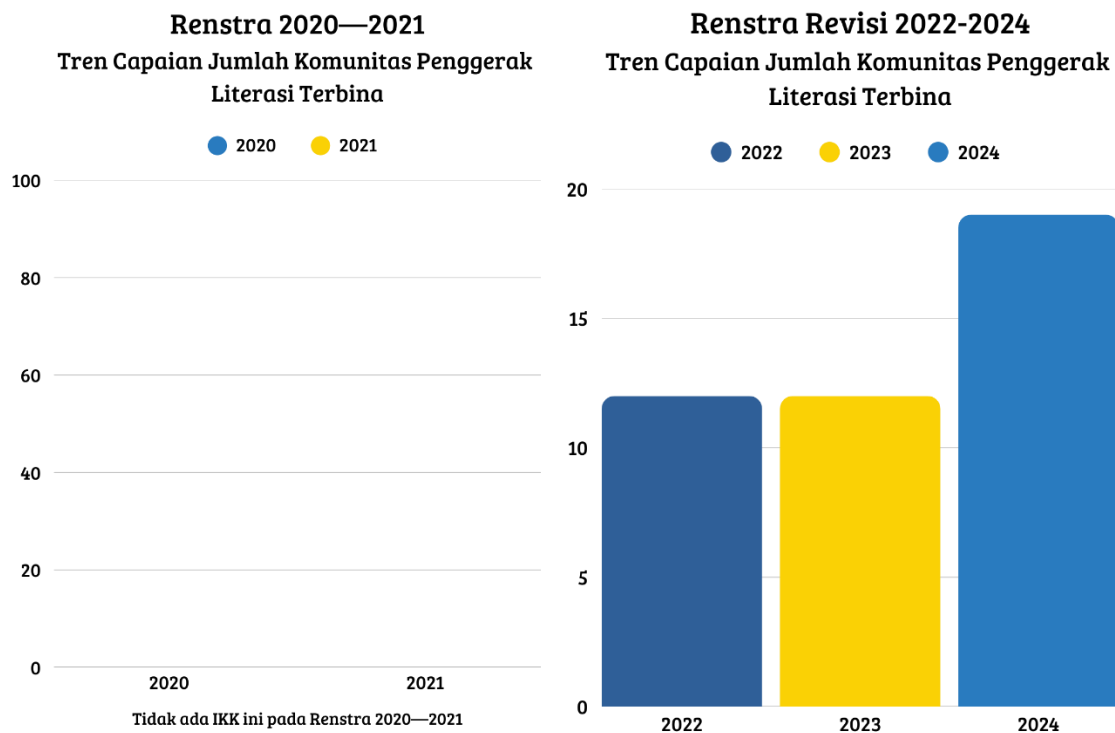
Grafik 1.2 Grafik Tren Capaian Jumlah Penutur Bahasa yang Terbina melalui Program Literasi Kebahasaan dan Kesastraan
2020—2024

Sasaran kegiatan kedua ialah *Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan* yang didukung oleh indikator kinerja kegiatan berupa Jumlah Penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan. Peningkatan partisipasi masyarakat terbina program literasi dilakukan sebagai bagian dari upaya pembinaan literasi kebahasaan dan kesastraan bagi masyarakat dan generasi muda, khususnya di Jawa Timur. Sasaran utama pembinaan literasi kebahasaan dan kesastraan tersebut adalah penutur bahasa Indonesia, yaitu penutur bahasa yang karena profesi dan jabatannya menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Bentuk pembinaan dilakukan dengan, antara lain, (1) peningkatan kemahiran berbahasa dan sastra, (2) pengujian kemahiran berbahasa Indonesia, dan (3) pembinaan literasi generasi muda.



1.3 Grafik Tren Capaian Jumlah Lembaga yang Terbina Penggunaan Bahasanya 2020—2024

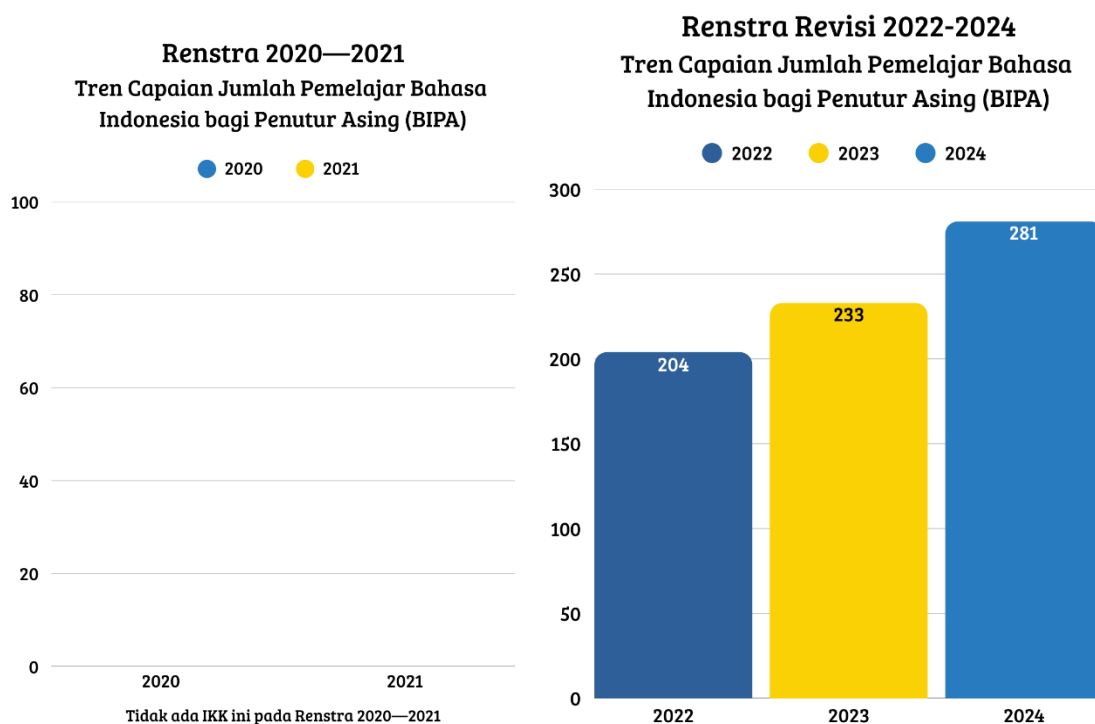
Sasaran kegiatan ketiga ialah *Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan* yang didukung oleh indikator kinerja kegiatan (1) Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya dan (2) Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina. Pada indikator kinerja kegiatan (IKK) pertama, Lembaga terbina adalah unit sasaran pembinaan penggunaan bahasa negara yang terdiri atas tiga kategori, yaitu lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, dan lembaga swasta berbadan hukum. Bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi audiensi, sosialisasi berupa pemberian materi, pendampingan atau asistensi perbaikan penggunaan bahasa pada lembaga, serta pemantauan/evaluasi dan pemberian penghargaan. IKK ini dilakukan selama 3 tahun, yaitu pada tahun 2022—2025.



1.4 Grafik Tren Capaian Jumlah Komunitas Penggerak Literasi Terbina 2020—2024

IKK kedua bertujuan untuk membina dan meningkatkan kompetensi para ketua/pengurus komunitas literasi dalam hal penguatan manajemen komunitas literasi, pengelolaan buku dan pojok baca, penyusunan program komunitas literasi yang kreatif, cerdas, berliterasi digital, serta peningkatan kompetensi pembelajaran literasi di komunitas literasi. Setelah mengikuti kegiatan bimbingan teknis ini, mereka diharapkan mampu mengaplikasikannya di komunitas literasi mereka masing-masing. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur adalah melalui kegiatan (1) Bimtek Komunitas Penggerak Literasi, (2) Pendampingan Studi Banding Komunitas Literasi, dan (3) Sarasehan Literasi. Kegiatan pertama adalah Bimtek Komunitas Penggerak Literasi. Bimtek ini bertujuan untuk memberdayakan para ketua/pengurus komunitas literasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait penyediaan buku bacaan literasi, pembelajaran literasi (khususnya literasi baca—tuliskan bagi anak usia dini dan kelas awal), pembiasaan cerdas berliterasi digital di masyarakat (sehingga masyarakat mampu menangkal hoaks dan bijak dalam memanfaatkan medsos), dan adanya program kegiatan literasi yang kreatif dan inovatif di komunitas literasi. Dalam pelaksanaannya, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur berhasil membina 12 komunitas literasi sebagai peserta bimtek. Kegiatan kedua adalah Pendampingan Studi Banding Komunitas Literasi. Kegiatan ini dilakukan untuk memfasilitasi berbagai praktik baik antarkomunitas, yaitu komunitas berkategori A untuk berbagi praktik baik kepada komunitas berkategori B di wilayahnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan, pengetahuan,

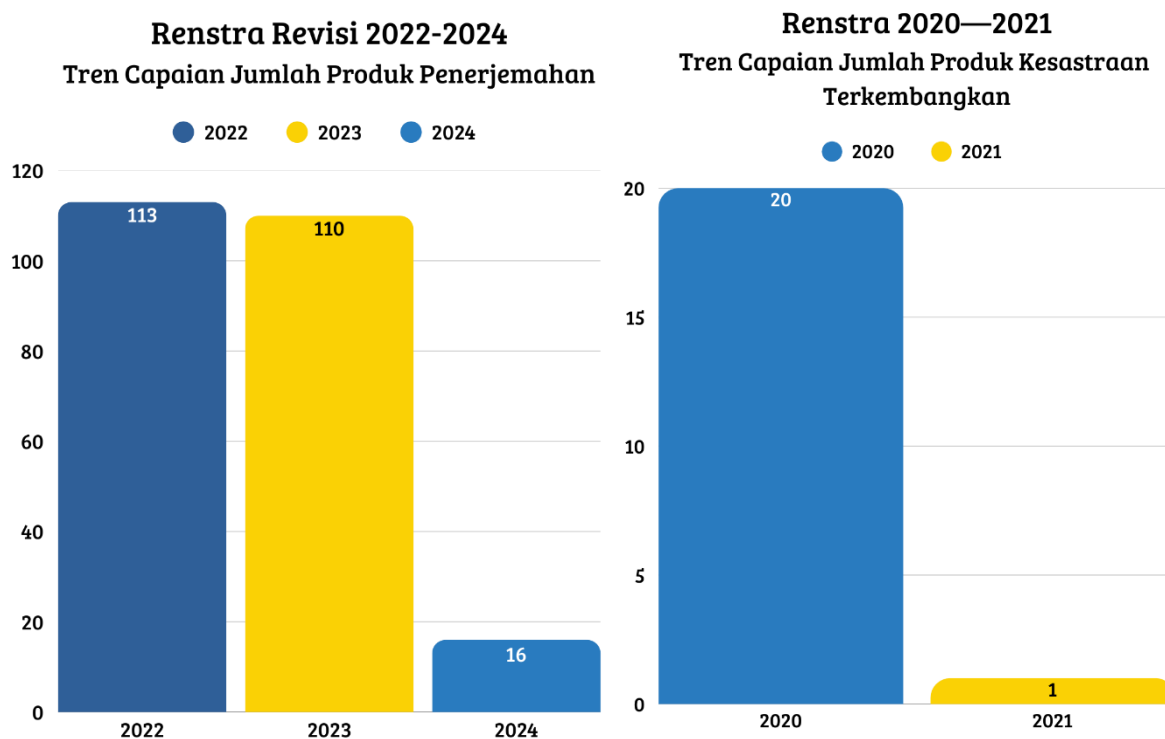
dan pengalaman dalam pengelolaan manajemen dan penyusunan program kerja komunitas, serta interaksi antarkomunitas dalam pelaksanaan program literasi. Kegiatan ketiga adalah Sarasehan Penggerak Literasi. Kegiatan ini merupakan rutin yang dilakukan setiap tahun sebagai kegiatan pendukung dan merupakan bentuk optimalisasi program dan anggaran Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dalam hal pemberdayaan komunitas literasi. Kegiatan ini menjadi ajang perkumpulan para anggota komunitas literasi di wilayah Jawa Timur untuk saling berdiskusi tentang sebuah topik tertentu pada setiap pertemuannya.



Grafik 1.5 Tren Capaian Jumlah Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) 2020—2024

Sasaran keempat ialah *Meningkatnya Jumlah Pemelajar BIPA* yang didukung oleh indikator kinerja kegiatan berupa Jumlah pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Sasaran kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemelajar BIPA di Jawa Timur. Harapan ini sejalan dengan amanah dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia; Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang amanat Pemerintah untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Pelayanan profesional program BIPA bagi lembaga di wilayah kerja BPP Jatim dilaksanakan melalui tiga model kegiatan, yaitu Bimbingan Teknis

bagi Pengajar BIPA, Forum Ilmiah Ke-BIPA-an, dan Pemasyarakatan Program BIPA. Pemfokusan layanan profesional program BIPA di wilayah kerja Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur melalui tiga model kegiatan tersebut bertujuan memprioritaskan peran Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur sebagai pengelola kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengembangan program BIPA di dalam negeri guna memenuhi target keluaran Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Program BIPA di dalam negeri.

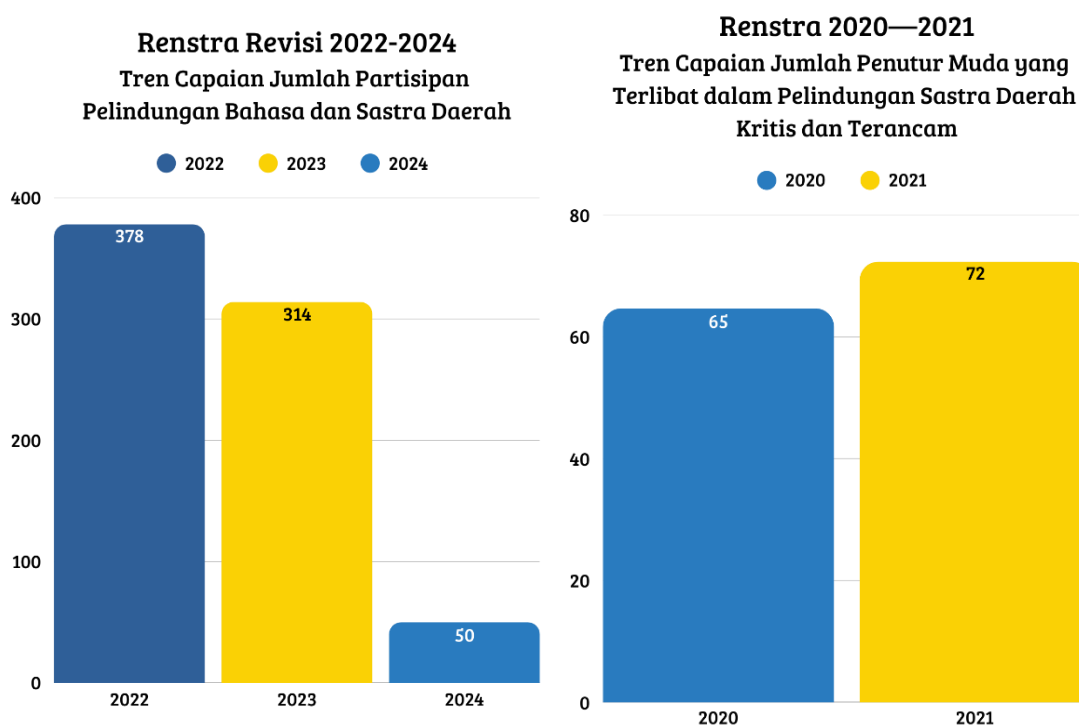


Grafik 1.6 Tren Capaian Jumlah Produk Penerjemahan 2020—2024

Sasaran kegiatan kelima ialah *Tersedianya Produk Diplomasi Bahasa* yang didukung oleh indikator kinerja kegiatan berupa Jumlah produk penerjemahan. Produk penerjemahan dapat berupa buku dan/atau dokumen yang dihasilkan dari pengalihbahasaan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran (dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya, serta dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah dan/atau sebaliknya). Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur melaksanakan penerjemahan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Sesuai dengan amanah dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan Budi Pekerti, penyediaan produk penerjemahan melalui penerjemahan karya sastra berbahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 2024 ini difokuskan pada cerita anak level dini dan awal dengan tema STEM (*Science, Technology, Engineering, and Math*). Produk penerjemahan

merupakan bentuk produk diplomasi kebahasaan yang berfungsi mendukung kepentingan strategis negara dan pemerintah sekurang-kurangnya untuk (1) mendukung penginternasionalan bahasa Indonesia melalui pemajuan bahasa Indonesia di dunia internasional, (2) memberikan pemahaman tentang nilai keindonesiaan kepada masyarakat internasional, (3) mempercepat penyerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta peradaban dunia, (4) melestarikan kearifan lokal dan mengembangkannya di tingkat nasional, serta (5) meningkatkan pemerataan akses informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif. Pelaksanaan penerjemahan dilakukan dengan menerjemahkan naskah sastra cerita anak berbahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. Pelaksanaan terjemahan dilakukan melalui beberapa tahapan berikut.

- Penelusuran Tema Penulisan Cerita Anak Dwibahasa
- Seleksi dan Penilaian Naskah Cerita Anak Dwibahasa
- Lokakarya Naskah Cerita Anak Dwibahasa
- Uji Keterbacaan Naskah Terjemahan
- Pencetakan Buku Hasil Terjemahan

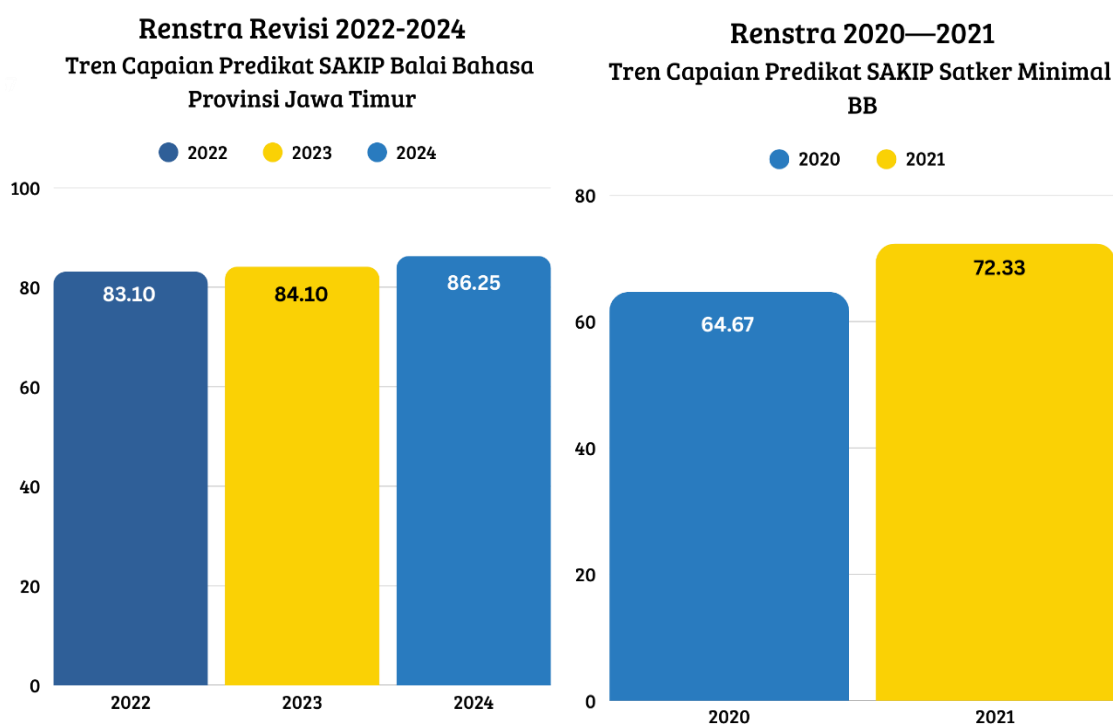


1.7 Grafik Tren Capaian Jumlah Partisipan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah 2020—2024

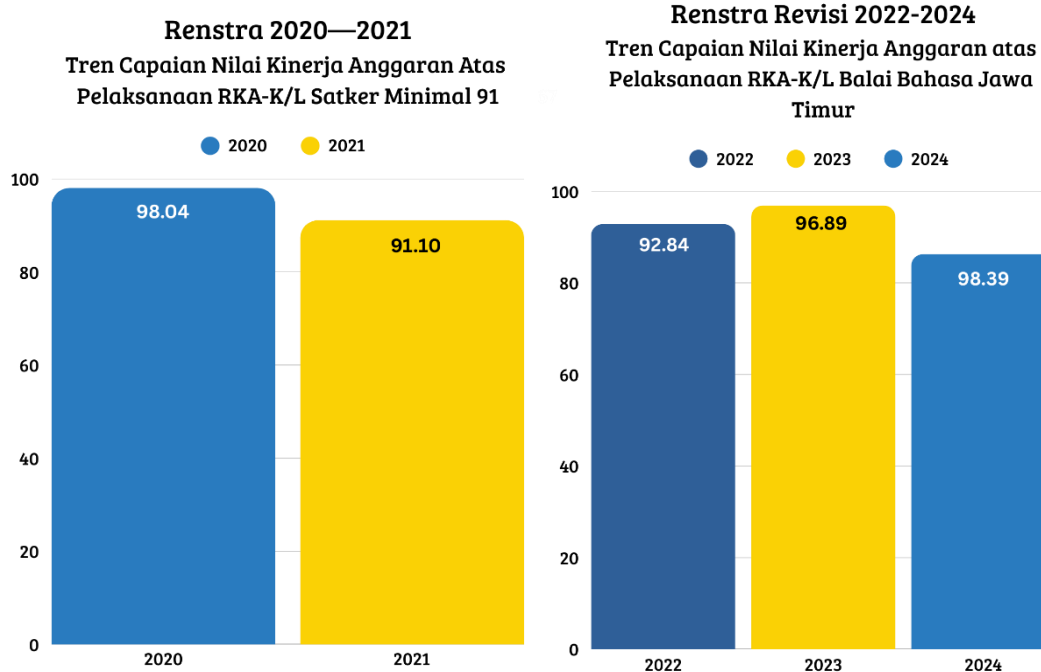
Sasaran kegiatan keenam adalah *Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah* yang didukung oleh indikator kinerja kegiatan berupa Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah. Pelindungan bahasa dan sastra daerah

yang terancam punah merupakan amanah dari PP Nomor 57 Tahun 2014, tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Model pelindungan bahasa daerah melalui Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) dimulai sejak tahun 2023, setelah sebelumnya Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur melaksanakan Revitalisasi Sastra Lisan pada tahun 2022. Ketercapaian RBD ini didukung oleh komponen/aktivitas berikut ini.

- Koordinasi Antarinstansi dalam Rangka Pelindungan Bahasa Daerah
- Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam Rangka Penyusunan Komitmen Bersama
- Penyusunan Modul Bahan Ajar RBD
- Pemberdayaan Penutur Jati dan Pelaku Sastra melalui Pelatihan Guru Master.
- Pemantauan dan Evaluasi Pengimbasan
- Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Provinsi
- Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Nasional
- Kemah Cerpen



Grafik 1.8 Tren Capaian Predikat SAKIP Balai Bahasa Jawa Timur 2020—2024



Grafik 1.9 Tren Capaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur 2020—2024

Sasaran kegiatan ketujuh ialah *Meningkatnya Tata Kelola Balai Bahasa Jawa Timur* yang didukung oleh dua indikator kinerja kegiatan, yaitu (1) Predikat SAKIP Balai Bahasa Jawa Timur dan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur menunjukkan perubahan yang progresif sejak 2020—2024, yaitu B, BB, hingga menjadi A. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat. Penilaian Kinerja dilakukan atas dua indikator, yaitu (1) Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran dan (2) Indikator Kinerja atas Perencanaan Anggaran. Masing-masing indikator berkontribusi 50% dalam perhitungan nilai Kinerja anggaran (NKA). Perjalanan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dalam mengawal NKA juga menunjukkan kenaikan positif, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 akibat terjadinya COVID19, tetapi sejak kembali meningkat pada tahun 2022—2024.

1.2 Permasalahan dan Potensi

Permasalahan dan potensi bidang kebahasaan dan kesastraan dijabarkan dalam analisis lingkungan strategis dan potensi serta tantangan sebagai berikut.

1.2.1 Permasalahan dan Analisis

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program pada periode 2020—2024, dapat diidentifikasi permasalahan yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan, untuk periode 2025—2029 sebagai berikut.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan program 2020—2024, teridentifikasi sejumlah permasalahan yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan ke depan, yaitu:

1) Kebijakan pemerintah yang dinamis

Perubahan arah kebijakan nasional yang seringkali tidak dapat diprediksi berdampak langsung pada pergeseran program dan anggaran, sehingga memengaruhi konsistensi capaian target.

2) Kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap bahasa dan sastra daerah

Pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa serta sastra daerah belum menjadi prioritas utama pemerintah daerah, sehingga upaya pelestariannya masih terbatas.

3) Minimnya dukungan pemerintah daerah terhadap komunitas literasi

Keberadaan komunitas literasi di Jawa Timur masih menghadapi tantangan pembinaan dan fasilitasi, akibat keterbatasan perhatian dan dukungan dari pemda.

4) Rendahnya keterlibatan publik atas Penanganan Isu Kebahasaan dan Kesastraan

Partisipasi masyarakat dalam penanganan isu-isu kebahasaan dan kesastraan masih terbatas, sehingga program belum sepenuhnya menjadi gerakan bersama.

5) Keterbatasan sarana dan prasarana

Layanan kebahasaan belum didukung sarana dan prasarana yang memadai, sehingga kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.

6) Terbatasnya sumber daya manusia (SDM)

Jumlah dan kualitas SDM dengan kompetensi kebahasaan dan kesastraan masih belum mencukupi, baik dalam aspek wawasan, keahlian, maupun pemerataan distribusi.

Permasalahan di atas merupakan tantangan yang harus diatasi. Beberapa langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Menghadapi dinamika kebijakan pemerintah

- Menyusun rencana kerja yang adaptif dan fleksibel agar dapat menyesuaikan perubahan kebijakan serta alokasi anggaran.

- Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi internal sehingga perubahan kebijakan dapat segera ditindaklanjuti tanpa mengganggu target utama.
- 2) Penguatan peran pemerintah daerah dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah**
- Melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan kebahasaan kepada pemda agar masuk dalam RPJMD dan program prioritas daerah.
 - Mengembangkan program kemitraan dengan dinas pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata untuk mendorong pelestarian bahasa dan sastra daerah.
- 3) Pembinaan komunitas literasi di Jawa Timur**
- Memberikan fasilitasi dan dukungan berkelanjutan bagi komunitas literasi melalui pendampingan, bantuan teknis, maupun program insentif.
 - Membangun jejaring antar komunitas literasi dengan lembaga pendidikan, perpustakaan, dan instansi pemerintah untuk memperluas jangkauan pembinaan.
- 4) Peningkatan keterlibatan publik**
- Mengadakan program kampanye literasi dan kebahasaan berbasis masyarakat, seperti festival bahasa, lomba literasi, dan forum diskusi publik.
 - Mengoptimalkan media sosial, platform digital, dan layanan daring untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kebahasaan dan kesastraan.
- 5) Penyediaan sarana dan prasarana layanan kebahasaan**
- Mengusulkan penguatan anggaran khusus untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana layanan kebahasaan.
 - Mengembangkan sistem layanan kebahasaan berbasis digital agar lebih efisien, murah, dan menjangkau masyarakat luas.
- 6) Penguatan sumber daya manusia (SDM)**
- Melaksanakan pelatihan berjenjang bagi pegawai dan tenaga kebahasaan dalam bidang linguistik, literasi, dan kesastraan.
 - Mendorong kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM kebahasaan.
 - Menyusun strategi distribusi SDM agar lebih merata di wilayah Jawa Timur.

1.2.2 Potensi di Jawa Timur

Agar pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan berdampak luas bagi masyarakat, perlu dioptimalkan potensi-potensi berikut ini.

1) Potensi Keragaman Bahasa di Jawa Timur

Jawa Timur menyimpan keragaman bahasa yang mempesona. Lebih dari sekadar dialek, variasi bahasa Jawa di Jawa Timur mencerminkan kekhasan geografis dan sejarah masing-masing wilayah. Selain itu, Provinsi Jawa Timur juga memiliki wilayah terluas di antara enam provinsi di pulau Jawa dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Wilayah Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Selat Bali (Provinsi Bali) di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di sebelah barat. Wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi wilayah darat dan wilayah kepulauan. Wilayah kepulauan meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean, Kepulauan Kangean serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa, yakni Kepulauan Masalembu, Pulau Sempu dan Nusa Barung. Dari segi geografis ini, terdapat beberapa suku yang menempati wilayah Kepulauan, yaitu penduduk suku Jawa, Madura, Bali, NTB, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra. Hal ini turut mempengaruhi budaya, sastra, dan bahasanya. Pada data peta bahasa milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, terdapat 3 bahasa di Jawa Timur, yaitu bahasa Jawa, Madura, dan Bajo. Tidak menutup kemungkinan terdapat bahasa lain yang teridentifikasi di Jawa Timur. Hal ini menjadi potensi data pemetaan bahasa daerah di Jawa Timur.

2) Potensi Tradisi Lisan di Jawa Timur

Tradisi lisan merupakan tuturan yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat, seperti lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat. Provinsi Jawa Timur terdiri atas 38 kabupaten/kota. Dengan wilayah yang luas, Provinsi Jawa Timur memiliki keragaman etnis, bahasa, dan budaya, termasuk tradisi lisannya. Kelompok etnis yang cukup besar adalah Jawa, Madura, Using, dan Tengger. Oleh karena itu, tiap etnis pada tiap daerah memiliki mitos, legenda, kebiasaan/tradisi, dan ritual masing-masing. Hal itu menjadi sebuah potensi besar bagi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur untuk menghidupkan kembali, mentransformasi, dan mengenalkannya pada para generasi muda, baik sebagai kebudayaan yang bernilai luhur ataupun sebagai sumber ekonomi baru (ekonomi kreatif).

3) Potensi Pegiat Literasi

Pertumbuhan komunitas literasi di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan jumlah yang signifikan. Komunitas tersebut tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Melihat jumlah komunitas literasi yang cukup banyak, sangat dimungkinkan pegiat literasi di seluruh Jawa Timur juga banyak. Melihat potensi besar ini, Balai Bahasa Provinsi Jawa

Timur perlu melakukan upaya fasilitasi terhadap komunitas literasi serta pegiat literasi agar literasi masyarakat Jawa Timur dapat meningkat.

4) Potensi UKBI

UKBI adalah instrumen tes utama kemahiran berbahasa Indonesia di dalam negeri dan luar negeri. UKBI telah dikembangkan seturut ilmu, pengetahuan, dan teknologi, baik dalam desain, materi, proses, maupun teknologi layanan pengujiannya. Teknologi layanan yang mutakhir adalah UKBI multistage adaptive testing. Jawa Timur memiliki 47 PTN dan lebih dari 100 PTS yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Menurut data BPS 2025, terdapat 23.361.110 jumlah penduduk menurut status pekerjaan di seluruh Provinsi Jawa Timur per Februari 2024. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur baru melaksanakan 45,05% dari total tenaga profesional dan non tenaga profesional yang mengikuti tes UKBI. Dengan begitu, Jawa Timur memiliki potensi besar untuk ikut meningkatkan jumlah peserta UKBI.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Visi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur tahun 2025—2029 mengacu pada visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diturunkan dari visi Presiden. Visi tersebut dirumuskan sebagai berikut.

Terwujudnya Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan Dukungan Partisipasi Semesta dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 melalui Bahasa dan Sastra

Dari rumusan visi tersebut, dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia telah sampai kepada cita-cita menjadi bangsa yang maju melalui pendidikan bermutu dengan dukungan seluruh masyarakat Indonesia melalui bahasa dan sastra.

2.2 Misi

Untuk mencapai visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur menetapkan misi dengan mengacu pada misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai berikut.

- 1) Mewujudkan kecakapan literasi pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan di Jawa Timur;
- 2) Mewujudkan pemertabatan bahasa Indonesia di Jawa Timur;
- 3) Mewujudkan kelestarian bahasa dan sastra daerah di Jawa Timur;
- 4) Meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra;
- 5) Mengoptimalkan tata kelola Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Dalam bidang kebahasaan dan kesastraan, misi tersebut dijadikan pijakan untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh tata kelola yang efektif.

2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Sesuai dengan tujuan dan indikator tujuan pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Bahasa memiliki Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan sebagai berikut.

Kode	Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target 2029
SS 2	Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan		

IKSS 2.2	Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional	Persentase	76,62
SS 3	Meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaannya dalam dunia pendidikan dan masyarakat		
IKSS 3.1	Indeks Pembangunan Kebahasaan	Indeks	55.01
IKSS 3.2	Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia	Indeks	55.87

Untuk mencapai Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran tersebut, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur menetapkan tujuan yang akan dicapai. Tujuan tersebut mengacu pada sasaran program dalam Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025.

- 1) Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan;
- 2) Meningkatnya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia;
- 3) Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian.

Tujuan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan sebagai ukuran kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode renstra (2029). Indikator kinerja tujuan yang ditetapkan merupakan indikator kinerja program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah sebagai berikut.

- 1) Persentase Satuan Pendidikan yang peserta didiknya meningkat kualitas literasi membaca;
- 2) Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia;
- 3) Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra;
- 4) Angka Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni;
- 5) Indeks Pelestarian Bahasa Daerah (IPBD);
- 6) Persentase Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang Terfasilitasi Standar Kompetensi Lulusan;
- 7) Persentase Lembaga Internasional yang Memanfaatkan Program Diplomasi Kebahasaan dan Kesastraan;
- 8) Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;

- 9) Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Target keberhasilan tujuan berdasarkan indikator tujuan selama periode renstra 2025—2029 ditetapkan sebagai berikut.

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Periode Akhir Renstra (2029)
Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan;	Persentase Satuan Pendidikan yang peserta didiknya meningkat kualitas literasi membaca	%	80
Meningkatnya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia;	Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia	Angka	84,52
	Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra	%	51,6
	Angka Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni	Angka	11,89
	Indeks Pelestarian Bahasa Daerah (IPBD)	Indeks	57,29
	Persentase Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang Terfasilitasi Standar Kompetensi Lulusan	%	57
	Persentase Lembaga Internasional yang Memanfaatkan Program Diplomasi Kebahasaan dan Kesastraan	%	5,6
Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian.	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Nilai	Sangat Baik
	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.	Predikat	AA

2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran yang ditetapkan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur merupakan sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025—2029 sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025. Adapun sasaran kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca

	Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik
Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia	Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya
	Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya
Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan	Persentase lembaga terbina yang meningkatkan kualitas penggunaan bahasanya
	Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkatkan kualitas kinerjanya
Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi
Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan
	Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas
Meningkatnya fasilitas terhadap lembaga penyelenggara program BIPA	Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terasilitasi (Dalam Negeri)
Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Jawa Timur	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional serta pencapaian visi *Indonesia Emas 2045*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan arah kebijakan dan strategi yang sejalan dengan kebijakan nasional dan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Arah kebijakan ini merupakan pedoman bagi seluruh satuan kerja di bawah naungan Badan, termasuk Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di seluruh wilayah Indonesia.

Arah kebijakan dan strategi tersebut meliputi empat fokus utama sebagai berikut.

1. **Peningkatan Kecakapan Literasi**, yaitu memperkuat kemampuan literasi dasar dan literasi lanjut masyarakat melalui berbagai program peningkatan kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis yang terintegrasi dengan dunia pendidikan dan masyarakat luas. Upaya ini mencakup penyediaan bahan bacaan bermutu, pelatihan literasi bagi pendidik dan peserta didik, serta pemberdayaan komunitas literasi di seluruh daerah.
2. **Pemertabatan Bahasa dan Sastra Indonesia**, yaitu meneguhkan fungsi bahasa Indonesia sebagai jati diri, pemersatu bangsa, serta sarana komunikasi resmi di ruang publik, pendidikan, dan pemerintahan. Upaya ini dilaksanakan melalui pembinaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), serta penghargaan terhadap karya sastra Indonesia yang bernilai tinggi.
3. **Pelestarian Bahasa Daerah**, yaitu melindungi dan mengembangkan bahasa serta sastra daerah sebagai warisan budaya bangsa yang tak ternilai. Langkah strategis ini diwujudkan melalui pemetaan, dokumentasi, revitalisasi, dan pembinaan bahasa daerah agar tetap hidup dan berfungsi dalam masyarakat, sekaligus menjadi sumber pengetahuan dan kebanggaan identitas lokal.
4. **Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia**, yaitu memperluas peran bahasa Indonesia di tingkat global sebagai bahasa komunikasi antarbangsa, ilmu pengetahuan, dan diplomasi budaya. Upaya ini dilakukan melalui penguatan program *Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)*, peningkatan kompetensi pengajar BIPA, pengembangan bahan ajar digital, serta promosi bahasa dan sastra Indonesia di forum internasional.

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi tersebut secara efektif, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengembangkan *platform* Tim Kerja Kebahasaan dan Kesastraan sebagai instrumen pengelolaan dan koordinasi kinerja di tingkat pusat maupun Unit

Pelaksana Teknis (UPT). *Platform* ini bertujuan mengoptimalkan peran tenaga fungsional agar dapat bekerja secara kolaboratif, adaptif, dan produktif sesuai bidang keahliannya. Melalui pendekatan tim kerja ini, pelaksanaan program di bidang kebahasaan dan kesastraan diharapkan menjadi lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik serta penguatan jati diri kebahasaan bangsa.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, serta Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang kebahasaan dan kesastraan yang mencakup aspek pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, serta pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur menetapkan fokus kebijakan pada empat arah utama, yaitu peningkatan kecakapan literasi, pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia, pelestarian bahasa dan sastra daerah, serta penginternasionalan bahasa dan sastra Indonesia. Keempat arah kebijakan tersebut menjadi landasan strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025–2029.

1. Peningkatan Kecakapan Literasi

Arah kebijakan ini berfokus pada penguatan kemampuan literasi masyarakat di Jawa Timur sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan meliputi pengembangan program literasi membaca yang terintegrasi dengan kurikulum pendidikan dasar dan menengah, penyediaan bahan bacaan yang bermutu dan inklusif, serta pelaksanaan pelatihan berkelanjutan bagi pendidik untuk memperkuat pembelajaran berbasis literasi. Selain itu, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur juga membangun kemitraan dengan komunitas literasi, perpustakaan, dan lembaga swasta guna memperluas gerakan literasi yang berdampak nyata di masyarakat.

2. Pemertabatan Bahasa dan Sastra Indonesia

Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat fungsi bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa, sarana komunikasi resmi, serta simbol pemersatu nasional. Berbagai strategi dilaksanakan, antara lain mendorong pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, media massa, dan lembaga pemerintahan maupun pendidikan; menyelenggarakan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) secara masif dan berjenjang; serta memberikan apresiasi kepada sastrawan dan penulis melalui penghargaan dan fasilitasi ruang berkarya. Selain itu, Balai Bahasa juga aktif menyelenggarakan kampanye kebahasaan dan kesastraan melalui media digital, festival, dan lomba yang melibatkan generasi muda, serta memperkuat regulasi dan pedoman kebahasaan untuk menjaga martabat bahasa Indonesia di ranah formal maupun publik.

3. Pelestarian Bahasa Daerah

Dalam upaya menjaga keberlanjutan bahasa daerah sebagai warisan budaya bangsa, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur melaksanakan berbagai kegiatan strategis, seperti pemetaan, dokumentasi, dan revitalisasi bahasa daerah yang terancam punah. Selain itu, dikembangkan pula bahan ajar, kamus, dan pedoman kebahasaan daerah untuk mendukung pelestarian dan transmisi bahasa antargenerasi. Peningkatan kapasitas guru dan pegiat bahasa daerah dilakukan melalui pelatihan dan kerja sama dengan perguruan tinggi. Program apresiasi dan festival bahasa daerah juga diselenggarakan untuk menumbuhkan kebanggaan masyarakat terhadap bahasa dan sastra daerahnya. Upaya perlindungan ini diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah agar program pelestarian bahasa dan sastra daerah menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.

4. Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia

Arah kebijakan ini bertujuan memperluas peran dan pengaruh bahasa serta sastra Indonesia di tingkat global. Strategi yang ditempuh meliputi penguatan dan perluasan penyelenggaraan program *Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)* di dalam negeri melalui kerja sama diplomasi kebahasaan dengan lembaga penyelenggara BIPA, perguruan tinggi negeri dan swasta, serta asosiasi profesi. Selain itu, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur mengembangkan bahan ajar BIPA berbasis digital yang mudah diakses dan adaptif terhadap kebutuhan pembelajaran lintas negara. Upaya ini didukung pula oleh kegiatan promosi karya sastra Indonesia melalui penerjemahan, festival sastra, dan pameran buku di tingkat nasional maupun internasional sebagai bentuk diplomasi budaya bangsa.

Melalui keempat arah kebijakan dan strategi tersebut, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan mutu layanan kebahasaan dan kesastraan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Seluruh langkah strategis tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian visi *Terwujudnya Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan Dukungan Partisipasi Semesta dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 melalui Bahasa dan Sastra*.

3.3 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis, beberapa regulasi yang diprioritaskan untuk dilakukan penyesuaian atau perubahan periode tahun 2025—2029 adalah sebagai berikut.

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Ada, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia	Penguatan kebijakan BBP Jatim dalam pengawasan bahasa untuk melaksanakan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia	2029
2.	Peraturan Daerah tentang Pedoman Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Penguatan kebijakan BBP Jatim dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi penggunaan bahasa di ruang publik	2029
3.	Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pelestarian bahasa dan sastra daerah	Penguatan kebijakan dan program kerja BBP Jatim dalam melakukan upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah di Jawa Timur	2029

3.4 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur memerlukan dukungan kerangka kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, tata kelola, dan manajemen aparatur sipil negara yang efektif dan efisien. Dukungan tersebut diperlukan agar Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Dengan adanya kerangka kelembagaan ini, penataan organisasi dapat diselaraskan dengan pencapaian sasaran organisasi, peningkatan efektivitas dan efisiensi struktur organisasi, dan pencegahan terjadinya duplikasi tugas dan fungsi.

3.4.1 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Balai Bahasa adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Balai Bahasa dipimpin oleh Kepala. Struktur kelembagaan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur seperti pada bagan organisasi berikut.



3.4.2 Reformasi Birokrasi (Pencanangan WBBM)

Reformasi birokrasi internal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sebagai bagian integral dari penguatan tata kelola kelembagaan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025—2029 di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk memperkuat efektivitas organisasi dalam mendukung pencapaian visi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Reformasi Birokrasi dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat organisasi Kementerian/Lembaga mampu memberikan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Program Reformasi Birokrasi Kemendikdasmen Tahun 2025—2029 bertujuan untuk mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi maupun integritas. Penguatan manajemen dan kinerja menjadi landasan utama dalam membangun birokrasi yang profesional dan adaptif. Selaras

dengan kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi serta mendukung visi pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden, khususnya Cita ke-7 tentang penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan digital yang melayani dan bebas dari korupsi, strategi kelembagaan Kementerian pada periode 2025—2029 menekankan dua dimensi utama.

- a. Reformasi Birokrasi General, difokuskan untuk memperkuat internal birokrasi yang efisien, profesional, dan adaptif melalui: penyederhanaan struktur organisasi agar lebih ramping, efisien, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan pendidikan; Penguatan tata kelola internal yang berbasis sistem informasi terintegrasi dan pengambilan keputusan berbasis data; Manajemen SDM berbasis sistem merit, birokrasi. guna memastikan penempatan dan pengembangan pegawai sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi; Transformasi budaya kerja birokrasi, untuk mewujudkan organisasi yang kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.
- b. Reformasi Birokrasi Tematik, difokuskan untuk mendukung penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui optimalisasi peran birokrasi.

Penguatan reformasi birokrasi menjadi fondasi penting dalam membangun organisasi kementerian yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap tantangan pendidikan nasional. Transformasi kelembagaan yang terintegrasi dengan agenda reformasi birokrasi akan mempercepat terwujudnya birokrasi yang berdampak, tidak hanya pada level kebijakan, tetapi hingga pada tataran implementasi di sektor pendidikan. Dengan demikian, arah reformasi birokrasi Kementerian ke depan tidak semata ditujukan pada efisiensi tata kelola, namun juga pada peningkatan kemampuan organisasi untuk menghadirkan layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, merata, dan inklusif, dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam periode 2025—2029, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur menetapkan arah kebijakan strategis untuk memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan target utama meraih predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Upaya ini menjadi komitmen kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Untuk memastikan efektivitas strategi di atas, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur akan menempuh langkah-langkah implementatif sebagai berikut.

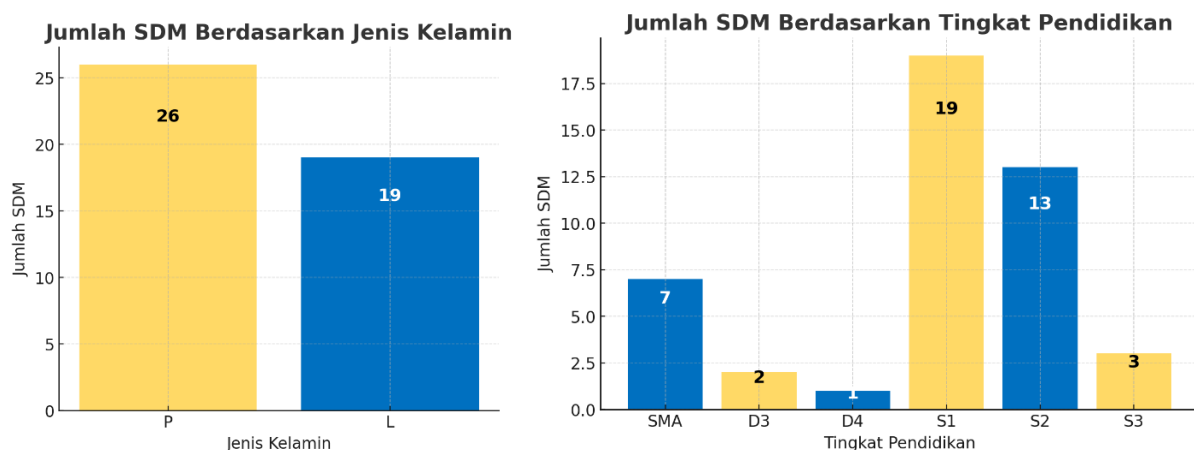
- a. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (RB–ZI) yang bertugas mengawal, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan program reformasi di seluruh bidang.

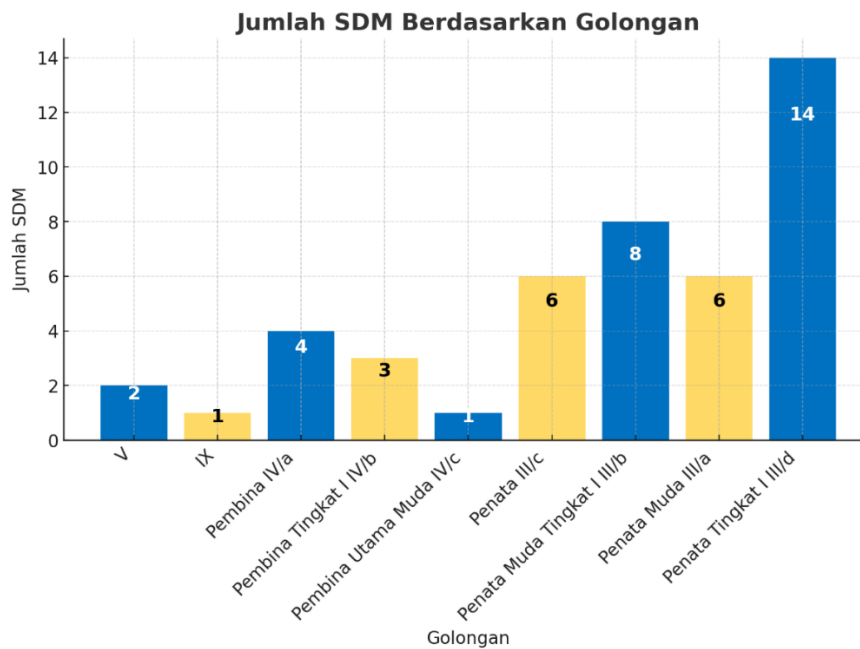
- b. Menetapkan *roadmap* dan indikator kinerja reformasi birokrasi yang terukur sesuai dengan area perubahan, meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi triwulanan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan ZI, serta menyusun laporan kinerja berbasis hasil (outcome).
- d. Mengembangkan inovasi pelayanan unggulan yang menjadi *best practice* dan dapat direplikasi oleh instansi lain.
- e. Mengoptimalkan dukungan pimpinan dan partisipasi seluruh pegawai dalam setiap tahapan pembangunan Zona Integritas agar tercipta budaya kerja yang partisipatif dan berorientasi hasil.

Dengan strategi dan langkah-langkah tersebut, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta meningkatkan kualitas layanan publik berbasis kinerja dan inovasi. Target pencapaian predikat WBBM pada periode 2025—2029 bukan hanya menjadi simbol keberhasilan reformasi birokrasi, tetapi juga bukti nyata transformasi budaya kerja menuju lembaga yang profesional, transparan, dan melayani dengan sepenuh hati.

3.4.3 Proyeksi Pengelolaan SDM

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. SDM yang saat ini dimiliki oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur adalah 45 orang dengan kategori sebagai berikut.





Grafik 3.1 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, dan Golongan

Untuk mewujudkan pengelolaan SDM yang berkualitas, adaptif, dan berdaya saing, pada periode 2025—2029, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur akan mengembangkan sistem pengelolaan SDM terpadu yang mampu memudahkan pegawai dalam memperoleh berbagai informasi kepegawaian, mulai dari proses rekrutmen, mutasi, kenaikan pangkat dan gaji berkala, peningkatan kompetensi, hingga pengelolaan masa purnatugas. Arah kebijakan pengelolaan SDM pada periode Renstra 2025—2029 difokuskan pada peningkatan kualitas, profesionalisme, serta penguatan sistem manajemen kinerja yang berorientasi hasil (*result-based performance*). Prioritas strategi pengelolaan SDM meliputi beberapa hal berikut.

a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai

- Penyusunan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) secara berkala.
- Pemenuhan formasi pegawai yang sesuai dengan kebutuhan prioritas organisasi.
- Penataan komposisi antara pejabat fungsional dan struktural agar lebih proporsional.

b. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pegawai

- Peningkatan kompetensi pejabat fungsional (Widyabasa, Penerjemah, dan JF Administratif) dan pejabat pelaksana (penelaah teknis kebijakan, pengolah data, dsb.)

c. Penguatan Sistem Karier dan Kesejahteraan

- Mekanisme promosi, mutasi, dan rotasi berbasis kompetensi dan kinerja.
- Skema penghargaan (*reward*) bagi pegawai berprestasi.

d. Pengelolaan Kinerja dan Produktivitas

- Implementasi SKP untuk memantau kinerja harian.

- Monitoring capaian kinerja individu yang terhubung langsung dengan kinerja organisasi.

e. Regenerasi dan Peningkatan Daya Saing

- Program kaderisasi untuk menyiapkan calon pemimpin masa depan.
- Strategi regenerasi SDM menjelang pensiun agar tidak terjadi *knowledge gap*.
- Penguatan budaya organisasi: integritas, profesionalisme, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil.

f. Penguatan Kompetensi Teknis Berbasis Digitalisasi dan Inovasi

- Pelatihan teknis sesuai bidang kerja dengan pemanfaatan *Learning Management System (LMS)*.
- Penerapan *blended learning* (tatap muka & daring) untuk menjangkau seluruh pegawai.

g. Peningkatan Kompetensi Administratif dan Tata Kelola Pemerintahan

- Program penguatan kompetensi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berbasis kinerja (SAKIP, MR, SPBE).
- Pelatihan pengelolaan administrasi kepegawaian, arsip digital, dan layanan publik.
- *Workshop* kepemimpinan, komunikasi organisasi, serta manajemen perubahan.

h. Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Kepemimpinan

- Diklat *leadership* untuk pejabat struktural dan fungsional.
- Peningkatan kemampuan pengambilan keputusan berbasis data.

i. Peningkatan Kompetensi Lintas Disiplin

- Diklat literasi digital dan keamanan siber.
- Pelatihan literasi bahasa asing.

j. Pembangunan Sistem Pengembangan Kompetensi Terintegrasi

- Penyusunan peta kebutuhan kompetensi.
- Implementasi Rencana Pengembangan Kompetensi untuk setiap pegawai.
- Integrasi data pelatihan dan kompetensi ke dalam sistem informasi kepegawaian terpadu.

Melalui pelaksanaan strategi tersebut, pengelolaan SDM Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu menciptakan SDM yang unggul, profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan, sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi organisasi dalam periode Renstra 2025—2029 secara optimal.

3.4.4 Proyeksi Peningkatan Tata Kelola Lembaga

Dalam periode Rencana Strategis (Renstra) 2025—2029, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur menetapkan arah kebijakan peningkatan tata kelola lembaga yang berorientasi pada terwujudnya organisasi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Peningkatan tata kelola diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, memperbaiki sistem manajemen, dan mengoptimalkan layanan publik berbasis digital agar mampu menjawab tantangan transformasi birokrasi di era modern. Proyeksi peningkatan tata kelola lembaga pada periode ini dilaksanakan melalui beberapa fokus strategi sebagai berikut.

- a. Penguatan Sistem Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi
 - Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan yang berbasis kinerja.
 - Optimalisasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan RB (Reformasi Birokrasi).
- b. Digitalisasi Layanan dan Administrasi
 - Pengembangan Sistem Informasi Terpadu untuk layanan internal (kepegawaian, keuangan, arsip digital).
 - Peningkatan layanan publik berbasis *e-government* dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
 - Pemanfaatan *big data* dan AI untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
- c. Transparansi, Akuntabilitas, dan Integritas
 - Peningkatan standar pelayanan publik yang jelas, cepat, dan terukur.
 - Penguatan budaya antikorupsi dan pengendalian gratifikasi.
 - Implementasi audit internal secara berkala untuk menjaga akuntabilitas keuangan dan program.
- d. Penguatan SDM Aparatur dalam Tata Kelola
 - Pelatihan manajemen organisasi, kepemimpinan, dan pengendalian risiko.
 - Penempatan pegawai sesuai kompetensi inti dan kebutuhan unit.
 - Penyiapan kaderisasi kompetensi untuk mendukung keberlanjutan tata kelola.
- e. Optimalisasi Kerja Sama dan Jejaring Kelembagaan
 - Peningkatan kolaborasi dengan lembaga pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, dan mitra strategis.
 - Keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam perumusan dan evaluasi kebijakan.

f. Efisiensi dan Inovasi Kelembagaan

- Penataan struktur organisasi agar lebih ramping, lincah, dan responsif.
- Peningkatan kualitas layanan internal dengan reviu berkala Standar Pelayanan.
- Penguatan budaya inovasi melalui kompetisi ide dan inovasi pegawai.

g. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Pendukung

- Modernisasi fasilitas kerja yang mendukung produktivitas dan kenyamanan pegawai.
- Peningkatan keamanan data dan sistem melalui *cyber security*.
- Pemanfaatan energi ramah lingkungan dan *green office* untuk mendukung keberlanjutan.

Melalui pelaksanaan proyeksi peningkatan tata kelola lembaga tersebut, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur bertekad mewujudkan organisasi yang bersih, profesional, dan inovatif, sekaligus mendukung tercapainya Reformasi Birokrasi Tematik yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat.

3.4.5 Proyeksi Pengembangan Inovasi Layanan Publik

Proyeksi pengembangan inovasi layanan publik pada periode Rencana Strategis 2025—2029 diarahkan untuk mewujudkan layanan yang mudah diakses, cepat, transparan, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Upaya ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, memperkuat akuntabilitas penyelenggara layanan, serta mendukung transformasi digital pemerintahan.

Adapun arah kebijakan dan prioritas strategis dalam pengembangan inovasi layanan publik selama periode 2025—2029 meliputi beberapa hal berikut.

a. Digitalisasi dan Otomatisasi Layanan

Pengembangan sistem layanan publik akan difokuskan pada penerapan teknologi digital secara terpadu melalui aplikasi berbasis web dan mobile. Proses pelayanan akan diotomatisasi dengan pemanfaatan *chatbot* dan asisten berbasis kecerdasan buatan (*AI assistant*) untuk mempercepat respon dan efisiensi kerja. Selain itu, dilakukan integrasi data lintas sektor agar proses verifikasi dan pelayanan publik menjadi lebih cepat dan akurat.

b. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terpadu

Implementasi SPBE menjadi pondasi utama pengembangan layanan publik modern. Berbagai jenis layanan akan disatukan dalam portal layanan terpadu (*one stop service*) yang mudah diakses masyarakat. Peningkatan data antarinstansi, pemanfaatan *cloud computing*, dan analisis

big data akan dioptimalkan untuk memperkuat pengambilan kebijakan publik yang berbasis bukti.

c. Peningkatan Aksesibilitas dan Inklusivitas Layanan

Layanan publik dikembangkan dengan prinsip inklusivitas agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak. Desain layanan akan dibuat ramah disabilitas dan ramah gender, disertai penyediaan layanan multibahasa (bahasa Indonesia, daerah, dan internasional). Selain itu, diterapkan unit layanan bergerak untuk menjangkau masyarakat di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) di Jawa Timur.

d. Layanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat

Masyarakat akan dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan publik. Diperkuat melalui *platform* aduan masyarakat yang beroperasi secara *real-time* dan transparan, serta dapat segera ditindaklanjuti. Partisipasi publik juga akan ditingkatkan melalui forum konsultasi publik dan survei kepuasan digital, guna memastikan layanan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

e. Inovasi Berkelanjutan dan Replikasi Praktik Baik

Kebijakan inovasi publik akan dikembangkan secara berkelanjutan dengan mendorong partisipasi pegawai dalam kompetisi inovasi layanan publik di tingkat nasional maupun daerah. Praktik-praktik terbaik dari hasil inovasi unggulan akan direplikasi ke instansi atau daerah lain, sehingga mendorong pemerataan kualitas layanan di seluruh wilayah.

f. Penguatan Keamanan Data dan Kepercayaan Publik

Seluruh kanal layanan publik akan dilengkapi dengan sistem keamanan siber untuk melindungi data masyarakat. Selain itu, masyarakat akan diberikan edukasi mengenai keamanan digital dan literasi data guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem layanan berbasis teknologi.

g. Layanan Publik Ramah Lingkungan (*Green Public Service*)

Sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, layanan publik akan diarahkan untuk lebih ramah lingkungan melalui pengurangan penggunaan kertas, pemanfaatan energi terbarukan, serta pengembangan layanan yang mendukung ekonomi hijau dan keberlanjutan lingkungan. Secara keseluruhan, proyeksi pengembangan inovasi layanan publik 2025—2029 ini diharapkan mampu memperkuat transformasi birokrasi menuju pemerintahan digital yang responsif, inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

3.4.6 Proyeksi Pemenuhan Sarana Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan secara optimal, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur menetapkan arah kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2025—2029 yang berfokus pada penyediaan fasilitas kerja yang modern, aman, ramah lingkungan, dan mendorong peningkatan produktivitas pegawai serta mutu layanan publik. Pemenuhan sarana dan prasarana diarahkan tidak hanya pada ketersediaan fisik, tetapi juga pada efisiensi penggunaan, pemanfaatan teknologi informasi, serta keberlanjutan lingkungan kerja.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana akan difokuskan pada beberapa prioritas utama berikut.

a. Modernisasi Sarana Kerja

- Penyediaan peralatan kerja berbasis digital yang menunjang kinerja (komputer, server, perangkat komunikasi, jaringan internet cepat).
- Penambahan perangkat konferensi daring (meeting room digital, *video conference system*).
- Pembaruan sarana kerja sesuai standar keamanan dan ergonomi.

b. Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

- Pembangunan pusat data (data center) yang aman dan terintegrasi.
- Penyediaan *cloud service* internal untuk mendukung SPBE.
- Penguatan jaringan intranet dan internet di seluruh unit kerja hingga daerah.

c. Pengembangan Fasilitas Layanan Publik

- Renovasi dan pembangunan gedung layanan publik yang ramah disabilitas, ramah gender, dan ramah anak.
- Penambahan *customer service center* dengan sistem antrian digital.
- Penyediaan *mobile service unit* untuk menjangkau masyarakat terpencil.

d. Optimalisasi Pemanfaatan Gedung dan Ruang Kerja

- Penataan ruang kerja berbasis konsep *smart office* (fleksibel, terbuka, kolaboratif).
- Pemanfaatan ruang arsip digital untuk mengurangi ketergantungan pada ruang fisik.
- Pemeliharaan gedung secara berkala dengan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

e. Penguatan Sarana Pendukung SDM dan Organisasi

- Penyediaan fasilitas pelatihan, laboratorium bahasa, dan pusat riset.
- Pengadaan sarana transportasi dinas yang memadai.

- Fasilitas kesehatan, olahraga, dan ruang laktasi untuk mendukung kesejahteraan pegawai.

f. Pemenuhan Sarana Ramah Lingkungan (*Green Office*)

- Penggunaan energi terbarukan (panel surya, hemat listrik, hemat air).
- Penyediaan ruang terbuka hijau dan konsep gedung ramah lingkungan.
- Digitalisasi dokumen untuk mengurangi penggunaan kertas (*paperless office*).

g. Sistem Pemeliharaan dan Monitoring Sarpras

- Penerapan *asset management system* berbasis digital.
- Pengawasan pemanfaatan sarpras dengan *dashboard monitoring*.
- Evaluasi kebutuhan sarpras tahunan agar sesuai dengan perkembangan organisasi.

Dengan pelaksanaan strategi tersebut, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur menargetkan terwujudnya lingkungan kerja yang modern, efisien, inklusif, dan berkelanjutan, yang mampu mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan secara optimal serta meningkatkan kualitas layanan publik pada periode Renstra 2025—2029.

BAB IV
TARGET KINERJA
DAN KERANGKA
PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur menetapkan sasaran- sasaran yang merupakan kondisi yang ingin dicapai dari pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan. Keberhasilan sasaran diukur dengan indikator-indikator kinerja tahun 2025—2029 sebagai berikut.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	%	64	68	72	76	80
		Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	%	24	30	36	42	48
2	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia	Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya	%	41	43	45	47	49
		Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	%	60	63	66	69	72
3	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan	Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	%	59,93	63,136	66,342	69,548	72,754
		Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya	%	50	55	60	65	70
4	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	%	11,55	23,1	34,66	46,21	57,76
5	Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	%	6,4	17,6	17,9	18,5	18,8
		Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Rasio	1:18	1:20	1:22	1:25	1:30
6	Meningkatnya fasilitas terhadap lembaga penyelenggara program BIPA	Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	%	50	55,5	56	56,5	57
7	Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	Nilai	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	Predikat	A	A	A	A	A

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka menjalankan amanat pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, diperlukan kerangka pendanaan yang memadai. Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan pendanaan fungsi pendidikan serta program dan kegiatan prioritas. Berkaitan dengan hal itu, kerangka pendanaan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur tahun 2025—2029 disusun sebagai berikut.

Kode	Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribuan)				
		2025	2026	2027	2028	2029
DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran					
7569	Peningkatan Kecakapan Literasi	4.187.564	2.287.103	2.470.071	2.692.500	2.961.750
DU	Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan					
7566	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	2.335.650	1.729.828	1.902.810	2.093.091	2.302.400
7567	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia	258.747	2.805.642	3.058.150	3.363.965	3.700.360
7568	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia	234.909	84.896	151.500	169.680	186.648
WA	Program Dukungan Manajemen					
7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	6.777.485	7.802.785	8.022.900	8.664.700	9.444.523



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025—2029 ini merupakan gambaran dari kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam bidang kebahasaan dan kesastraan. Dokumen rencana strategis ini disusun mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2025—2029 sesuai Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2025. Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, dan strategi pencapaiannya, serta indikator kinerja. Indikator kinerja yang dirumuskan dilengkapi dengan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada tahun 2025–2029. Visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang dirumuskan dalam rencana strategis bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan strategis yang telah ditetapkan di tingkat Eselon-1 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Rencana strategis yang telah ditetapkan juga digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta perjanjian kinerja di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Setiap target kinerja dimonitor pencapaiannya secara berkala pada setiap tahun. Capaian kinerja tersebut dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakin) Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya.

Dalam implementasinya, rencana strategis ini digunakan sebagai pedoman dan arah pelaksanaan program dan kegiatan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Selain itu, dokumen ini dapat pula dijadikan pedoman oleh pemangku kepentingan kebahasaan dan kesastraan, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun masyarakat. Dengan demikian, berbagai pihak dapat terlibat secara aktif, efektif, dan konstruktif dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra. Guna meningkatkan kinerja program dan kegiatan, semua pihak dapat memberikan kritik, evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi nyata. Dengan melibatkan publik secara lebih aktif dan terintegrasi, diharapkan kualitas pengelolaan bahasa dan sastra semakin meningkat sehingga dapat berkontribusi positif dalam menjaga kebinekaan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Diharapkan dengan disusunnya rencana strategis Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur 2025—2029 ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Provinsi Jawa Timur dan peningkatan kinerja satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

The background is a solid blue color. In the top-left corner, there is a cluster of overlapping yellow and blue shapes, including circles and leaf-like forms. In the bottom-right corner, there is another cluster of similar shapes, including a yellow square with a blue leaf pattern, a blue circle with a yellow center, and various yellow and blue leaf and circular shapes.

LAMPIRAN

**CASCADING BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TAHUN 2025--2029**

SS	IKSS	SP	IKP	SK	IKK	KRO	RO	Koordinator	Penanggung Jawab	Penanggung Jawab di UPT
Meningkatnya Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	Persentase Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional: a. Literasi Membaca	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran, Kompetensi, dan Karakter pada Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan yang Peserta Didiknya Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Data dan Informasi Publik	Produk Pengayaan Pendukung Literasi	Pusbin	Pusbin	-
						Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik Terbina Program Literasi Kebahasaan	Pusbin	UPT	Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Sastra
						Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	Satuan Pendidikan Terfasilitasi Layanan Pembinaan Bahasa	Pusbin	UPT	Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Sastra
					Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Data dan Informasi Publik	Karya Sastra yang Dialih-Wahanakan	Pusdaya	Pusdaya	-
						Data dan Informasi Publik	Produk Kamus dan Pedoman Kebahasaan bagi Pelajar	Pusbanglin	Pusbanglin	-
						Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Produk Penerjemahan	Pusbanglin	Pusbanglin dan UPT	Tim Kerja Pengembangan Bahasa dan Sastra
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan	Indeks Pembangunan Kebahasaan	Meningkatnya Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia	Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia	Persentase Penutur Teruji yang Sesuai dengan Predikat Kemahiran Berbahasa Profesinya	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Data dan Informasi Publik	Penutur Bahasa Teruji Instrumen Kemahiran Bahasa Indonesia	Pusbin	Pusbin dan UPT Pusbin	Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Sastra -
					Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	Konferensi dan Event	Perhelatan Karya Kreatif Pembinaan Bahasa dan Sastra	Pusbin	Pusbin dan UPT	Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Sastra
						Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Penutur Bahasa Terbina	Pusbin	UPT	Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Sastra
						Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Generasi Muda Terbina Program Literasi	Pusbin	Pusbin dan UPT	Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Sastra
					Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Pengunaan Bahasanya	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan	Pusbin	UPT	Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Sastra
			Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan	Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Komunitas Penggerak Literasi Terbina	Pusbin	UPT	Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Sastra
						Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Komunitas Literasi yang Difasilitasi dan Diapresiasi	Pusbin	Pusbin	-
						Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Komunitas Sastra yang Difasilitasi dan Diapresiasi	Pusbin	Pusbin	-
			Angka Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Data dan Informasi Publik	Korpus Kebahasaan yang Dikembangkan	Pusbanglin	Pusbanglin dan UPT	Tim Kerja Pelindungan Bahasa dan Sastra
						Data dan Informasi Publik	Produk Kodifikasi dan Pembakuan Bahasa	Pusbanglin	Pusbanglin dan UPT	Tim Kerja Pengembangan Bahasa dan Sastra

					Persentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan Aksara yang Terverifikasi dalam Peta Kebinekaan	Data dan Informasi Publik	Peta Kebinekaan Bahasa dan Sastra	Pusbanglin	UPT	Tim Kerja Pelindungan Bahasa dan Sastra
	Indeks Pelestarian Bahasa Daerah		Indeks Pelestarian Bahasa Daerah	Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Pelestari Bahasa dan Sastra Daerah yang Difasilitasi dan Diapresiasi (Komunitas dan Daerah)	Pusbanglin	Pusbanglin	-
						Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Penutur Bahasa Daerah Terfasilitasi Program Pelindungan Bahasa Daerah	Pusbanglin	UPT	Tim Kerja Pelindungan Bahasa dan Sastra
						Konferensi dan Event	Perhelatan Karya Kreatif Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	Pusbanglin	Pusbanglin dan UPT	Tim Kerja Pelindungan Bahasa dan Sastra
	Indeks Penginternasionalisasi Bahasa Indonesia	Persentase Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang Memenuhi Standar Kompetensi Lulusan		Meningkatnya Fasilitas Terhadap Lembaga Penyelenggara Program BIPA	Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Luar Negeri)	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Lembaga Terfasilitasi Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	Pusdaya	Pusdaya dan UPT	Tim Kerja Pengembangan Bahasa dan Sastra
					Konferensi dan Event	Perhelatan Karya Kreatif Diplomasi Kebahasaan	Pusdaya	Pusdaya	-	
					Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indoneisa bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	Bahan fasilitasi pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	Pusdaya	Pusdaya	-	
		Persentase Lembaga Internasional yang Memanfaatkan Program Diplomasi Kebahasaan dan Kesastraan		Meningkatnya Pemanfaatan Program Diplomasi Kebahasaan dan Kesastraan di Lembaga Internasional	Persentase Bahan Kebahasaan dan Kesastraan yang Dimanfaatkan di Forum Internasional	Data dan Informasi Publik	Fasilitasi Penerjemahan Naskah Resmi UNESCO	Pusdaya	Pusdaya	-
						Data dan Informasi Publik	Fasilitasi Penjurubahasaan di Lembaga Multilateral	Pusdaya	Pusdaya	-
						Data dan Informasi Publik	Fasilitasi Penerjemahan dan Penjurubahasaan	Pusdaya	Pusdaya	-
						Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Sastrawan Berkarya di Mancanegara	Pusdaya	Pusdaya	-
Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel				Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	Sekretariat	Seluruh satker	Tim Kerja Subbagian Umum
	Layanan Dukungan Manajemen Internal					Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Sekretariat	Sekretariat	-	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal					Layanan Protokol	Sekretariat	Sekretariat	-	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal					Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Sekretariat	Sekretariat	-	

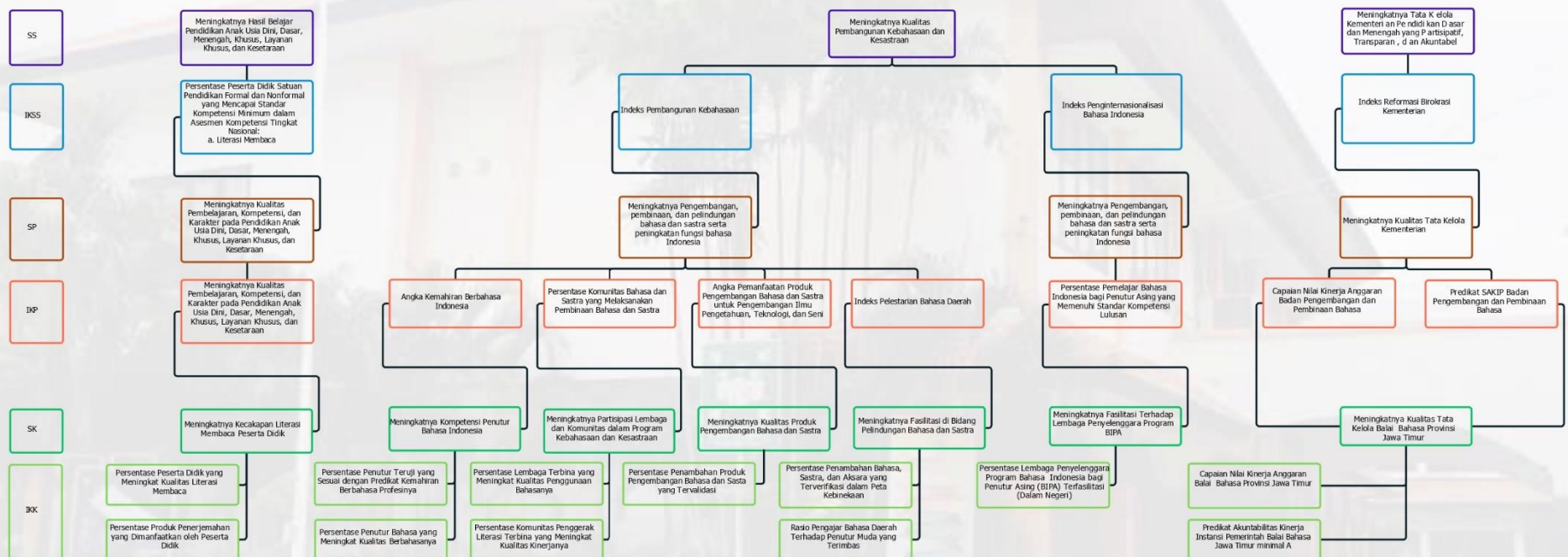
	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur		Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	Sekretariat	Seluruh satker	Tim Kerja Subbagian Umum
						Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Data dan Informasi	Sekretariat	Sekretariat	-
						Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Sekretariat	Seluruh Satker	Tim Kerja Subbagian Umum
						Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	Sekretariat	Seluruh Satker	Tim Kerja Subbagian Umum
						Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Prasarana Internal	Sekretariat	Sekretariat	-
						Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	Sekretariat	Sekretariat	-
		Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa		Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur minimal A		Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Sekretariat	Sekretariat	-
						Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Sekretariat	Sekretariat	-
						Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Manajemen Keuangan	Sekretariat	Sekretariat	-
						Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Reformasi Kinerja	Sekretariat	Seluruh Satker	Seluruh Tim Kerja
						Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Sekretariat	Seluruh Satker	Tim Kerja Subbagian Umum


 Kepala
 Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.



Kemendikdasmen
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR

POHON KINERJA



Mengetahui,
Kepala,

Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.

DEFINISI OPERASIONAL RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, DASAR, DAN MENENGAH
TAHUN 2025—2029

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis



Indeks Pembangunan Kebahasaan

Program	:	Pembangunan kebahasaan dan kesastraan
SS	:	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
IKSS	:	Indeks Pembangunan Kebahasaan
Definisi	:	Indeks Pembangunan Kebahasaan merupakan ukuran komposit yang memberikan gambaran objektif dan komprehensif terhadap pembangunan kebahasaan dan kesastraan pada tingkat pusat dan daerah. Dasar hukum Indeks Pembangunan Kebahasaan: UUD 1945 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik; Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia. Indeks Pembangunan Kebahasaan terdiri dari tiga Dimensi yaitu Pembinaan, Pelindungan dan Pengembangan. Dimensi Pembinaan merupakan gambaran aspek pembangunan kebahasaan yang mencerminkan upaya peningkatan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran, keteladanan, dan pemasyarakatan bahasa dan sastra, baik dalam lingkungan Pendidikan maupun kehidupan sosial masyarakat. Dimensi ini terdiri dari 3 indikator yaitu Angka Kemahiran bahasa Indonesia, Persentase komunitas bahasa dan sastra

	yang melaksanakan pembinaan bahasa dan sastra, dan persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang membaca buku cerita Dimensi perlindungan merupakan gambaran aspek pembangunan kebahasaan yang mencerminkan upaya pemertahanan bahasa daerah dilakukan secara berkelanjutan oleh individu, komunitas, dan pemerintah daerah melalui transmisi antargenerasi, penggunaan aktif dalam lingkungan sosial, serta dukungan kebijakan yang memfasilitasi eksistensi dan kelangsungan bahasa dan sastra. Dimensi ini terdiri dari Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mempelajari bahasa daerah sebagai bahasa pertamanya, penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat, dan persentase kab/kota yang memberikan dukungan formal terhadap kegiatan kebahasaan dan kesastraan. Dimensi Pengembangan: merupakan gambaran aspek pembangunan kebahasaan dan kesastraan yang mencerminkan hasil pengembangan produk kebahasaan dan kesastraan yang dimanfaatkan, disebarluaskan, dan diintegrasikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dimensi ini terdiri dari 3 indikator, yaitu Angka pemanfaatan produk pengembangan bahasa dan sastra untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, Persentase karya ilmiah dan populer kebahasaan dan kesastraan yang terpublikasi, dan persentase pertumbuhan karya sastra yang terpublikasi ke masyarakat. Tahapan penyusunan Indeks Pembangunan Kebahasaan terdiri atas: (1) pengumpulan dan pengolahan data; (2) penghitungan skor; (3) interpretasi dan penyajian hasil; dan (4) evaluasi dan validasi
--	--

Metode Penghitungan	: Penghitungan dilakukan melalui beberapa tahapan. 1. Pengolahan data melalui: - penentuan nilai indikator; dilakukan dengan menggunakan ketersediaan data primer dan data sekunder. - normalisasi nilai indikator; dilakukan untuk menstandarisasi agar setiap indikator memiliki satuan, arah, dan rentang yang sama - penghitungan indeks dimensi; dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai indikator pembentuk setiap dimensi, dengan rumus: Indeks Per Dimensi Menghitung indeks untuk tiap Dimensi dengan bobot tiap indikator sama $Indeks Dimensi_j = \left(\frac{SX_1 + \dots + SX_n}{n_j} \right) \times 100$ dimana n adalah banyaknya indikator di tiap dimensi 2. Penghitungan skor dilakukan melalui: - pembobotan masing-masing dimensi; bertujuan untuk mengukur tingkat kepentingan suatu dimensi secara relatif terhadap dimensi lain. Pembobotan menggunakan nilai yang berbeda antardimensi yang ditentukan berdasarkan metode statistik dan pendapat para ahli Pembobotan untuk masing masing dimensi sebagai berikut: Dimensi Pembinaan 0,4 Dimensi Pelindungan 0,35 Dimensi Pengembangan 0,25 - penghitungan indeks total; dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai indeks dimensi dengan menggunakan pembobotan setiap dimensi
----------------------------	--

		Menghitung Indeks dengan bobot tiap dimensi berbeda $I = (W_1 * Indeks D_1) + \dots + (W_j * Indeks D_j)$ dimana W_j adalah nilai bobot dimensi ke-j
Satuan	:	Indeks
Tipe Penghitungan	:	Tahunan
Unit Pelaksana	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Badan Bahasa, Badan Pusat Statistik, BRIN, Pemerintah Daerah
Variabel data	:	Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia, Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra, Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke atas yang Membaca Buku Cerita, Persentase Penduduk Usia Pendidikan Dasar yang Mempelajari Bahasa Daerah sebagai Bahasa Pertama, Persentase Penduduk Usia Remaja yang Menggunakan Bahasa Daerah di Lingkungan Tetangga dan Masyarakat, Persentase Kab/Kota yang Memberikan Dukungan Formal terhadap Kegiatan Kebahasaan dan Kesastraan, Angka Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan seni, Persentase Karya Ilmiah dan Populer Kebahasaan dan Kesastraan yang Terpublikasi, Persentase Pertumbuhan Karya Sastra yang Terpublikasi ke Masyarakat.
Instansi Penghasil Data	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal

Interpretasi		Semakin tinggi nilai Indeks Pembangunan Kebahasaan menunjukkan bahwa pembangunan kebahasaan di Indonesia semakin baik secara nasional melalui peningkatan pada setiap variabel indeks di setiap provinsi.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	Ya
Level Estimasi	:	Nasional dan Provinsi
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Tidak
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Definisi Operasional
IKSS Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia (IPBI)

Program	: Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SS	: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
IKSS	: Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia (IPBI)
Definisi	: IPBI adalah indikator komposit yang dirancang untuk mengukur tingkat internasionalisasi (eksistensi, penetrasi, pengakuan, peran, dan pengaruh) bahasa Indonesia di kancah internasional. IPBI didukung lima dimensi pengukuran, yaitu (1) sebaran penutur, (2) akses diplomasi, (3) pendidikan bahasa, (4) media digital, dan (5) khazanah bahasa, budaya, dan keilmuan. Setiap dimensi meliputi variabel sebagai berikut: 1. dimensi sebaran penutur terdiri atas variabel penutur asing dan negara; 2. dimensi akses diplomasi terdiri atas variabel status resmi internasional serta juru bahasa dan penerjemah; 3. dimensi pendidikan bahasa terdiri atas variabel institusi penyelenggara, tenaga pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing, dan kurikulum bahasa Indonesia sebagai bahasa asing; 4. dimensi media digital terdiri atas variabel konten daring global serta prasarana dan sarana teknologi digital; serta 5. dimensi khazanah bahasa, budaya, dan keilmuan terdiri atas variabel karya kreatif bahasa dan budaya serta publikasi ilmiah.
Metode Penghitungan	: IPBI dihasilkan melalui langkah-langkah penghitungan, yakni (1) identifikasi indikator, (2) pengumpulan data setiap indikator, (3) normalisasi data, (4) penentuan bobot per dimensi, (5) penghitungan indeks per dimensi, dan (6) penghitungan indeks gabungan. Rumus IPBI: $IPBI = \sum_{i=1}^5 B_i D_i$ atau $IPBI = \sum_{i=1}^5 (B_i \times D_i)$ Keterangan rumus: B_i: Bobot dimensi ke-i D_i: Nilai dimensi ke-i

Rumus Nilai Dimensi 1—Dimensi 5:

$$D_i = \left[\left(\sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^n \frac{V_{ij} - V_{ij \min}}{V_{ij \max} - V_{ij \min}} \times 100 \right) \times 100 \right] / n$$

Keterangan rumus:

n: Banyaknya variabel

V_{ij} : Nilai variabel ke-j pada dimensi ke-i

$V_{ij \min}$: Nilai minimum variabel ke-j pada dimensi ke-i

$V_{ij \max}$: Nilai maksimum variabel ke-j pada dimensi ke-i

Keterangan bobot:

D1: Dimensi sebaran penutur (bobot 35%)

D2: Dimensi akses diplomasi (bobot 15%)

D3: Dimensi pendidikan bahasa (bobot 30%)

D4: Dimensi media digital (bobot 10%)

D5: Dimensi khazanah bahasa, budaya, dan keilmuan (10%)

Satuan	: Indeks
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Sumber Data	: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra); Kementerian Luar Negeri; Kementerian Hukum; perguruan tinggi di dalam dan luar negeri; organisasi profesi (APPBIPA, HPI, AICI, PLJ); platform global (Statista, W3Techs, Worldcat, IMDb, DOAJ, GlobalStats Statcounter, Google Play Store, App Store); kamus (KBBI dan Oxford English Dictionary)
Variabel data	: Data pemelajar BIPA, data negara dengan pemelajar aktif BIPA, data organisasi kerja sama multilateral, data penerjemah dan juru bahasa, data pengajar BIPA, data lembaga penyelenggara program BIPA, data negara dengan lembaga pendidikan yang menerapkan kurikulum bahasa Indonesia, data persentil global konten web berbahasa Indonesia yang terakses secara global, data platform inti digital global, data aplikasi populer penyedia pembelajaran bahasa, data buku pada platform WorldCat, data film pada platform IMDb, data entri kamus Oxford English Dictionary, data entri Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data jurnal dan artikel ilmiah pada platform Directory of Open Access Journal (DOAJ)
Instansi Penghasil Data	: Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Polarisasi Indikator : Polarisasi maksimal

Interpretasi : Makin tinggi angka IPBI menunjukkan makin tingginya tingkat internasionalisasi bahasa Indonesia. Angka IPBI dirancang untuk dapat menunjukkan tingkat internasionalisasi bahasa Indonesia, yang berkaitan dengan tingkat eksistensi, penetrasi, pengakuan, fungsi, dan pengaruh bahasa Indonesia dalam pemanfaatannya di berbagai kawasan dunia dan pada berbagai konteks global. Interpretasi tingkat internasionalisasi bahasa Indonesia dirumuskan dengan kategori sebagai berikut.

Angka Indeks	Kategori	Interpretasi
≥80	Berdaya (<i>Globally Rising</i>)	Angka indeks pada kategori ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki status, fungsi, dan pengaruh yang kuat sebagai bahasa penghubung antarbangsa dan antarnegara yang digunakan di sebagian besar hingga seluruh kawasan dunia serta dalam ranah pemanfaatan pada sebagian besar hingga semua konteks global, baik umum maupun khusus.
60–79	Berpengaruh (<i>Regionally Influential</i>)	Angka indeks pada kategori ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki status, fungsi, dan pengaruh yang memadai sebagai bahasa penghubung antarbangsa dan antarnegara yang digunakan di sejumlah lingkup kawasan regional dan antarkawasan serta dalam ranah pemanfaatan pada konteks global yang tidak hanya umum, tetapi juga lebih khusus.
40–59	Berkembang (<i>Developing</i>)	Angka indeks pada tingkat ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk mengembangkan status dan fungsinya sebagai bahasa penghubung antarbangsa yang digunakan di kawasan yang lebih luas serta dalam ranah pemanfaatan pada sejumlah konteks global yang umum.
<40	Bertumbuh (<i>Emerging</i>)	Angka indeks pada tingkat ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memasuki masa awal pembangunan fondasi untuk merancang dan merintis berbagai upaya peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional

			secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.
Periode Pengumpulan Data	:	Setiap tahun	
Publikasi Ketersediaan Indikator	:	Laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Data Pokok Kebahasaan, portal BIPA Daring	
Level Estimasi	:	Nasional	
Klasifikasi	:	Tidak ada	
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum?	:	Ya	
Frekuensi Penyajian Data	:	Setiap tahun	

IKP Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia

Program	:	Pembangunan kebahasaan dan kesastraan
SS	:	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
IKSS	:	Indeks Pembangunan Kebahasaan
SP	:	Meningkatnya Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia
IKP	:	Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia
Definisi	:	Angka kemahiran berbahasa Indonesia merupakan indikator yang menunjukkan pencapaian kemahiran penutur bahasa Indonesia dalam memperoleh, mengolah, dan menyajikan informasi secara lisan dan tulis dalam ranah kehidupan personal, sosial, vokasional, dan akademik. Selain itu, indikator ini juga dapat menjadi cerminan sikap positif dan rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap bahasa Indonesia serta peningkatan kemahiran berbahasanya. Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia menunjukkan agregasi rata-rata perbandingan antara skor Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) penutur lintas profesi dan skor acuan tertingginya. Kemahiran berbahasa Indonesia yang dimaksud di sini adalah tingkat penguasaan pengetahuan dan keterampilan memahami bacaan dan dengarannya serta kemampuan dalam berbicara dan menulis yang telah dicapai seseorang. DASAR HUKUM: Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia dan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia

	TUJUAN: meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia warga negara Indonesia serta memupuk sikap positif dan rasa bangga penutur terhadap bahasa Indonesia. RUANG LINGKUP: Seluruh warga negara Indonesia yang mengikuti UKBI
Metode Penghitungan	: Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia (AKBI) adalah angka yang menggambarkan kemahiran berbahasa Indonesia masyarakat dalam skala nasional, yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata skor UKBI per profesi di setiap provinsi dan dibandingkan dengan acuan skor tertinggi dalam standar kemahiran berbahasa Indonesia. Karakteristik peuji dicari dengan formula yang memuat unsur (1) Jumlah peserta uji di setiap provinsi, (2) jumlah profesi dan nama profesi di setiap provinsi, (3) Jumlah skor peserta uji di setiap provinsi, (3) Rerata skor peserta uji di setiap provinsi, (4) Skor acuan tertinggi dalam standar kemahiran berbahasa Indonesia, dan (5) Angka kemahiran provinsi. Skor acuan tertinggi merupakan skor kemahiran berbahasa Indonesia yang dianggap standar berdasarkan hasil konvensi yang terdapat dalam Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016. Skor acuan tertinggi tersebut merupakan target skor yang diharapkan dapat diraih oleh penutur bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristiknya. Formula Penghitungan Indeks : Tahapan dalam menghitung: a. Identifikasi jumlah dan nama profesi dalam setiap

	provinsi b. Jumlahkan skor UKBI Adaptif setiap profesi dalam setiap provinsi. c. Buat rata-rata skor profesi dalam setiap provinsi. d. Bandingkan rata-rata skor profesi dalam setiap provinsi dengan skor acuan tertinggi dalam peraturan menteri tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia untuk membuat angka kemahiran provinsi. e. Jumlahkan angka kemahiran berbahasa Indonesia provinsi dan buat rata-rata berdasarkan jumlah tersebut untuk menghasilkan angka kemahiran berbahasa Indonesia.. Formula Penghitungan Indeks $AKBI = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n \frac{SKi}{ASKi} \times 100$ Keterangan : AKBI: Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia N: banyaknya profesi n: jumlah peuji SKi: skor kemahiran profesi ASKi: acuan skor kemahiran profesi
Satuan	: Indeks
Tipe Penghitungan	: Tahunan
Unit Pelaksana	: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	: Pangkalan data UKBI Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Variabel data	: 1. Rerata nilai UKBI profesi dalam provinsi. 2. Skor acuan tertinggi berdasarkan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016. 3. Angka kemahiran berbahasa setiap provinsi

Instansi Penghasil Data	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi		Makin tinggi nilai angka kemahiran berbahasa Indonesia maka tingkat kemahiran berbahasa Indonesia makin meningkat di setiap provinsi.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	Ya
Level Estimasi	:	Nasional dan Provinsi
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

IKP Angka Pemanfaatan Produk Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni

Program	:	Pembangunan kebahasaan dan kesastraan
SS	:	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
IKSS	:	Indeks Pembangunan Kebahasaan
SP	:	Meningkatnya Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia
IKP	:	Angka Pemanfaatan Produk Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni
Definisi	:	Angka pemanfaatan produk pengembangan bahasa dan sastra merupakan nilai yang memperlihatkan jumlah kumulatif pemanfaat produk pengembangan bahasa dan sastra dari kalangan masyarakat penutur bahasa di satu wilayah provinsi Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. 3. Permendikbud Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi. Tujuan: Memastikan sejauh mana produk bahasa dan sastra bermanfaat di masyarakat dan memberikan dampak positif bagi kepentingan yang lebih luas. Ruang Lingkup: Produk Pengembangan bahasa dan sastra berupa berbagai acuan kebahasaan dan kesastraan.
Metode Penghitungan	:	$MPBS = \sum_{i=1}^n MPBS_i$ Keterangan: MPBS: Angka Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

		merupakan akumulasi pemanfaatan produk pengembangan bahasa dan sastra dalam satu tahun $MPBS_i$: pemanfaatan produk ke-i (misalnya, kamus, glosarium, dan istilah) n: banyaknya jenis produk pengembangan bahasa dan sastra yang dihitung
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Tahunan
Unit Pelaksana	:	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Variabel data	:	1. Jumlah pemanfaat produk pengembangan bahasa dan sastra untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, 2. Penduduk usia 10 Tahun ke atas
Instansi Penghasil Data	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi		Semakin tinggi angka pemanfaatan produk bahasa dan sastra untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni maka semakin banyak produk kebahasaan yang digunakan dalam dunia akademik, teknologi, dan seni, dan berdampak positif terhadap perkembangan intelektual dan kreativitas masyarakat
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Publikasi ketersediaan indikator	:	Ya
Level Estimasi	:	Nasional dan Provinsi
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Definisi Operasional: Indeks Pelestarian Bahasa Daerah

Program	:	Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SS/SP/SK	:	Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Kebahasaan dan Kesastraan
IKSS/IKP	:	Indeks Pelestarian Bahasa Daerah (IPBD)
Definisi	:	Indeks yang menggambarkan upaya dalam menjaga, melindungi, dan menghidupkan kembali bahasa daerah agar tetap digunakan dan tidak punah. IPBD digambarkan dalam tiga dimensi, yaitu dimensi kebinekaan, dimensi pewarisan, dan dimensi partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat. Setiap dimensi terdiri atas sejumlah variabel berikut ini. (1) Dimensi kebinekaan, meliputi (a) persentase penambahan dokumentasi (konservasi) bahasa dan sastra daerah, dan (b) persentase bahasa/dialek yang direvitalisasi; (c) persentase penambahan jumlah bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan. (2) Dimensi pewarisan, meliputi rasio pengajar bahasa daerah terhadap penutur muda yang terimbas. (3) Dimensi partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat, meliputi (a) persentase layanan/fasilitas program perlindungan bahasa dan sastra kepada pemerintah daerah, dan (b) persentase layanan/fasilitas program perlindungan bahasa dan sastra kepada masyarakat.
Metode Penghitungan	:	Untuk menghasilkan IPBD dilakukan langkah perhitungan sebagai berikut. (1) standardisasi data; (2) penghitungan indeks per dimensi; dan (3) penetapan indeks keseluruhan. Adapun rumus perhitungan setiap variabel dan akumulatif dalam IPBD dapat digambarkan berikut ini. Indeks kebinekaan dengan rata-rata geometri: $Indeks\ Kebinekaan = \sqrt[3]{b_1 \times b_2 \times b_3}$ Indeks pewarisan: $Indeks\ pewarisan = w$ Indeks partisipasi dengan rata-rata geometrik: $Indeks\ Partisipasi = \sqrt{p_1 \times p_2}$ IPBD dengan rata-rata tertimbang indeks kebinekaan, pewarisan, dan partisipasi $IPBD = (0.3 * indeks\ kebinekaan) + (0.5 * indeks\ pewarisan) + (0.2 * indeks\ partisipasi)$ Keterangan: Bobot dimensi kebinekaan sebesar 30% Bobot indeks pewarisan sebesar 50% Bobot indeks partisipasi sebesar 20%

Satuan	:	Indeks
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Balai/Kantor Bahasa
Sumber Data	:	Data Pokok Kebahasaan, Peta Bahasa, Registrasi Bahasa dan Sastra
Variabel data	:	Data bahasa dan sastra terdokumentasi, data bahasa, sastra, dan aksara yang diverifikasi; data bahasa dan sastra yang direvitalisasi; data guru master; data peserta didik hasil pengimbasan; data layanan perlindungan bahasa dan sastra kepada pemerintah daerah dan masyarakat
Instansi Penghasil Data	:	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
Polarisasi Indikator	:	Makin tinggi indeks IPBD, makin baik kondisi pelestarian bahasa daerah yang dilakukan. Indeks tersebut sangat penting sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan mengukur dampak program pelestarian bahasa daerah yang sudah berjalan, baik intervensi oleh pemerintah pusat melalui Badan Bahasa, maupun pemerintah daerah. IPBD tidak hanya terletak pada angka-angka statistiknya, tetapi juga pada perannya sebagai alat pelindung identitas bangsa, pelestari bahasa, dan penggerak kesadaran masyarakat. Melalui angka-angka statistik indeks tersebut, memantik kesadaran publik terhadap kondisi nyata bahasa daerah, peran serta para pihak dalam pelindungannya. terutama pihak pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pelestarian bahasa daerah ke depan. Peran dari komunitas, perseorangan, dan juga lembaga tentu tidak dinafikan dalam mendukung upaya perlindungan tersebut. Tanpa adanya pengukuran yang terstruktur seperti IPBD, upaya pelestarian bahasa daerah akan sulit terukur. IPBD yang dipublikasikan secara terbuka bisa menjadi alat kampanye kesadaran akan pentingnya bahasa daerah. Masyarakat yang melihat penurunan skor pada bahasanya sendiri bisa terdorong untuk lebih aktif menggunakan dan melestarikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Interpretasi		Makin tinggi indeks, makin tinggi upaya nyata pelestarian bahasa daerah yang dilakukan. Interpretasi terhadap IPBD dapat

digambarkan dalam rentang angka dan kategori pada tabel berikut.

Rentang Indeks	Kategori	Intepretasi
0—20	Sangat rendah	Upaya pelestarian belum berjalan semestinya, hampir tidak ada upaya perlindungan terhadap bahasa daerah.
21—40	Rendah	Beberapa inisiatif upaya perlindungan telah muncul, tetapi cakupannya sangat terbatas.
41—60	Cukup	Terdapat upaya nyata dalam perlindungan bahasa daerah
61—80	Tinggi	Program perlindungan sudah berjalan cukup baik.
81—100	Sangat tinggi	Seluruh elemen pelestarian aktif: revitalisasi berjalan, konservasi kuat, pemetaan lengkap, fasilitasi optimal, dan tenaga pengajar serta siswa sangat memadai.

Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	Data Pokok Kebahasaan, Peta Bahasa, Registrasi Bahasa dan Sastra
Level Estimasi	:	Nasional dan Provinsi
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Setiap tahun

Definisi Operasional
IKP Persentase Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing
yang Terfasilitasi Standar Kompetensi Lulusan

Program	: Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SS/SP	: SS: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan SP: Meningkatnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
IKSS/IKP	: IKSS: Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia (IPBI) IKP: Persentase Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang Terfasilitasi Standar Kompetensi Lulusan
Definisi	: Persentase pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing yang terfasilitasi standar kompetensi lulusan adalah angka persen yang menunjukkan perbandingan jumlah pemelajar BIPA yang terfasilitasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2017 dengan jumlah total pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing yang teridentifikasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Metode Penghitungan	: Jumlah pemelajar BIPA yang terfasilitasi standar kompetensi lulusan (SKL) BIPA dibagi jumlah total pemelajar BIPA yang teridentifikasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan dikali angka 100 dalam satuan persen (%) Rumus penghitungan indikator: $PP = \frac{p}{n} \times 100 (\%)$ Keterangan: PP: Persentase pemelajar BIPA yang terfasilitasi SKL p: Jumlah pemelajar BIPA yang terfasilitasi SKL BIPA tahun berjalan n: Jumlah total pemelajar BIPA yang teridentifikasi tahun berjalan
Satuan	: Persen
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Sumber Data	: BIPA Daring (bipa.kemendikdasmen.go.id), Dapobas Badan Bahasa
Variabel data	: Data pemelajar BIPA yang terfasilitasi standar kompetensi lulusan (SKL) BIPA; data pemelajar BIPA yang teridentifikasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Instansi Penghasil Data	: Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Polarisasi Indikator	: Polarisasi maksimal
Interpretasi	: Makin tinggi persentase pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing yang terfasilitasi standar kompetensi lulusan BIPA menunjukkan makin banyaknya penutur asing yang mampu berbahasa Indonesia sebagai hasil pembelajaran BIPA yang berkualitas dan terstandar yang dapat berdampak pada makin luasnya sebaran wilayah penutur asing yang mampu berbahasa Indonesia sehingga dapat mendorong meningkatnya fungsi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional.
Periode Pengumpulan Data	: Setiap tahun
Publikasi Ketersediaan Indikator	: Laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Data Pokok Kebahasaan, portal BIPA Daring
Level Estimasi	: Nasional
Klasifikasi	: Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum?	: Ya
Frekuensi Penyajian Data	: Setiap tahun

**PERSENTASE LEMBAGA INTERNASIONAL YANG MEMANFAATKAN PROGRAM DIPLOMASI
KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN**

Program	:	Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SS/SP/SK	:	Meningkatnya kualitas pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Meningkatnya pemanfaatan bahan diplomasi kebahasaan di kancah internasional
IKSS/IKP/IKK	:	Persentase lembaga internasional yang memanfaatkan program diplomasi kebahasaan dan kesastraan
Definisi	:	Persentase jumlah organisasi kerja sama multilateral yang terfasilitasi penerjemahan dan penjurubahasaan yang dibandingkan dengan jumlah organisasi kerja sama Internasional yang terafiliasi Kementerian Luar Negari RI. Organisasi kerja sama multilateral yang dimaksud dalam indikator merupakan badan atau lembaga di bawah PBB, organisasi kerja sama intrakawasan atau antarkawasan, atau organisasi kerja sama antarnegara untuk tujuan-tujuan khusus yang memiliki aturan atau konvensi tentang penggunaan bahasa resmi, bahasa kerja, atau bahasa dengan status strategis lainnya.
Metode Penghitungan	:	Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah organisasi kerja sama multilateral yang terfasilitasi penerjemahan dan penjurubahasaan dengan jumlah organisasi kerja sama Internasional yang terafiliasi Kementerian Luar Negari RI. Rumus persentase pemanfaatan oleh lembaga adalah sebagai berikut. $PLI = \left(\frac{LM}{LI} \right) \times 100\%$ Keterangan Variabel: PLI: Persentase lembaga internasional yang memanfaatkan program diplomasi kebahasaan dan kesastraan LM: jumlah organisasi kerja sama multilateral yang terfasilitasi penerjemahan dan penjurubahasaan

		LI: jumlah organisasi kerja sama Internasional yang terafiliasi Kementerian Luar Negari RI.
Satuan	:	Persentase (%)
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra
Sumber Data	:	Ditjen Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia
Variabel data	:	1. jumlah organisasi kerja sama multilateral yang terfasilitasi penerjemahan dan penjurubahasaan 2. jumlah organisasi kerja sama Internasional yang terafiliasi Kementerian Luar Negari RI.
Instansi Penghasil Data	:	Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa)
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi		Nilai minimum 0% Nilai maksimal 20% (dari IPBI) 0% – 2% Sangat Rendah >2% – 4% Rendah >4% – 8% Sedang >8% – 14% Tinggi >14% – 20% Sangat Tinggi
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/
Level Estimasi	:	Internasional
Klasifikasi	:	lembaga
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Jumlah data eksisting (sampai 2024)

jumlah organisasi kerja sama multilateral yang terfasilitasi penerjemahan dan penjurubahasaan:

1. UNESCO Paris:
2. KNIU: Penilaian geopark
3. Global Digital Library UNESCO

jumlah organisasi kerja sama Internasional yang terafiliasi Kementerian Luar Negari RI: 213 lembaga

		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase lembaga yang memanfaatkan produk diplomasi kebahasaanl = Jumlah total lembaga yang memanfaatkan/ jumlah total lembaga yang ada x 100%	Persentase pemanfaatan	1,4%	2,3%	3,3%	4,2%	5,6%
	total lembaga	213	213	213	213	213
	Jumlah lembaga yang memanfaatkan	3	5	7	9	12

Nilai minimum 0%

Nilai maksimal 20% (dari IPBI)

0% – 2% Sangat Rendah

>2% – 4% Rendah

>4% – 8% Sedang

>8% – 14% Tinggi

>14% – 20% Sangat Tinggi

Persentase Satuan Pendidikan yang peserta didiknya meningkat kualitas literasi membaca

Program	:	Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SS	:	Meningkatnya Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan
IKSS	:	Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: a. Literasi Membaca
SP	:	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran, Kompetensi, dan Karakter pada Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan
IKP	:	Persentase Satuan Pendidikan yang peserta didiknya meningkat kualitas literasi membaca
Definisi	:	Satuan pendidikan/sekolah yang peserta didik/muridnya telah diintervensi dengan aktivitas literasi membaca dapat dinyatakan sebagai sekolah yang meningkat kualitas literasi membacanya. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kenaikan kemampuan literasi membaca murid SD, SMP, dan SMA sederajat dalam asesmen kompetensi tingkat nasional.
Metode Penghitungan	:	Jumlah sekolah yang muridnya lebih dari 50% mengalami kenaikan kemampuan literasi membaca dibagi jumlah sekolah yang mendapatkan intervensi aktivitas literasi membaca dikalikan 100% $PSPL = \frac{\sum SPML}{\sum SSPL} \times 100\%$

		Keterangan: PSPL: Persentase satuan pendidikan yang meningkat kualitas literasi membacanya SPML: Jumlah satuan pendidikan yang kemampuan literasi membaca muridnya meningkat SSPL: Jumlah seluruh satuan pendidikan yang diintervensi dengan aktivitas literasi membaca
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Tahunan
Unit Pelaksana	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	
Variabel data	:	Satuan Pendidikan, Peserta Didik
Instansi Penghasil Data	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi		Makin tinggi nilai persentase sekolah yang kualitas literasi membacanya meningkat, makin tinggi kualitas literasi membaca muridnya
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	Ya

Level Estimasi	:	Nasional dan provinsi
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

IKP Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra

Program	:	Pembangunan kebahasaan dan kesastraan
SS	:	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
IKSS	:	Indeks Pembangunan Kebahasaan
SP	:	Meningkatnya Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia
IKP	:	Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra
Definisi	:	Persentase komunitas bahasa dan sastra yang melaksanakan kegiatan pembinaan bahasa dan sastra adalah nilai yang menunjukkan keterlibatan komunitas yang secara aktif menyelenggarakan atau berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan bahasa dan sastra. Dasar Hukum: Kep Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra kemendikbudristek Nomor 0014/I.I3/BS.01.01/2024 tentang Juknis Peluncuran Banpem untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024; Kep Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek Nomor 1697/I/HK.06/2023 tentang Juknis Penyaluran Banpem Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Penguatan Komunitas Sastra pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. Tujuan: 1. Mendorong tumbuhkembangnya komunitas sastra di suatu wilayah, meningkatkan peran komunitas sastra di masyarakat sebagai sarana pembelajaran sastra, dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sastra, serta mendorong kualitas dan kuantitas publikasi karya sastra di masyarakat. 2. Mendorong tumbuhkembangnya komunitas penggerak literasi, meningkatkan peran komunitas penggerak literasi sebagai sarana menumbuhkan minat baca-tulis, dan meningkatkan kecintaan

		masyarakat pada buku, serta menggiatkan literasi di tengah masyarakat. Ruang lingkup: Komunitas Bahasa dan Sastra meliputi Komunitas Penggerak Literasi dan Komunitas Sastra
Metode Penghitungan	:	Perbandingan jumlah komunitas bahasa dan sastra yang melakukan pembinaan bahasa dan sastra dibagi dengan total jumlah komunitas bahasa dan sastra (di setiap provinsi) di kali 100% $KBSB = \left(\frac{KB}{KBS} \right) \times 100\%$ Keterangan: <i>KBSB</i>: Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan <i>KB</i>: jumlah komunitas bahasa dan sastra yang melaksanakan pembinaan <i>KBS</i>: jumlah komunitas bahasa dan sastra
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Tahunan
Unit Pelaksana	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Variabel data	:	komunitas bahasa dan sastra yang telah dibina dan terlibat Total jumlah komunitas bahasa dan sastra.
Instansi Penghasil Data	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi		Semakin tinggi nilai persentase komunitas bahasa dan sastra yang melaksanakan pembinaan bahasa dan sastra maka semakin aktif pula peran komunitas bahasa dan sastra dalam mengembangkan kebahasaan di masyarakat. Komunitas penggerak literasi berperan penting dalam membangkitkan minat baca dan tulis di kalangan masyarakat
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	Ya
Level Estimasi	:	Nasional dan Provinsi
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Definisi Operasional
IKK Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia
bagi Penutur Asing di Dalam Negeri yang Terfasilitasi Pengembangan Program BIPA

Program	: Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SS/SP/SK	: SS: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan SP: Meningkatnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia SKK: Meningkatnya Fasilitasi terhadap Lembaga Penyelenggara Program BIPA
IKSS/IKP/IKK	: IKSS: Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia (IPBI) IKP: Persentase Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang Terfasilitasi Standar Kompetensi Lulusan IKK: Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di Dalam Negeri yang Terfasilitasi Pengembangan Program BIPA
Definisi	: Persentase lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing di dalam negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA adalah angka persen yang menunjukkan perbandingan jumlah penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang menerima fasilitasi pengembangan program BIPA dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang teridentifikasi
Metode Penghitungan	: Jumlah lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang menerima fasilitasi pengembangan program BIPA dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dibagi jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang teridentifikasi dan dikali angka 100 dalam satuan persen (%) Rumus penghitungan indikator: $PL = \frac{l}{n} \times 100 (\%)$ Keterangan: PL: Persentase lembaga penyelenggara program BIPA di dalam negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA

	l: Jumlah lembaga penyelenggara program BIPA di dalam negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA n: Jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA di dalam negeri yang teridentifikasi
Satuan	: Persen (%)
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Sumber Data	: BIPA Daring, Dapobas, Unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Variabel data	: Data jumlah lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang menerima fasilitasi pengembangan program BIPA dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; data jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang teridentifikasi
Instansi Penghasil Data	: Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Polarisasi Indikator	: Polarisasi maksimal
Interpretasi	: Makin tinggi persentase lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing di dalam negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menunjukkan makin banyaknya lembaga penyelenggara program BIPA yang dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pembelajarannya kepada pemelajar BIPA yang dapat berdampak pada makin banyaknya penutur asing yang terlayani pembelajaran bahasa Indonesia yang berkualitas sehingga dapat mendorong meningkatnya fungsi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional.
Periode Pengumpulan Data	: Setiap tahun
Publikasi Ketersediaan Indikator	: Laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Data Pokok Kebahasaan, portal BIPA Daring
Level Estimasi	: Provinsi
Klasifikasi	: Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum?	: Ya

Frekuensi Penyajian : Setiap tahun
Data

Definisi Operasional
IKK Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia
bagi Penutur Asing di Luar Negeri yang Terfasilitasi Pengembangan Program BIPA

Program	: Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SS/SP/SK	: SS: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan SP: Meningkatnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia SKK: Meningkatnya Fasilitasi terhadap Lembaga Penyelenggara Program BIPA
IKSS/IKP/IKK	: IKSS: Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia (IPBI) IKP: Persentase Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang Terfasilitasi Standar Kompetensi Lulusan IKK: Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di Luar Negeri yang Terfasilitasi Pengembangan Program BIPA
Definisi	: Persentase lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing di luar negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA adalah angka persen yang menunjukkan perbandingan jumlah penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan; Perwakilan Republik Indonesia; pusat budaya Indonesia) di luar negeri yang menerima fasilitasi pengembangan program BIPA dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan; Perwakilan Republik Indonesia; pusat budaya Indonesia) di luar negeri yang teridentifikasi
Metode Penghitungan	: Jumlah lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan; Perwakilan Republik Indonesia; pusat budaya Indonesia) di luar negeri yang menerima fasilitasi pengembangan program BIPA dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dibagi jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan; Perwakilan Republik Indonesia; pusat budaya Indonesia) di luar negeri yang teridentifikasi dan dikali angka 100 dalam satuan persen (%) Rumus penghitungan indikator: $PL = \frac{l}{n} \times 100 (\%)$

	Keterangan: PL: Persentase lembaga penyelenggara program BIPA di luar negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA l: Jumlah lembaga penyelenggara program BIPA di luar negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA n: Jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA di luar negeri yang teridentifikasi
Satuan	: Persen (%)
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Sumber Data	: BIPA Daring, (bipadaring.kemdikdasmen.go.id), Dapobas
Variabel data	: Data jumlah lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan; Perwakilan Republik Indonesia; pusat budaya Indonesia) di luar negeri yang menerima fasilitasi pengembangan program BIPA dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; data jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan; Perwakilan Republik Indonesia; pusat budaya Indonesia) di luar negeri yang teridentifikasi
Instansi Penghasil Data	: Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Polarisasi Indikator	: Polarisasi maksimal
Interpretasi	: Makin tinggi persentase lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing di luar negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menunjukkan makin banyaknya lembaga penyelenggara program BIPA yang dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pembelajarannya kepada pemelajar BIPA yang dapat berdampak pada makin banyaknya penutur asing yang terlayani pembelajaran bahasa Indonesia yang berkualitas sehingga dapat mendorong meningkatnya fungsi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional.
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan
Publikasi Ketersediaan Indikator	: Laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Data Pokok Kebahasaan, portal BIPA Daring
Level Estimasi	: Nasional
Klasifikasi	: Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum?	: Ya

Frekuensi Penyajian : Setiap tahun
Data

Definisi Operasional: Lembaga Terbina UPT

Program	:	Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SK	:	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan
IKK	:	Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya
Definisi	:	Persentase lembaga yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya dapat diketahui setelah lembaga dibina melalui aktivitas pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara. Lembaga yang mendapat pembinaan adalah lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga pendidikan yang karena tugas dan fungsinya menggunakan bahasa Indonesia di lanskap dan pada dokumen. Dasar hukum pembinaan lembaga adalah Pasal 36 UU NRI 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik. Pembinaan lembaga dilaksanakan dalam empat bentuk kegiatan yang terdiri atas (1) sosialisasi, (2) pemantauan, (3) pendampingan, dan (4) evaluasi. Sosialisasi dilakukan untuk mencegah kesalahan penggunaan bahasa Indonesia melalui peningkatan sikap positif berbahasa Indonesia. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis secara objektif sikap bahasa lembaga dan situasi penggunaan bahasa Indonesia di lanskap dan dokumen lembaga. Pendampingan dilakukan untuk menyajikan data, memberikan konsultasi, dan melaksanakan asistensi praktik baik penggunaan

		bahasa Indonesia pada lembaga yang dibina. Evaluasi merupakan penilaian berdasarkan berbagai bukti objek bahasa untuk mengukur dampak dan efektivitas kegiatan pemantauan dan pendampingan yang telah dilakukan. Pengukuran peningkatan kualitas berbahasa lembaga dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap objek bahasa tulis di lanskap, objek bahasa tulis pada dokumen, dan sikap bahasa. Penilaian bahasa tulis di lanskap dilakukan pada objek bahasa yang terdapat pada ruang publik lembaga yang dibina. Adapun penilaian bahasa tulis pada dokumen dilakukan pada objek bahasa yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang dibina. Penilaian objek bahasa tulis di lanskap dan pada dokumen dilakukan terhadap objek yang masih terdapat kesalahan penggunaan bahasanya. Selanjutnya, penilaian sikap bahasa ditujukan bagi pimpinan lembaga atau pemangku kepentingan. Lembaga dikatakan meningkat kualitas penggunaan bahasanya jika terdapat peningkatan nilai akhir minimal 5% dari nilai awal.
Metode Penghitungan	:	Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah lembaga yang mengalami kenaikan kualitas penggunaan bahasa dan jumlah seluruh lembaga yang dibina, kemudian dikali seratus persen. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut. $PLT = \left(\frac{LM}{LT} \right) \times 100\%$ Keterangan: PLT = persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya LM = jumlah lembaga yang meningkat nilai penggunaan bahasanya LT = jumlah lembaga terbina
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif

Unit Pelaksana	:	Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Internal
Variabel Data	:	1. Lembaga yang terbina 2. Lembaga yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya
Instansi Penghasil Data	:	Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi		Makin tinggi nilai aktual/realisasi indikator terhadap target, makin baik capaian kinerjanya.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi Ketersediaan indikator	:	Ya
Level Estimasi	:	Provinsi
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah Indikator Dapat Diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi Penyajian Data	:	Setahun sekali

Program	: Pemartabatan Bahasa dan Sastra
SK	: Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan
IKK	: Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya
Definisi	: Komunitas penggerak literasi adalah komunitas yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, pembelajaran, dan penguatan aktivitas membaca dan menulis. Kinerja komunitas ini dapat dikategorikan dalam tiga, yaitu kategori A (13 indikator), kategori B (10 indikator), dan kategori C (6 indikator). Untuk meningkatkan kinerja komunitas diperlukan pembinaan. Keberhasilan pembinaan ditunjukkan dengan meningkatnya kategori komunitas literasi dari kategori C ke kategori yang lebih tinggi atau kategori B ke kategori A. Persentase komunitas literasi yang meningkat kinerjanya adalah perbandingan (dalam bentuk angka persen) dari jumlah komunitas literasi yang mengalami kemajuan atau perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan literasi terhadap jumlah total komunitas literasi yang dilakukan pembinaan dalam suatu periode tertentu.
Metode Penghitungan	: Rumus penghitungan adalah Jumlah komunitas literasi yang meningkat kinerjanya dibagi dengan jumlah total komunitas literasi yang dilakukan pembinaan dalam suatu periode tertentu dikalikan 100% $PKL = \frac{\Sigma KLM}{\Sigma SKLT} \times 100\%$ Keterangan: PKL: Persentase Komunitas Literasi yang Meningkatkan Kinerjanya ΣKLM: Komunitas Literasi yang Meningkatkan Kinerjanya. $\Sigma SKLT$: Seluruh Komunitas Literasi yang telah dibina/mendapat pendampingan, fasilitasi, atau dukungan langsung dari Badan Bahasa.
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Sumber Data	Data Pokok Kebahasaan, Unit pelaksana teknis Badan Bahasa

Variabel data	1. komunitas literasi yang meningkat kinerjanya 2. komunitas literasi yang dilakukan pembinaan dalam suatu periode tertentu	
Instansi Penghasil Data	Unit Pelaksana Teknis Badan Bahasa	
Polarisasi Indikator	Maksimal	.
Interpretasi	Makin tinggi tingkat komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya maka makin tinggi efektivitas program pembinaan, keberhasilan pendampingan, dan tingginya motivasi komunitas dalam pengembangan kebahasaan dan kesastraan	.
Periode Pengumpulan Data	Tahunan	
Publikasi ketersediaan indicator	Ya	
Level Estimasi	Provinsi	
Klasifikasi	Tidak ada	
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	Tidak	
Frekuensi penyajian data	Setiap tahun	

Program	:	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia
SK	:	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia
IKK	:	Persentase penutur teruji yang sesuai dengan standar kemahiran berbahasa profesinya
Definisi	:	Persentase penutur teruji yang sesuai dengan standar kemahiran berbahasa profesinya merupakan indikator untuk mendukung angka kemahiran berbahasa Indonesia secara nasional. Penutur teruji merupakan masyarakat yang teridentifikasi profesinya dan telah mengikuti UKBI Adaptif serta mendapatkan sertifikat uji. Predikat kemahiran berbahasa Indonesia merupakan predikat yang diperoleh dari hasil UKBI Adaptif yang terdiri atas predikat Istimewa, Sangat Unggul, Unggul, Madya, Semenjana, Marginal, dan Terbatas. Standar Kemahiran berbahasa Indonesia ditetapkan dalam sebuah peraturan Menteri yang mengatur standar Kemahiran berbahasa Indonesia setiap profesi.
Metode Penghitungan	:	Jumlah penutur teruji pada setiap profesi yang mengikuti UKBI Adaptif dan mendapat skor sesuai dengan dan lebih dari predikat kemahirannya pada peraturan tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia dibandingkan dengan jumlah penutur pada setiap profesi setiap tahun yang mengikuti UKBI Adaptif $PPT = \frac{PSS}{PSP} \times 100\%$ PPT: Persentase Penutur Teruji PSS: Jumlah penutur setiap profesi yang mendapat predikat sesuai dengan dan lebih dari standar PSP: Jumlah keseluruhan penutur setiap profesi yang mengikuti UKBI Metode perhitungan nasional $PPTN = \frac{PPT \text{ Provinsi}}{\text{Jumlah Provinsi}}$

		Keterangan: PPTN: Rerata Persentase Penutur Teruji secara nasional PPTP: Jumlah Persentase Penutur Teruji di Setiap Provinsi JP: Jumlah provinsi
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana		Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra serta Balai/Kantor Bahasa
Sumber Data		Badan Bahasa
Variabel data		1. Waktu 2. Sumber daya 3. Pemahaman terhadap petunjuk teknis
Instansi Penghasil Data		Badan Bahasa
Polarisasi Indikator		Stabil: nilai aktual/realisasi indikator diharapkan berada pada suatu rentang target tertentu
Interpretasi		Makin tinggi persentase penutur teruji yang sesuai dengan standar kemahiran berbahasa profesinya, makin tinggi angka kemahiran berbahasa Indonesia.
Periode Pengumpulan Data		Data dilaporkan pada akhir tahun pada setiap aktivitas
Publikasi ketersediaan indikator		
Level Estimasi		1. Nasional: yang merupakan data akumulasi dan rerata dari tiga puluh unit pelaksana teknis pelaksana 2. Provinsi: Data dapat dihasilkan dari setiap unit kerja pelaksana
Klasifikasi		Tidak ada

Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	Tidak
Frekuensi penyajian data	Setiap tahun

Program	:	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia
SK	:	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia
IKK	:	Persentase penutur teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya
Definisi	:	Persentase penutur teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya merupakan indikator untuk mendukung angka kemahiran berbahasa Indonesia secara nasional. Penutur teruji merupakan masyarakat yang teridentifikasi profesinya dan telah mengikuti UKBI Adaptif serta mendapatkan sertifikat uji. Predikat kemahiran berbahasa Indonesia merupakan predikat yang diperoleh dari hasil UKBI Adaptif yang terdiri atas predikat Istimewa, Sangat Unggul, Unggul, Madya, Semenjana, Marginal, dan Terbatas. Standar Kemahiran berbahasa Indonesia ditetapkan dalam sebuah peraturan Menteri yang mengatur standar Kemahiran berbahasa Indonesia setiap profesi.
Metode Penghitungan	:	Metode perhitungan: Jumlah penutur teruji pada setiap profesi setiap tahun yang mengikuti UKBI Adaptif dan mendapat skor sesuai dengan dan lebih dari predikat kemahirannya pada peraturan tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia dibandingkan dengan jumlah penutur pada setiap profesi setiap tahun yang mengikuti UKBI Adaptif $PPT = \frac{PSS}{PSP} \times 100\%$
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana		Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Sumber Data		Badan Bahasa

Variabel data	1. Waktu 2. Sumber daya 3. Pemahaman terhadap juknis
Instansi Penghasil Data	Badan Bahasa
Polarisasi Indikator	Stabil: nilai aktual/realisasi indikator diharapkan berada pada suatu rentang target tertentu
Interpretasi	Semakin tinggi tingkat penutur teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya maka Menunjukkan semakin tinggi penguasaan terhadap kemahiran berbahasa Indonesia pada setiap penutur sesuai dengan profesinya Semakin tinggi presentase penutur teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya maka semakin mahir penutur bahasa Indonesia sesuai profesinya.
Periode Pengumpulan Data	Data dilaporkan pada akhir tahun pada setiap aktivitas
Publikasi ketersediaan indikator	:
Level Estimasi	3. Nasional: yang merupakan data akumulasi dan rerata dari tiga puluh unit pelaksana teknis pelaksana 4. Provinsi: Data dapat dihasilkan dari setiap unit kerja pelaksana
Klasifikasi	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	Tidak

Frekuensi penyajian data	Setiap tahun
--------------------------	--------------

PERSENTASE BAHAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN YANG DIMANFAATKAN DI FORUM INTERNASIONAL

Program	:	Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SS/SP/SK	:	Meningkatnya kualitas pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra
IKSS/IKP/IKK	:	Persentase bahan kebahasaan dan kesastraan yang dimanfaatkan di forum internasional.
Definisi	:	Persentase bahan kebahasaan dan kesastraan yang dimanfaatkan di forum internasional dapat diketahui melalui angka yang menunjukkan pertumbuhan jumlah bahan kebahasaan dan kesastraan yang digunakan, disampaikan, atau dipublikasikan melalui forum-forum internasional yang bertujuan memperkenalkan, mempromosikan, atau mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia di tingkat global. Forum-forum ini mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, pendidikan, atau keagamaan yang diselenggarakan oleh lembaga multilateral, bilateral, maupun lembaga strategis non-pemerintah lainnya. Pemanfaatan bahan dapat terjadi baik melalui fasilitasi langsung oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa maupun atas inisiatif lembaga internasional mitra strategis Indonesia. Bahan yang dimaksud dapat meliputi karya terjemahan, dokumen penjurubahasaan, publikasi ilmiah, dokumen kesastraan, konten digital kebahasaan, dan media promosi bahasa dan sastra lainnya yang relevan. Bahan kebahasaan merujuk pada dokumen atau naskah diplomasi kebahasaan yang mengandung informasi tentang kebijakan, konsep, cerita, atau praktik kebahasaan dan kesastraan Indonesia, serta naskah resmi pemerintah atau lembaga lainnya yang diterjemahkan atau dijadikan bahan acuan, publikasi, promosi dalam forum multilateral, seperti di UNESCO, ASEAN, PBB, dan organisasi internasional sejenis, atau lembaga mitra strategis, seperti universitas-universitas, sekolah satuan kerja sama, sekolah-sekolah di luar negeri, klub sepak bola di luar negeri, perusahaan asing, dan lainnya.

		Bahan kesastraan meliputi karya sastra Indonesia (puisi, cerpen, kutipan novel, esai sastra) yang diterjemahkan dan digunakan dalam forum internasional, baik sebagai bahan diskusi, pembacaan karya, pementasan, atau kurasi dalam festival sastra, pameran buku, dan forum budaya lainnya. Forum Internasional dibagi menjadi dua jenis, yaitu forum resmi di tingkat internasional dan forum tidak resmi di tingkat internasional. Forum resmi di tingkat internasional adalah pertemuan atau sidang yang diselenggarakan oleh organisasi internasional, pemerintah, atau institusi multilateral yang memiliki legitimasi hukum dan diakui secara internasional. Forum ini bersifat formal, melibatkan perwakilan resmi negara, memiliki agenda dan hasil yang terdokumentasi, serta menghasilkan keputusan yang mengikat atau diakui secara global. Contohnya meliputi Sidang Umum UNESCO, KTT ASEAN, Sidang Dewan HAM PBB, dan rapat bilateral antarkementerian luar negeri. Forum tidak resmi di tingkat internasional adalah pertemuan lintas negara yang bersifat informal, seperti seminar, lokakarya, atau diskusi yang diselenggarakan oleh universitas, LSM internasional, atau komunitas profesi, diseminasi produk penerjemahan di sekolah-sekolah, universitas-universitas, atau lembaga-lembaga BIPA. Forum ini tidak menghasilkan keputusan yang mengikat, tetapi mendorong dialog, pertukaran pengetahuan, dan jejaring kerja sama.
Metode Penghitungan	:	Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah bahan kebahasaan dan kesastraan yang dimanfaatkan dengan jumlah total bahan kebahasaan dan kesastraan yang ada untuk tujuan internasionalisasi bahasa dan sastra Indonesia. Rumus persentase pemanfaatan bahan di forum internasional adalah sebagai berikut: $PB = \left(\frac{BM}{BT} \right) \times 100\%$ Keterangan:

		PB: Persentase bahan kebahasaan dan kesastraan yang dimanfaatkan di forum internasional BM: Jumlah bahan kebahasaan dan kesastraan yang dimanfaatkan dalam forum internasional BT: Jumlah total bahan kebahasaan dan kesastraan yang ada untuk keperluan internasionalisasi bahasa dan sastra Indonesia
Satuan	:	Persentase (%)
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Data kegiatan internasional, daftar mitra kerja sama, MoU, publikasi, data fasilitasi lembaga, data forum Internasional.
Variabel data	:	BM: Jumlah bahan kebahasaan dan kesastraan yang dimanfaatkan dalam forum internasional BT: Jumlah total bahan kebahasaan dan kesastraan yang ada untuk keperluan internasionalisasi bahasa dan sastra Indonesia
Instansi Penghasil Data	:	Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi		Rentang interpretasi: 0–20%: Sangat Rendah (belum ada pemanfaatan signifikan) 21–40%: Rendah (pemanfaatan masih terbatas) 41–60%: Sedang (pemanfaatan mulai meluas) 61–80%: Tinggi (pemanfaatan sudah cukup baik) 81–100%: Sangat Tinggi (pemanfaatan optimal)
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/

Level Estimasi	:	Internasional
Klasifikasi	:	Bahan
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Definisi Operasional: Lembaga Terbina Pusbin

Program	:	Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SK	:	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan
IKK	:	Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya
Definisi	:	Persentase lembaga yang meningkatkan kualitas penggunaan bahasanya dapat diketahui setelah lembaga dibina melalui aktivitas pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara. Lembaga yang mendapat pembinaan adalah lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga pendidikan yang karena tugas dan fungsinya menggunakan bahasa Indonesia di lanskap dan pada dokumen. Dasar hukum pembinaan lembaga adalah Pasal 36 UU NRI 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik. Upaya pembinaan lembaga dalam rangka implementasi Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia dilaksanakan secara berjenjang, yaitu pada tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh UPT atau balai/kantor bahasa dan pada tingkat nasional yang diselenggarakan oleh pusat (Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra). Pada tingkat provinsi, pembinaan lembaga dilaksanakan secara intensif dengan melaksanakan empat bentuk kegiatan yang terdiri atas (1) sosialisasi, (2) pemantauan, (3) pendampingan, dan (4) evaluasi. Sosialisasi dilakukan untuk mencegah kesalahan penggunaan bahasa Indonesia melalui peningkatan sikap positif berbahasa. Pemantauan dilakukan

untuk mengetahui dan menganalisis secara objektif sikap bahasa lembaga dan situasi penggunaan bahasa Indonesia di lanskap dan pada dokumen lembaga. Pendampingan dilakukan untuk menyajikan data, memberikan konsultasi, dan melaksanakan asistensi praktik baik penggunaan bahasa Indonesia pada lembaga yang dibina. Evaluasi merupakan penilaian berdasarkan berbagai bukti objek bahasa untuk mengukur dampak dan efektivitas kegiatan pemantauan dan pendampingan yang telah dilakukan.

Pembinaan lembaga pada tingkat provinsi tersebut dilakukan secara langsung ke lapangan. Dalam hal ini, balai/kantor bahasa menjalin komunikasi dan koordinasi secara langsung dengan lembaga sasaran pembinaan. Sementara itu, pada tingkat nasional, pusat melaksanakan pembinaan lembaga dengan berfokus pada penyusunan dan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Dalam hal ini, pusat menyusun perangkat peraturan, petunjuk teknis, dan instrumen yang menjadi dasar pelaksanaan pembinaan lembaga dan memastikan efektivitas implementasi perangkat tersebut di setiap UPT dengan melakukan pendampingan dan koordinasi yang intensif terhadap balai/kantor bahasa. Selain itu, dalam hal penghitungan rerata persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya di Indonesia, pusat menyiapkan instrumen pengukuran, baik secara parsial di setiap wilayah kerja maupun secara agregat di seluruh wilayah Indonesia.

Pengukuran peningkatan kualitas berbahasa lembaga dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap objek bahasa tulis di lanskap, objek bahasa tulis pada dokumen, dan sikap bahasa. Penilaian bahasa tulis di lanskap dilakukan pada objek bahasa yang terdapat pada ruang publik lembaga yang dibina. Adapun penilaian bahasa tulis di dokumen dilakukan pada objek bahasa yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang dibina. Penilaian objek bahasa tulis di lanskap dan dokumen dilakukan terhadap objek yang masih terdapat kesalahan penggunaan bahasanya. Selanjutnya, penilaian sikap bahasa ditujukan bagi pimpinan lembaga atau pemangku kepentingan. Lembaga dikatakan meningkat

		kualitas penggunaan bahasanya jika terdapat peningkatan nilai akhir minimal 5% dari nilai awal. Penghitungan persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah lembaga yang mengalami kenaikan kualitas penggunaan bahasa dan jumlah seluruh lembaga yang dibina kemudian dikali seratus persen. Setelah persentase lembaga terbina di setiap wilayah kerja didapatkan, penghitungan rerata persentase dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh terhadap hasil dari seluruh rangkaian proses pembinaan lembaga, yaitu mulai dari penyusunan NSPK hingga pelaksanaan pembinaan lembaga.
Metode Penghitungan	:	Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya di seluruh wilayah kerja dan jumlah wilayah kerja yang melaksanakan pembinaan terhadap lembaga. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut. $RPLT = \frac{PLT1 + PLT2 + PLT3 + \dots}{WK}$ Keterangan: RPLT = rerata persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya PLT 1 = persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya di wilayah kerja 1 PLT 2 = persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya di wilayah kerja 2 PLT 2 = persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya di wilayah kerja 3 WK = jumlah wilayah kerja yang melaksanakan pembinaan terhadap lembaga
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Sumber Data	:	Laporan Internal

Variabel Data	:	1. Wilayah kerja yang melaksanakan pembinaan 2. Lembaga yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya
Instansi Penghasil Data	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi		Makin tinggi nilai aktual/realisasi indikator terhadap target, makin baik capaian kinerjanya.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi Ketersediaan Indikator	:	Ya
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah Indikator Dapat Diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi Penyajian Data	:	Setahun sekali

Definisi Operasional Persentase penambahan bahasa, sastra, dan aksara dalam Peta Kebinekaan

Program	:	Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SS/SP/SK	:	Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra
IKSS/IKP/IKK	:	Persentase penambahan bahasa, sastra, dan aksara dalam Peta Kebinekaan
Definisi	:	Penambahan jumlah (entitas) bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dan/atau terdokumentasi terhadap jumlah entitas bahasa, sastra dan aksara yang terpetakan dikalikan seratus. Penambahan entitas bahasa dalam pemetaan, meliputi bahasa, dialek, subdialek, atau beda wicara
Metode Penghitungan	:	Perhitungan dilakukan dengan cara menghitung penambahan tiap-tiap entitas bahasa, sastra dan/atau aksara dibagi dengan jumlah entitas bahasa, sastra, dan aksara yang sudah terpetakan dikalikan seratus. Perhitungan dilakukan dengan rumus berikut. $PPB = \frac{x}{n} \times 100\%$ Keterangan: <i>PPB: persentase penambahan bahasa, sastra, dan/atau aksara dalam Peta Kebinekaan</i> <i>x: penambahan bahasa, sastra, dan/atau aksara</i> <i>n: Jumlah bahasa, sastra, dan aksara yang sudah terpetakan</i>
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Balai/Kantor Bahasa
Sumber Data	:	Data Pokok Kebahasaan, Peta Bahasa, Registrasi Bahasa dan Sastra
Variabel data	:	Data bahasa, sastra, dan aksara yang diverifikasi
Instansi Penghasil Data	:	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi		Makin besar persentase penambahan verifikasi bahasa, sastra dan/atau aksara, makin baik capaian kinerjanya.

Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	Data Pokok Kebahasaan, Peta Bahasa, Registrasi Bahasa dan Sastra
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Setiap tahun

Definisi Operasional Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi

Program	:	Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SK	:	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra
IKK	:	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi
Definisi	:	Produk pengembangan bahasa dan sastra disebut tervalidasi jika dalam proses penyusunannya sudah melalui tahapan pembakuan dan kodifikasi. Pembakuan adalah proses, cara, dan perbuatan menentukan aturan bahasa yang diwujudkan dalam bentuk kaidah bahasa. Sementara itu, kodifikasi adalah pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk seperti tata bahasa, pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, dan kamus. Hal ini tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia. Tahapan dari proses pembakuan berujung pada validasi. Proses lengkapnya adalah seleksi – elaborasi – verifikasi – validasi. Setelah pembakuan, dilakukan proses kodifikasi dengan tahapan pencatatan – penyelarasan – penyuntingan – penerbitan. Seleksi merupakan langkah awal dalam pembakuan untuk menentukan materi dari korpus melalui pencarian, pengumpulan, dan pemilihan. Elaborasi merupakan perluasan cakupan materi hasil seleksi secara terperinci dan cermat, yang dilakukan melalui analisis, klasifikasi, dan kategorisasi terhadap data kebahasaan dan kesastraan. Verifikasi merupakan pemeriksaan kebenaran konsep hasil elaborasi

		dengan memanfaatkan sumber rujukan yang dilakukan, melalui pemeriksaan konsep, penyelarasan konsep, konsultasi dan diskusi yang melibatkan pakar, akademisi, praktisi, dan/atau masyarakat adat. Validasi merupakan pengesahan konsep hasil pembakuan yang dilakukan melalui sidang validasi pakar dan pengesahan hasil validasi. Validasi dilakukan oleh Kepala Badan.
Metode Penghitungan	:	Penghitungan dilakukan dengan cara membagi jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra pada satu tahun dengan produk pengembangan yang sudah ada, kemudian dikali seratus persen. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut. $PPP (\%) = \frac{PB}{PA} \times 100\%$ Keterangan: PPP: Persentase penambahan produk pengembangan bahasa dan sastra tervalidasi PB: Jumlah produk baru pengembangan bahasa dan sastra tervalidasi PA: Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra yang sudah ada
Satuan	:	Persentase (%)
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Unit pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan internal
Variabel data	:	1. Produk baru pengembangan bahasa dan sastra tervalidasi

		2. Produk pengembangan bahasa dan sastra yang sudah ada
Instansi Penghasil Data	:	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan UPT Badan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi		Makin tinggi persentase penambahan produk pengembangan bahasa dan sastra tervalidasi makin baik kinerja program dalam menghasilkan produk sesuai standar
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	Renstra Badan Bahasa dan Renstra UPT
Level Estimasi	:	Nasional dan provinsi
Klasifikasi	:	Produk
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

**Format dan Ketentuan Pengisian Definisi Operasional:
Penutur Terbina Pusbin**

Program	:	Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SK	:	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia
IKK	:	Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya
Definisi	:	Persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya dapat diketahui setelah penutur bahasa dibina melalui aktivitas peningkatan kemahiran berbahasa. Penutur bahasa adalah pengguna bahasa Indonesia yang tugas dan perannya berhubungan dengan pemanfaatan bahasa Indonesia, baik melalui lisan maupun tulisan. Pembinaan penutur bahasa bertujuan untuk meningkatkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah, dan meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia dalam konteks profesional ataupun sehari-hari. Dasar hukum pembinaan penutur bahasa adalah Pasal 36 UU NRI 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik. Upaya pembinaan penutur bahasa dalam rangka implementasi Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia dilaksanakan secara berjenjang, yaitu pada tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh UPT atau balai/kantor bahasa dan pada tingkat nasional yang diselenggarakan oleh pusat (Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra). Pada tingkat provinsi, pembinaan penutur bahasa dilaksanakan secara intensif dengan melaksanakan seluruh tahap

pembinaan terhadap penutur bahasa terdiri atas penilaian awal, pembekalan/penyampaian materi, pendampingan, dan penilaian akhir. Dalam hal ini, pembinaan terhadap penutur bahasa dilakukan secara langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, balai/kantor bahasa menjalin komunikasi dan koordinasi secara langsung dengan penutur bahasa yang menjadi sasaran pembinaan.

Sementara itu, pada tingkat nasional, pusat melaksanakan pembinaan penutur bahasa dengan berfokus pada penyusunan dan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Dalam hal ini, pusat menyusun perangkat peraturan, petunjuk teknis, dan instrumen yang menjadi dasar pelaksanaan pembinaan lembaga dan memastikan efektivitas implementasi perangkat tersebut di setiap UPT dengan melakukan pendampingan dan koordinasi yang intensif terhadap balai/kantor bahasa. Selain itu, dalam hal penghitungan rerata persentase penutur bahasa terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya di Indonesia, pusat menyiapkan instrumen pengukuran, baik secara parsial di setiap wilayah kerja maupun secara agregat di seluruh wilayah Indonesia.

Pengukuran peningkatan kualitas berbahasa penutur dilakukan dengan membandingkan nilai pada tes awal dan tes akhir setiap peserta. Materi dalam tes awal dan tes akhir adalah materi yang diberikan oleh narasumber/pengajar saat pelaksanaan pembinaan. Peserta dianggap meningkat kualitas berbahasanya jika terdapat peningkatan nilai akhir minimal 5% dari nilai awal.

Penghitungan persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah peserta yang mengalami kenaikan nilai dan jumlah peserta pembinaan, kemudian dikali seratus persen. Setelah persentase penutur bahasa terbina di setiap wilayah kerja didapatkan, penghitungan rerata persentase dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh terhadap hasil dari seluruh rangkaian proses pembinaan penutur bahasa, yaitu mulai dari penyusunan NSPK hingga pelaksanaan pembinaan penutur bahasa.

Metode Penghitungan	:	Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya di seluruh wilayah kerja dan jumlah wilayah kerja yang melaksanakan pembinaan terhadap penutur bahasa. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut. $RPPB = \frac{PPB\ 1 + PPB\ 2 + PPB\ 3 + \dots}{WK}$ Keterangan: RPPB = rerata persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya PPB 1 = persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya di wilayah kerja 1 PPB 2 = persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya di wilayah kerja 2 PPB 3 = persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya di wilayah kerja 3 WK = jumlah wilayah kerja yang melaksanakan pembinaan terhadap penutur bahasa
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Sumber Data	:	Laporan Internal
Variabel Data	:	1. Wilayah kerja yang melaksanakan pembinaan 2. Penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya
Instansi Penghasil Data	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Makin tinggi nilai aktual/realisasi indikator terhadap target, makin baik capaian kinerjanya.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Publikasi Ketersediaan Indikator	:	Ya
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Tidak
Apakah Indikator Dapat Diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi Penyajian Data	:	Setahun sekali

Definisi Operasional: Penutur Terbina UPT

Program	:	Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SK	:	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia
IKK	:	Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya
Definisi	:	Persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya dapat diketahui setelah penutur bahasa dibina melalui aktivitas peningkatan kemahiran berbahasa. Penutur bahasa adalah pengguna bahasa Indonesia yang tugas dan perannya berhubungan dengan pemanfaatan bahasa Indonesia, baik melalui lisan maupun tulisan. Pembinaan penutur bahasa bertujuan untuk meningkatkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah, dan meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia dalam konteks profesional ataupun sehari-hari. Dasar hukum pembinaan penutur bahasa adalah Pasal 36 UU NRI 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik. Tahap pembinaan terhadap penutur bahasa terdiri atas penilaian awal, pembekalan/penyampaian materi, pendampingan, dan penilaian akhir. Penilaian awal dilakukan untuk mengukur kemampuan awal peserta sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan pembekalan dan pendampingan. Pada tahap pembekalan, materi yang disampaikan kepada peserta adalah materi kebahasaan dan/atau kesastraan yang relevan. Setelah pembekalan, pendampingan dilaksanakan

		dengan memanfaatkan teknologi digital yang memudahkan peserta untuk mengakses materi, mengunggah tugas, dan berkomunikasi dengan pendamping. Selanjutnya, penilaian akhir dilaksanakan untuk mengukur kemampuan akhir peserta setelah dilakukan pembekalan dan pendampingan sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan pembinaan. Pengukuran peningkatan kualitas berbahasa penutur dilakukan dengan membandingkan nilai pada tes awal dan tes akhir setiap peserta. Materi dalam tes awal dan tes akhir adalah materi yang diberikan oleh narasumber/pengajar saat pelaksanaan pembinaan. Peserta dianggap meningkat kualitas berbahasanya jika terdapat peningkatan nilai akhir minimal 5% dari nilai awal.
Metode Penghitungan	:	Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah peserta yang mengalami kenaikan nilai dan jumlah peserta pembinaan, kemudian dikali seratus persen. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut. $PPB = \frac{PM}{PT} \times 100\%$ Keterangan: PPB = persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya PM = jumlah penutur bahasa yang meningkat nilainya PT = jumlah penutur bahasa terbina
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Internal
Variabel Data	:	1. Penutur bahasa yang terbina 2. Penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasa
Instansi Penghasil Data	:	Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi		Makin tinggi nilai aktual/realisasi indikator terhadap target, makin baik capaian kinerjanya.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi Ketersediaan indikator	:	Ya
Level Estimasi	:	Provinsi
Klasifikasi	:	Ya
Apakah Indikator Dapat Diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi Penyajian Data	:	Setahun sekali

**PERSENTASE PRODUK PENERJEMAHAN YANG DIMANFAATKAN OLEH PESERTA DIDIK
(PUSDAYA)**

Program	:	Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SS/SP/SK	:	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran, Kompetensi, dan Karakter pada Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik
IKSS/IKP/IKK	:	Persentase produk penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik
Definisi	:	Indikator ini mengukur proporsi produk hasil penerjemahan yang diterjemahkan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia serta sebaliknya dan dimanfaatkan secara aktif oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran dan literasi. Batasan dalam indikator ini mencakup peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Produk penerjemahan yang diperhitungkan adalah seluruh hasil penerjemahan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia ke bahasa asing yang diterbitkan, dicetak, atau didistribusikan melalui fasilitasi Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra dan mitra kerja sama pemerintah atau diunggah secara daring melalui platform resmi pemerintah. Pemanfaatan produk tersebut meliputi kegiatan pembelajaran terstruktur di kelas maupun kegiatan literasi nonformal, baik yang berlangsung di satuan pendidikan (seperti program literasi sekolah, kelas membaca, dan pojok baca), maupun di luar lingkungan sekolah, seperti di perpustakaan umum, taman baca masyarakat (TBM), komunitas literasi, dan forum-forum literasi anak lainnya, serta pemanfaatan fitur baca buku atau pengunduhan melalui platform digital resmi pemerintah.
Metode Penghitungan	:	Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik dengan jumlah total produk buku hasil penerjemahan yang tersedia di Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Bahasa. Pemanfaatan yang dimaksud mencakup penggunaan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, pemanfaatan fitur baca buku atau pengunduhan

		melalui platform digital resmi, distribusi ke satuan pendidikan, atau bentuk pendayagunaan lainnya yang terverifikasi. Rumus persentase pemanfaatan produk buku hasil penerjemahan oleh peserta didik adalah sebagai berikut $PBu = \left(\frac{Jpt}{JTpt} \right) \times 100\%$ Keterangan: PBu: Persentase produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik Jpt: Jumlah produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik JTpt: Jumlah total produk buku hasil penerjemahan yang dihasilkan UPT Badan Bahasa
Satuan	:	Persentase (%)
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra
Sumber Data	:	Data distribusi buku, data pemanfaatan di satuan pendidikan, data pemanfaatan dari platform digital
Variabel data	:	Jpt: Jumlah produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik JTpt: Jumlah total produk buku hasil penerjemahan yang dihasilkan UPT Badan Bahasa
Instansi Penghasil Data	:	Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal

Interpretasi		Nilai PBU menunjukkan persentase produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik. Rentang interpretasi: 0–20%: Sangat Rendah (belum ada pemanfaatan signifikan) 21–40%: Rendah (pemanfaatan masih terbatas) 41–60%: Sedang (pemanfaatan mulai meluas) 61–80%: Tinggi (pemanfaatan sudah cukup baik) 81–100%: Sangat Tinggi (pemanfaatan optimal)
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	Dokumen Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tersedia di laman resmi Badan Bahasa: https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Produk
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

**PERSENTASE PRODUK PENERJEMAHAN YANG DIMANFAATKAN OLEH PESERTA DIDIK
DI 30 PROVINSI**

Program	:	Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SS/SP/SK	:	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran, Kompetensi, dan Karakter pada Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik
IKSS/IKP/IKK	:	Persentase produk penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik
Definisi	:	Indikator ini mengukur proporsi produk hasil penerjemahan yang diterjemahkan dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia dan dimanfaatkan secara aktif oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan literasi. Batasan dalam indikator ini mencakup peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Produk penerjemahan yang diperhitungkan adalah seluruh hasil penerjemahan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia yang diterbitkan, dicetak, atau didistribusikan melalui fasilitasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, atau mitra kerja sama pemerintah, atau diunggah secara daring melalui platform resmi pemerintah. Pemanfaatan produk tersebut meliputi kegiatan pembelajaran terstruktur di kelas maupun kegiatan literasi nonformal, baik yang berlangsung di satuan pendidikan (seperti program literasi sekolah, kelas membaca, dan pojok baca), maupun di luar lingkungan sekolah, seperti di perpustakaan umum, taman baca masyarakat (TBM), komunitas literasi, dan forum-forum literasi anak lainnya, serta pemanfaatan fitur baca buku atau pengunduhan melalui platform digital resmi pemerintah.
Metode Penghitungan	:	Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik dengan jumlah total produk buku hasil penerjemahan yang tersedia di UPT Badan Bahasa. Pemanfaatan yang dimaksud mencakup penggunaan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, pemanfaatan fitur baca buku atau pengunduhan melalui platform digital resmi,

		distribusi ke satuan pendidikan, atau bentuk pendayagunaan lainnya yang terverifikasi. Rumus persentase pemanfaatan produk buku hasil penerjemahan oleh peserta didik adalah sebagai berikut $PBu = \left(\frac{Jpt}{JTpt} \right) \times 100\%$ Keterangan: PBu: Persentase produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik Jpt: Jumlah produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik JTpt: Jumlah total produk buku hasil penerjemahan yang dihasilkan UPT Badan Bahasa
Satuan	:	Persentase (%)
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Data distribusi buku, data pemanfaatan di satuan pendidikan, data pemanfaatan dari platform digital, data hasil pemantauan UPT Badan Bahasa
Variabel data	:	Jpt: Jumlah produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik JTpt: Jumlah total produk buku hasil penerjemahan yang dihasilkan UPT Badan Bahasa
Instansi Penghasil Data	:	UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal

Interpretasi		Nilai PBU menunjukkan persentase produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik. Rentang interpretasi: 0–20%: Sangat Rendah (belum ada pemanfaatan signifikan) 21–40%: Rendah (pemanfaatan masih terbatas) 41–60%: Sedang (pemanfaatan mulai meluas) 61–80%: Tinggi (pemanfaatan sudah cukup baik) 81–100%: Sangat Tinggi (pemanfaatan optimal)
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	Dokumen Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tersedia di laman resmi Badan Bahasa: https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/
Level Estimasi	:	Provinsi
Klasifikasi	:	Produk
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Definisi Operasional: Persentase Murid yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca

Program	:	Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SS/SP/SK	:	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Murid
IKSS/IKP/IKK	:	Persentase Murid yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca
Definisi	:	Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu di semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA sederajat). Murid diharapkan mendapat peningkatan dan penguatan kecakapan literasi untuk mendukung kompetensi akademiknya di sekolah, khususnya terkait dengan kecakapan literasi membaca. Sasaran murid yang akan ditingkatkan kecakapan literasi membacanya adalah murid di sekolah yang hasil Asesmen Nasional (AN) pada aspek AKM literasi membacanya masih berkategori rendah (Kategori 1 atau Kategori 2). Murid tersebut akan diberi peningkatan dan penguatan literasi melalui aktivitas membaca buku, artikel, karya sastra, dan lain-lain. Aktivitas membaca yang dilakukan oleh murid akan disesuaikan dengan jenjang pendidikannya (SD, SMP, atau SMA), seperti mengulas buku, membaca cepat, dan membaca kritis dan analitis. Buku yang digunakan untuk praktik membaca juga akan disesuaikan dengan jenjang kemampuan membaca murid. Ukuran dalam bentuk persen (%) yang menunjukkan jumlah murid yang mengalami peningkatan kemampuan atau kualitas dalam membaca dan memahami bacaan, dibandingkan dengan jumlah seluruh murid yang dinilai.

Metode Penghitungan	:	Jumlah murid yang naik kemampuan membacanya dibagi dengan jumlah murid yang telah mengikuti kegiatan peningkatan dan penguatan kecakapan literasi membaca dikali 100%. $PPDM = \frac{\Sigma PDML}{\Sigma SPDI} \times 100\%$ PPDM: Persentase Murid yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membacanya $\Sigma PDML$ = Jumlah Murid yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membacanya $\Sigma SPDI$ = Jumlah Murid yang telah diintervensi dengan aktivitas literasi membaca
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	UPT Badan Bahasa
Sumber Data	:	UPT Badan Bahasa
Variabel data	:	1. Murid yang mendapatkan peningkatan dan penguatan kecakapan literasi membaca. 2. Murid yang naik kemampuan membacanya setelah diberi intervensi peningkatan dan penguatan kecakapan literasi membaca
Instansi Penghasil Data	:	UPT Badan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi		Makin tinggi persentase kenaikan kemampuan membaca murid makin tinggi tingkat kecakapan literasi membaca murid
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	

Level Estimasi	:	Nasional/ wilayah
Klasifikasi	:	Murid SD, SMP, dan SMA.
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Definisi Operasional: Persentase produk pengembangan yang dimanfaatkan oleh peserta didik

Program	:	Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SS/SP/SK	:	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik
IKSS/IKP/IKK	:	Persentase produk pengembangan yang dimanfaatkan oleh peserta didik
Definisi	:	Persentase pengembangan produk bahasa dan sastra yang dimanfaatkan oleh peserta didik adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar proporsi produk hasil pengembangan bahasa dan sastra (seperti kamus, pedoman, cerita bergambar, dan komik) yang telah digunakan, dibaca, atau dimanfaatkan dalam kegiatan belajar, literasi, atau kegiatan lainnya oleh peserta didik pada jenjang dasar dan menengah.
Metode Penghitungan	:	Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan Peserta Didik (PPDP) diperoleh dari jumlah peserta didik yang menggunakan produk dibagi jumlah peserta didik yang menjadi sampel dikali 100 Agar indeks ini dapat dihitung, diperlukan: instrumen survei untuk peserta didik, jumlah sampel per jenjang pendidikan, dan identifikasi responden yang pernah menggunakan/memanfaatkan produk. Penentuan jumlah sampel peserta didik per jenjang dasar dan menengah untuk survei pemanfaatan produk bahasa dan sastra dapat dilakukan secara statistik dengan memperhatikan prinsip representatif, efisien, dan terukur. Rumus persentase produk pengembangan yang dimanfaatkan oleh peserta didik adalah sebagai berikut $PPDP (\%) = \frac{P_p}{P_s} \times 100\%$ Keterangan:

		PPDP : Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik Pp : jumlah peserta didik yang menggunakan produk Ps : jumlah peserta didik yang menjadi sampel								
Satuan	:	Persentase %								
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif								
Unit Pelaksana	:	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra								
Sumber Data	:	Data survei pemanfaatan produk pengembangan oleh peserta didik								
Variabel data	:	1. peserta didik yang menggunakan produk 2. peserta didik yang menjadi sampel 3. produk pengembangan bahasa dan sastra bagi peserta didik								
Instansi Penghasil Data	:	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra								
Polarisasi Indikator	:	Maksimal								
Interpretasi		Nilai PPDP menunjukkan persentase produk pengembangan yang dimanfaatkan oleh peserta didik. Rentang interpretasi: <table><tr><td>0-25%</td><td>Sangat Rendah (Produk hampir tidak dimanfaatkan. Daya jangkau atau daya tarik sangat minim.)</td></tr><tr><td>26-50%</td><td>Rendah (Produk mulai dikenal, namun masih belum banyak digunakan secara aktif.)</td></tr><tr><td>51-75%</td><td>Cukup Tinggi (Produk cukup dimanfaatkan dan berpotensi lebih luas digunakan.)</td></tr><tr><td>76-100%</td><td>Sangat Tinggi (Produk telah berhasil menjangkau dan dimanfaatkan luas oleh peserta didik.)</td></tr></table>	0-25%	Sangat Rendah (Produk hampir tidak dimanfaatkan. Daya jangkau atau daya tarik sangat minim.)	26-50%	Rendah (Produk mulai dikenal, namun masih belum banyak digunakan secara aktif.)	51-75%	Cukup Tinggi (Produk cukup dimanfaatkan dan berpotensi lebih luas digunakan.)	76-100%	Sangat Tinggi (Produk telah berhasil menjangkau dan dimanfaatkan luas oleh peserta didik.)
0-25%	Sangat Rendah (Produk hampir tidak dimanfaatkan. Daya jangkau atau daya tarik sangat minim.)									
26-50%	Rendah (Produk mulai dikenal, namun masih belum banyak digunakan secara aktif.)									
51-75%	Cukup Tinggi (Produk cukup dimanfaatkan dan berpotensi lebih luas digunakan.)									
76-100%	Sangat Tinggi (Produk telah berhasil menjangkau dan dimanfaatkan luas oleh peserta didik.)									
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan								

Publikasi ketersediaan indikator	:	Dokumen Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tersedia di laman resmi Badan Bahasa: https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/
Level Estimasi	:	Nasional dan provinsi
Klasifikasi	:	Peserta didik dasar dan menengah
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Definisi Operasional Rasio pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas

Program	:	Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SS/SP/SK	:	Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra
IKSS/IKP/IKK	:	Rasio pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas
Definisi	:	Perbandingan setiap pengajar utama bahasa daerah yang didukung oleh pengajar sejawat terhadap penutur muda yang mempelajari dan/atau menggunakan bahasa daerah di berbagai ranah, antara lain sekolah, keluarga, komunitas, dan, masyarakat.
Metode Penghitungan	:	Jumlah pengajar utama dibandingkan dengan jumlah penutur muda bahasa daerah dikalikan konstanta.
Satuan	:	Rasio
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Balai/Kantor Bahasa
Sumber Data	:	Data Pokok Kebahasaan, Peta Bahasa, Registrasi Bahasa dan Sastra
Variabel data	:	1. Jumlah guru utama 2. Jumlah pemelajar terimbas
Instansi Penghasil Data	:	Balai/Kantor Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Minimal 5 capaian penutur muda
Interpretasi	:	Makin besar proporsi penutur muda, makin baik capaian kinerja setiap pengajar utama. Capaian guru utama tersebut didukung oleh pengajar sejawat yang merupakan hasil pengimbasan.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Publikasi ketersediaan indikator	:	Data Pokok Kebahasaan, Peta Bahasa, Registrasi Bahasa dan Sastra
Level Estimasi	:	Nasional dan Provinsi
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Setiap tahun



Mengetahui,
 Sekretaris Badan Pengembangan dan
 Pembinaan Bahasa

★ Garjar Harimansyah

Target Kinerja Periode 2025—2029 Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	%	64	68	72	76	80
		Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	%	19	23	29	35	41
2	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia	Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya	%	41	43	45	47	49
		Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	%	60	63	66	69	72
3	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan	Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	%	59,930	63,136	66,342	69,548	72,754
		Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya	%	50	55	60	65	70
4	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	%	11,55	23,10	34,66	66,21	57,76
5	Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	%	2,8	8,5	10,7	15	21,4
		Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbis	Rasio	1:18	1:20	1:23	1:25	1:30
6	Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA	Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	%	50	55,5	56	56,5	57
7	Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	Nilai	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	Predikat	A	A	A	A	A

Kerangka Pendanaan Periode 2025—2029 Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur

Kode	Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribuan)				
		2025	2026	2027	2028	2029
DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran					
7569	Peningkatan Kecakapan Literasi	4.187.564	2.287.103	2.470.071	2.692.500	2.961.750
DU	Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan					
7566	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	2.335.650	1.729.828	1.902.810	2.093.091	2.302.400
7567	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia	258.747	2.805.642	3.058.150	3.363.965	3.700.360
7568	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia	234.909	84.896	151.500	169.680	186.648
WA	Program Dukungan Manajemen					
7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	6.777.485	7.802.785	8.022.900	8.664.700	9.444.523

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH									62.494.105	107.820.158	130.544.666	136.494.183	142.137.563	
SS 1	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua													
IKSS 1.1	Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD		persen	64,39	64,60	64,79	64,96	65,13						
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun		persen	92,44	92,50	92,57	92,64	92,71						
SS 2	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan													
IKSS 2.1	Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD		nilai	64,78	65,58	66,38	67,18	67,98						
IKSS 2.2	Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional:													
IKSS 2.2	a. Literasi Membaca		persen	68,62	70,62	72,62	74,62	76,62						
IKSS 2.2	b. Numerasi		persen	67,35	69,35	71,35	73,35	75,35						
IKSS 2.3	Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik		persen	33,24	33,45	33,66	33,87	34,08						
SS 3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan													
IKSS 3.1	Indeks Pembangunan Kebahasaan		Indeks	51,31	52,72	53,46	54,08	55,01						
IKSS 3.2	Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia		Indeks	52,73	53,50	54,28	55,07	55,87						
SS 4	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan vokasi													
IKSS 4.1	Persentase angkatan kerja lulusan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun		persen	72,55	73,27	74,00	74,74	75,49						
SS 5	Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel													
IKSS 5.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian		Indeks	89,35	90	90,1	90,2	90,3						
DF	Program Wajib Belajar 13 Tahun								28.297.570	55.055.664	74.865.732	77.492.544	79.848.744	
SP	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah													
IKP 1.1.1	Persentase Kab/Kota dengan Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD di atas 75		persen	70,83	73,12	75,41	77,70	80						
IKP 1.2.1	Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya		Rasio	0,9956	0,9957	0,9958	0,9959	0,9960						
IKP 1.2.2	Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya		Rasio	0,9447	0,9448	0,9449	0,9450	0,9451						
IKP 1.2.3	Rasio APK SMA/SMK/MA/Sederajat 20% Termiskin dan 20% Terkaya		Rasio	0,788	0,794	0,799	0,804	0,809						
IKP 1.2.4	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun		persen	99,21	99,22	99,24	99,25	99,27						
IKP 1.2.5	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun		persen	96,20	96,25	96,30	96,35	96,39						
IKP 1.2.6	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ sederajat		persen	87,40	87,76	88,08	88,36	88,63						
IKP 1.2.7	Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal		anak	496.810	993.620	1.720.430	2.217.240	2.714.050						
IKP 1.2.8	Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif		persen	31,14	35,60	40,07	44,53	49,00						
IKP 1.2.9	Persentase satuan pendidikan khusus dan Pendidikan nonformal yang memenuhi SNP		persen	13,18	17,32	21,48	25,63	29,79						

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK	Jumlah kab/kota yang menerapkan program afirmasi pada jenjang SD		Lembaga	514	514	514	514	514						
IKK	Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SD		Orang	37.403	76.884	118.442	162.078	207.793						
IKK	Persentase SD yang memenuhi SNP sarpras		persen	11,58	14,30	17,02	19,74	22,46						
7596.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga													
7596.QDB .203	Kab/Kota yang mendapatkan dukungan pelaksanaan program afirmasi pada jenjang SD		Lembaga	514	514	514	514	514						
7596.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7596.QDC .294	Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di jenjang SD		Orang	37.403	76.884	118.442	162.078	207.793						
7595.RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah													
7596.RBI. 291	SD yang Direvitalisasi		Unit	4.053	4.256	4.469	4.692	4.927						
7597	Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pusat							654.750	5.636.972	14.268.918	14.696.985	15.137.895	Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
SK	Terwujudnya layanan PAUD yang merata dan berkualitas													
IKK	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD		persen	36,61	36,74	36,86	36,99	37,11						
IKK	Persentase satuan PAUD yang memenuhi SNP sarpras		persen	5,63	6,26	6,89	7,52	8,15						
7597.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga													
7597.QDB .103	Kab/Kota yang mendapatkan dukungan pelaksanaan program afirmasi pada jenjang PAUD		Lembaga	514	514	514	514	514						
7597.RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah													
7597.RBI. 191	Satuan PAUD yang Direvitalisasi		Unit	1.241	1.188	1.135	1.082	1.029						
7597.RBI. 192	Unit Sekolah Baru Satuan PAUD yang Dibangun		Unit	2	3	4	5	6						
7599	Pembinaan Sekolah Menengah Atas	Pusat							2.983.522	5.750.808	3.726.692	3.838.493	3.953.647	Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
SK	Terwujudnya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas													
IKK	Jumlah provinsi/kab/kota yang menerapkan program afirmasi pada jenjang SMA		Lembaga	74	74	74	74	74						
IKK	Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SMA		Orang	58.800	117.600	176.400	235.400	294.000						
IKK	Persentase SMA yang memenuhi SNP sarpras		persen	40,06	49,48	58,89	68,30	77,71						
7599.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga													
7599.QDB .405	Prov/Kab/Kota yang mendapatkan dukungan pelaksanaan program afirmasi pada jenjang SMA		Lembaga	74	74	74	74	74						
7599.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7599.QDC .494	Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di jenjang SMA		Orang	58.800	117.600	176.400	235.400	294.000						
7599.RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah													
7599.RBI. 491	SMA yang Direvitalisasi		Unit	1.362	1.000	1.000	1.000	1.000						
7599.RBI. 492	Unit Sekolah Baru SMA yang Dibangun		Unit	20	20	20	20	16						
7835	Pembinaan Sekolah Luar Biasa dan Satuan Pendidikan Nonformal	Pusat							810.056	1.260.139	1.301.719	1.325.935	1.353.133	Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK	Terwujudnya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang merata dan berkualitas													
IKK	Persentase SLB yang memenuhi SNP sarpras		persen	20,80	31,89	42,94	53,99	65,04						
IKK	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menerapkan Layanan Afirmasi		Lembaga	520	520	520	520	520						
IKK	Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya		persen	13,08	13,82	14,57	15,31	16,05						
SK	Terwujudnya layanan pendidikan nonformal dan pendidikan informal yang merata dan berkualitas													
IKK	Persentase Satuan Pendidikan Nonformal yang memenuhi SNP sarpras		persen	4,23	4,78	5,32	5,86	6,41						
IKK	Persentase Satuan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal yang menyelenggarakan program keaksaraan dan pemberdayaan		persen	4,06	4,25	4,43	4,61	4,79						
7835.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga													
7835.QDB .503	Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Program Afirmasi dan Layanan Khusus		Lembaga	398	398	398	398	398						
7835.QDB .540	Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif		Lembaga	38	514	514	514	514						
7835.QDB .581	Lembaga yang Melaksanakan Program Afiliasi dengan Sekolah Rumah		Lembaga	48	48	48	48	48						
7835.QDB .582	Lembaga yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Jarak Jauh		Lembaga		35	35	35	35						
7835.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7835.QDC .510	Orang Dewasa Yang Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan		Orang	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000						
7835.QDC .511	Remaja dan Perempuan Dewasa yang mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kualitas Hidup		Orang	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000						
7835.QDC .583	Peserta Didik yang Mendapatkan bantuan Community Learning Center (CLC)		Orang	22.000	22.250	22.500	22.750	23.000						
7835.RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah													
7835.RBI. 001	SLB yang Direvitalisasi		Unit	155	260	258	258	258						
7835.RBI. 002	Unit Sekolah Baru SLB yang Dibangun		Unit	1	4	5	5	5						
7835.RBI. 003	Satuan Pendidikan Nonformal yang di Revitalisasi		Unit	59	60	60	60	60						
DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran								25.932.283	39.960.077	41.969.943	43.769.614	45.554.936	
SP	Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan													
IKP 2.1.1	Persentase kabupaten/kota yang memiliki PAUD dengan Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD pada kategori baik		persen	19,84	24,71	29,57	34,44	39,30						
IKP 2.2.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan Non-ASN yang memperoleh manfaat tunjangan untuk kesejahteraan dan peningkatan kapasitas		persen	52,92	53,83	54,75	55,66	56,57						
IKP 2.2.2	Persentase peserta didik yang berprestasi pada Tingkat Internasional		persen	40	41	42	43	44						
IKP 2.2.3	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan TIK untuk tujuan pembelajaran		persen	55	60	65	70	75						
IKP 2.2.4	Persentase inovasi pendidikan, sains, dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara yang diimplementasikan		persen	70	73	75	78	80						
IKP 2.2.5	Indeks Pemerataan Guru		Angka	35,91	34,91	33,91	32,91	31,91						
IKP 2.2.6	Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki indeks pemerataan guru dengan kategori baik		persen	40,22	47,83	55,25	62,68	70,11						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 2.2.7	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal		persen	71,50	85,06	85,96	86,87	87,77						
IKP 2.2.8	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karir		persen	8,20	17,51	26,85	36,21	45,61						
IKP 2.2.9	Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik		persen	59,47	62,44	65,56	68,84	72,28						
IKP 2.2.10	Persentase satuan pendidikan yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum		persen	44,59	45,59	46,59	47,59	48,59						
IKP 2.2.11	Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial		persen	87,96	91,98	96,00	100	100						
IKP 2.2.12	Persentase SMK dan Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum		persen	39,75	41,20	43,32	45,44	47,65						
IKP 2.2.13	Persentase satuan pendidikan nonformal dan informal yang meningkat kualitas pembelajaran dan kepemimpinan instruksionalnya		persen	19,75	22,25	24,75	27,25	29,75						
IKP 2.2.14	Persentase perangkat kurikulum dan pembelajaran yang kontekstual, berpusat pada peserta didik dan fokus pada karakter serta kompetensi esensial		persen	88	88	89	89	90						
IKP 2.2.15	Persentase pelaksanaan asesmen pendidikan yang berkualitas		persen	79,18	80,54	82,03	83,52	85,01						
IKP 2.2.16	Rata-rata Indeks mutu buku pendidikan yang memenuhi standar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran		Indeks	70	72	74	76	78						
IKP 2.2.17	Persentase rekomendasi standar dan kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis dan/atau dasar regulasi		persen	53	57	64	68	71						
IKP 2.2.18	Persentase satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B		persen	67,16	69,38	71,60	73,82	76,04						
IKP 2.2.19	Persentase Satuan Pendidikan yang peserta didiknya meningkat kualitas literasi membaca		persen	64	68	72	76	80						
IKP 2.3.1	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan penguatan pendidikan karakter yang bermutu		persen	8,3	21,7	38,3	53,3	63,3						
IKP 2.3.2	Persentase satuan pendidikan yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik		persen	66,02	67,83	70,80	72,16	73,69						
IKP 2.3.3	Persentase SMK dan Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik		persen	60,33	61,53	62,73	63,93	65,13						
7562	Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non ASN	Pusat							12.336.991	29.786.313	30.258.943	30.407.538	30.563.563	Sekretariat Jenderal
SK	Terwujudnya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Non ASN yang sesuai kriteria													
IKK	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN yang mendapatkan tunjangan atau bantuan tepat sasaran		persen	100	100	100	100	100						
7562.QEA	Bantuan Masyarakat													
7562.QEA .001	Guru TK/TKLB Non-ASN yang Menerima Tunjangan Profesi		Orang	71.588	199.441	199.441	199.441	199.441						
7562.QEA .002	Guru Dikdas Non-ASN yang Menerima Tunjangan Profesi		Orang	160.477	474.380	474.380	474.380	474.380						
7562.QEA .003	Guru Dikmen Non-ASN yang Menerima Tunjangan Profesi		Orang	103.131	189.788	189.788	189.788	189.788						
7562.QEA .004	Kepala Sekolah Non-ASN yang Menerima Tunjangan Profesi		Orang	57.606	57.606	57.606	57.606	57.606						
7562.QEA .005	Guru TK/TKLB Non ASN yang Menerima Tunjangan Khusus		Orang	891	891	891	891	891						

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7569.BMA.003	Produk Pengayaan Pendukung Literasi		Dokumen	413	620	620	620	620						
7569.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7569.QDC.003	Generasi Muda Terbina Program Literasi		Orang	18.290										
7569.QDC.004	Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik Terbina Program Literasi Kebahasaan		Orang		21.000	23.250	25.500	25.500						
7569.QGC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan													
7569.QGC.001	Satuan Pendidikan Terfasilitasi Layanan Pembinaan Bahasa		Lembaga		750	750	750	750						
7569.QMA	Data dan Informasi Publik													
7569.QMA.001	Karya Sastra yang Dialihwahanakan		Dokumen	34	50	50	50	50						
7569.QMA.003	Produk Penerjemahan		Dokumen	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310						
7569.QMA.004	Produk Kamus dan Pedoman Kebahasaan bagi Pelajar		Dokumen	2	2	3	3	3						
7570	Pembinaan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pusat							106.355	587.127	694.247	816.136	959.497	Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
SK	Meningkatnya guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal berkualitas yang merata													
IKK	Indeks Pemerataan Guru PAUD		Angka	36,88	31,88	26,88	21,88	16,88						
IKK	Persentase kabupaten/kota yang memiliki indeks pemerataan guru PAUD dan Pendidikan Nonformal minimal baik		persen	34,44	35,80	37,74	39,30	41,25						
IKK	Persentase guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi berbasis kebutuhan pembelajaran yang profesional		persen	1,70	9,81	17,94	26,09	27,23						
IKK	Persentase guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang meningkat jenjang karirnya		persen	21,83	37,38	52,93	68,48	84,03						
7570.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7570.BDC.001	Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang difasilitasi kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran		Orang	1.170	4.500	4.500	4.500	4.500						
7570.BDC.002	Pendidik PAUD Non Formal yang difasilitasi Kualifikasi S1/DIV		Orang	5.292										
7570.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7570.QDC.001	Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir		Orang	670	3.000	3.000	3.000	3.000						
7570.QDC.003	Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Memperoleh Penghargaan		Orang	76	76	76	76	76						
7570.QDC.010	Guru PAUD dan Pendidikan NonFormal yang difasilitasi Kualifikasi S1/DIV		Orang		35.410	35.410	35.410							
7570.QDC.011	Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang mendapatkan bimtek pendampingan pembelajaran		Orang	684	950	1.050	1.150	1.250						
7570.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah													
7570.UBA.001	Penataan Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal		Daerah	38	7	10	8	10						
7570.UBA.002	Fasilitasi Pemerataan Guru PAUD		Daerah		7	10	8	10						
7571	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan	Pusat							430.793	79.206	89.151	100.588	113.741	Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
SK	Meningkatnya pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan yang berkualitas													
IKK	Persentase SMK yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum		persen	39,02	41,00	43,12	45,25	47,50						

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pembelajaran													
7576	Kebijakan Penguatan Karakter	Pusat							51.868	65.472	75.292	86.586	99.574	Sekretariat Jenderal
SK	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter													
IKK	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan kebijakan penguatan karakter peserta didik di satuan pendidikan dengan kategori Membudaya		persen	10	25	45	60	70						
IKK	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan penguatan Karakter iklim keamanan di satuan pendidikan dengan kategori Membudaya		persen	10	25	45	60	70						
IKK	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan penguatan karakter inklusivitas di satuan pendidikan dengan kategori Membudaya		persen	5	15	25	40	50						
7576.QM B	Komunikasi Publik													
7576.QM B.004	Layanan penguatan karakter Peserta Didik		Layanan	6	8	8	8	8						
7576.QM B.005	Layanan Penguatan Karakter iklim keamanan satuan pendidikan		Layanan	3	4	4	4	4						
7576.QM B.006	Layanan Penguatan Karakter inklusivitas satuan pendidikan		Layanan	2	3	3	3	3						
7577	Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran	Pusat							374.227	451.126	475.719	502.293	530.545	Sekretariat Jenderal
SK	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan dalam pemanfaatan TIK untuk tujuan pembelajaran													
IKK	Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran		persen	16,56	17,07	17,52	17,91	18,27						
IKK	Persentase peningkatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam memanfaatkan Platform Digital Pendidikan		persen	30	40	50	60	70						
7577.AEE	Kemitraan													
7577.AEE .001	Mitra Layanan Platform Teknologi Sektor Pendidikan yang difasilitasi		Kesepakatan	6	6	6	6	6						
7577.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi													
7577.AEF. 001	Pengguna Layanan Platform Teknologi Pendidikan Terintegrasi yang di Bina		orang	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000						
7577.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan													
7577.UAB .007	Platform Digital Pendidikan		Sistem Informasi	5	5	6	6	7						
7578	Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik	Pusat							291.296	476.754	522.922	574.542	632.317	Sekretariat Jenderal
SK	Meningkatnya prestasi peserta didik pada tingkat Nasional dan Internasional													
IKK	Persentase peserta didik yang berprestasi		persen	0,4	0,55	0,7	0,85	1						
7578.BGC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan													
7578.BGC .001	Satuan Pendidikan yang di kembangkan prestasinya dalam kerangka MTN		Lembaga	500	550	550	550	550						
7578.QEN	Bantuan Peserta Didik													
7578.QEN .001	Peserta didik yang difasilitasi karir belajar untuk pengembangan prestasi		Orang	800	800	800	800	800						
7578.SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan													
7578.SCI. 001	Manajemen Talenta yang dikembangkan untuk Menjaring Minat, Bakat dan Prestasi		Orang	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150						
7578.SCI. 002	Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Sains, Riset, Teknologi, dan Inovasi		Orang	6.448	6.448	6.448	6.448	6.448						
7578.SCI. 003	Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Seni, Budaya, dan Literasi		Orang	4.762	4.762	4.762	4.762	4.762						
7578.SCI. 004	Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Olahraga		Orang	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825						
7578.SCI.	Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya		Orang	1.691	1.691	1.691	1.691	1.691						

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7601.RAA.293	SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran		Unit	149.506										
7602	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama	Pusat							1.361.831	280.571	288.988	297.658	306.588	Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
SK	Meningkatnya pembelajaran Sekolah Menengah Pertama yang berkualitas													
IKK	Persentase SMP yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum		persen	44,90	47,14	49,50	51,98	54,57						
IKK	Persentase SMP yang menerapkan kurikulum yang berlaku		persen	96,08	97,39	98,69	100	100						
IKK	Persentase SMP yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik		persen	62,93	65,95	72,38	73,86	75,74						
7602.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga													
7602.QDB.331	Kab/Kota yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter jenjang SMP		Lembaga	514	514	514	514	514						
7602.QDB.333	Kab/Kota yang Melaksanakan Program UKS jenjang SMP		Lembaga	514	514	514	514	514						
7602.QDB.338	Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan implementasi Kurikulum dan Model Pembelajaran yang berlaku jenjang SMP		Lembaga	514	514	514	514	514						
7602.QDB.380	Kab/kota yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu pada jenjang SMP		Lembaga	514	514	514	514	514						
7602.QDB.381	SMP yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran		Lembaga		4.357	4.357	4.357	4.357						
7602.RAA	Sarana Bidang Pendidikan													
7602.RAA.393	SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran		Unit	43.571										
7603	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas	Pusat							508.864	252.151	259.716	267.507	275.532	Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
SK	Meningkatnya pembelajaran Sekolah Menengah Atas yang berkualitas													
IKK	Persentase SMA yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum		persen	40,09	42,09	44,19	46,40	48,72						
IKK	Persentase SMA yang menerapkan kurikulum yang berlaku		persen	96,19	97,46	98,73	100	100						
IKK	Persentase SMA yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik		persen	61,93	62,73	63,53	64,33	65,13						
7603.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga													
7603.QDB.431	Prov/Kab/Kota yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter jenjang SMA		Lembaga	74	74	74	74	74						
7603.QDB.433	Prov/Kab/Kota yang Melaksanakan Program UKS jenjang SMA		Lembaga	74	74	74	74	74						
7603.QDB.438	Prov/Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan implementasi Kurikulum dan Model Pembelajaran yang berlaku jenjang SMA		Lembaga	74	74	74	74	74						
7603.QDB.480	Prov/Kab/kota yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu pada jenjang SMA		Lembaga	74	74	74	74	74						
7603.QDB.481	SMA yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran		Lembaga		1.487	1.487	1.487	1.487						
7603.RAA	Sarana Bidang Pendidikan													
7603.RAA.493	SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran		Unit	14.866										
7605	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	UPT							244.433	537.185	553.301	569.900	586.997	Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7611.PBH.001	Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan		Rekomendas i Kebijakan	15	16	17	18	18						
7611.PBH.002	Rapor Pendidikan yang dikembangkan		Rekomendas i Kebijakan	3	6	6	7	7						
7611.PBH.003	Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan		Rekomendas i Kebijakan	10	10	10	10	10						
7611.QMA	Data dan Informasi Publik													
7611.QMA.001	Sistem Informasi Standar dan Kebijakan Pendidikan		Data	1										
7611.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan													
7611.UAB.001	Sistem Informasi Standar dan Kebijakan Pendidikan		Sistem Informasi		1	1	1	1						
7614	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	UPT							822.260	2.698.576	3.402.999	4.154.570	4.830.385	Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
SK	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan													
IKK	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran		persen	1,49	3,13	4,93	6,92	9,1						
7614.DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan													
7614.DCI.003	Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran		Orang	11.073	12.144	13.358	14.694	16.163						
7614.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7614.QDC.011	Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran		Orang	17.945	19.740	21.714	23.885	26.274						
7614.SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan													
7614.SCI.010	Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah		Orang	5.000	5.500	6.050	6.655	7.321						
7614.SCI.011	Guru yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Literasi, Numerasi, dan Sains Teknologi		Orang	10.574	11.631	12.794	14.073	15.480						
7615	Pembinaan Guru Pendidikan Dasar	Pusat							117.740	691.883	797.441	924.972	1.069.891	Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
SK	Meningkatnya guru Dikdas berkualitas yang merata													
IKK	Indeks Pemerataan Guru Dikdas		Angka	16,51	15,26	14,01	12,76	11,51						
IKK	Persentase kabupaten/kota yang memiliki indeks pemerataan guru Dikdas minimal baik		persen	39,30	46,69	54,09	61,48	68,87						
IKK	Persentase guru Dikdas yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi berbasis kebutuhan pembelajaran yang profesional		persen	0,87	2,97	5,08	7,20	7,46						
IKK	Persentase guru Dikdas yang meningkat jenjang karirnya		persen	5,32	11,61	17,90	24,18	30,47						
7615.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7615.BDC.001	Guru Dikdas yang difasilitasi kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran		Orang	182	300	300	300	300						
7615.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7615.QDC.001	Guru Dikdas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir		Orang	9.593	40.441	40.441	40.441	40.441						
7615.QDC.003	Guru Dikdas yang Memperoleh Penghargaan		Orang	296	76	76	76	76						
7615.QDC.010	Guru Dikdas yang difasilitasi Kualifikasi S1/DIV		Orang		34.027	34.027	34.028							
7615.QDC.011	Guru Dikdas yang mendapatkan bimtek pendampingan pembelajaran		Orang	4.298	4.098	4.098	4.198	4.298						
7615.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah													
7615.UBA.001	Penataan Guru Dikdas		Daerah	38	38	38	38	38						
7615.UBA.002	Fasilitasi Pemerataan Guru Dikdas		Daerah		38	38	38	38						
7616	Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Pusat							91.688	298.737	353.436	406.451	467.419	Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK	Meningkatnya guru Dikmen dan Diksus berkualitas yang merata													
IKK	Indeks Pemerataan Guru Dikmen dan Diksus		Angka	23,29	21,29	19,29	17,29	15,29						
IKK	Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Dikmen dan Diksus minimal baik		persen	36,84	42,11	47.37	52,63	57,89						
IKK	Persentase guru Dikmen dan Diksus yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi berbasis kebutuhan pembelajaran yang profesional		persen	0,21	1,69	3,19	4,71	4,92						
IKK	Persentase guru Dikmen dan Diksus yang meningkat jenjang karirnya		persen	3,66	17,41	31,15	44,89	58,63						
7616.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7616.BDC .001	Guru Dikmen dan Diksus yang difasilitasi kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran		Orang	1.081	300	300	300	300						
7616.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7616.QDC .001	Guru Dikmen dan Diksus yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir		Orang	4.139	25.000	25.000	25.000	25.000						
7616.QDC .003	Guru Dikmen dan Diksus yang Memperoleh Penghargaan		Orang	114	114	114	114	114						
7616.QDC .010	Guru Dikmen dan Diksus yang difasilitasi Kualifikasi S1/DIV		Orang		8.136	8.136	8.136							
7616.QDC .011	Guru Dikmen dan Diksus yang mendapat bimtek pendampingan pembelajaran		Orang	900	700	800	900	1.000						
7616.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah													
7616.UBA .001	Penataan Guru Dikmen dan Diksus		Daerah	2	2	2	2	2						
7616.UBA .002	Fasilitasi Pemerataan Guru Dikmen dan Diksus		Daerah		2	2	2	2						
7617	Pendidikan Profesi Guru	Pusat							900.926	735.964	846.359	973.313	1.119.310	Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
SK	Meningkatnya guru profesional													
IKK	Persentase guru bersertifikat pendidik		persen	91,50	92,12	94,55	96,99	99,42						
7617.ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan													
7617.ABH .001	Fasilitasi pengembangan model-model inovasi PPG		Rekomendas i Kebijakan	3										
7617.PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan													
7617.PBH .001	Fasilitasi pengembangan model model inovasi PPG		Rekomendas i Kebijakan		2	2	2	2						
7617.PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM													
7617.PDI. 001	Guru yang difasilitasi proses Sertifikasi		Orang	788.075	34.558	72.744	72.744	72.745						
7618	Pembinaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan	Pusat							85.756	179.771	211.855	243.633	280.178	Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
SK	Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan berkualitas													
IKK	Persentase daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan minimal baik		persen	89,47	92,11	94,74	97,37	100						
IKK	Persentase tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya		persen	1,98	3,66	5,41	7,29	9,30						
IKK	Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti program peningkatan kompetensi berbasis pendampingan pembelajaran		persen	0,53	1,08	1,64	2,22	2,83						
7618.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7618.QDC .001	Tenaga Kependidikan yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir		Orang	295	250	260	280	300						
7618.QDC .002	Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Penghargaan		Orang	180	76	76	76	76						
7618.QDC .003	Kepala Sekolah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir		Orang	295										
7618.QDC .010	Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang mendapatkan Bimtek Pendidikan		Orang	500	600	700	800	1.000						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Bahasa dan Sastra													
IKK	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi		persen	11,55	23,1	34,66	46,21	57,76						
7567.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga													
7567.BDB .001	Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan		Lembaga	1.545	750	750	750	750						
7567.BDB .002	Komunitas Penggerak Literasi Terbina		Lembaga	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179						
7567.BMA	Data dan Informasi Publik													
7567.BMA .001	Istrumen Kemahiran Bahasa Indonesia yang Tersusun		Dokumen	7	7	7	7	7						
7567.PEG	Konferensi dan Event													
7567.PEG .001	Perhelatan Karya Kreatif Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan		Kegiatan		124	124	124	124						
7567.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7567.QDC .001	Penutur Bahasa Terbina		Orang	8.250	5.250	5.250	5.250	5.250						
7567.QDC .002	Penutur bahasa teruji		Orang	186.569	188.432	190.315	192.223	195.143						
7567.QDC .003	Generasi Muda Terbina Program Literasi		Orang		17.975	17.975	17.975	17.975						
7567.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat													
7567.QDD .001	Komunitas Literasi yang difasilitasi dan diapresiasi		Kelompok Masyarakat	100	100	100	100	100						
7567.QDD .002	Komunitas Sastra yang difasilitasi dan diapresiasi		Kelompok Masyarakat	100	100	100	100	100						
7567.QMA	Data dan Informasi Publik													
7567.QMA .003	Korpus Kebahasaan yang Dikembangkan		Dokumen	32	32	32	32	32						
7567.QMA .004	Produk Kodifikasi dan Pembakuan Bahasa		Dokumen	81	82	82	83	83						
7568	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pusat dan UPT							23.148	55.204	56.866	58.611	60.448	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
SK	Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA													
IKK	Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonsia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi													
IKK	a. Luar Negeri		persen	25	25,5	26	26,5	27						
IKK	b. Dalam Negeri		persen	55	55,5	56	56,5	57						
SK	Meningkatnya pemanfaatan bahan diplomasi kebahasaan di forum internasional													
IKK	Persentase bahan kebahasaan dan kesastraan yang dimanfaatkan di forum internasional		persen	22	32	42	52	62						
7568.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7568.BDC .001	Sastrawan Berkarya di Mancanegara		Orang		5	5	8	10						
7568.BMA	Data dan Informasi Publik													
7568.BMA .002	Fasilitasi Penerjemahan dan Penjurubahasaan		Dokumen	25	32	38	44	50						
7568.BMA .003	Bahan fasilitasi pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)		Dokumen	4	4	4	4	4						
7568.PEG	Konferensi dan Event													
7568.PEG .001	Perhelatan Karya Kreatif Diplomasi Kebahasaan		Kegiatan	1	1	1	1	1						
7568.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga													
7568.QDB .001	Lembaga Terfasilitasi Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)		Lembaga	387	387	418	449	480						
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi								3.880.409	6.656.960	7.016.761	7.809.968	8.461.166	
SP	Meningkatnya pembelajaran dan produktivitas Vokasi													
IKP 4.1.1	Persentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang		persen	13,42	14,00	14,61	15,25	15,91						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	bekerja/berwirausaha													
IKP 4.1.2	Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang bekerja/berwirausaha		persen	62,11	64,23	66,38	68,56	70,00						
7620	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Pusat							3.547.698	5.887.839	6.232.752	7.010.524	7.643.268	Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
SK	Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja													
IKK	Jumlah Lulusan SMK yang Meningkatkan Kompetensi Keahlian sesuai Kebutuhan Dunia Kerja		Orang	100.750	202.750	203.000	204.000	204.500						
IKK	Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran <i>link and match</i> dengan dunia kerja		persen	37	39	41	43	45						
SK	Terwujudnya layanan pendidikan SMK yang merata dan berkualitas													
IKK	Persentase SMK yang memenuhi SNP sarpras		persen	19,02	25,94	32,86	39,78	46,70						
7620.PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM													
7620.PDI.040	Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja		Orang	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000						
7620.PDI.041	Siswa SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri		Orang	750	2.750	3.000	4.000	4.500						
7620.PEC	Kerja Sama													
7620.PEC.001	Kerja Sama antara SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri		Kesepakatan	166	166	166	166	166						
7620.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga													
7620.QDB.007	SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan		Lembaga	1.178	150	125	125	112						
7620.QDB.042	SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan		Lembaga	250	750	750	750	750						
7620.QDB.051	SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (<i>Teaching Factory</i>)		Lembaga	450	500	500	500	500						
7620.QMA	Data dan Informasi Publik													
7620.QMA.001	Kompetensi SMK yang Selaras dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri		Dokumen	10	10	10	10	10						
7620.QMA.002	Data dan Informasi Telusur Alumni (<i>Tracer Study</i>) SMK		Dokumen	1	1	1	1	1						
7620.RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah													
7620.RBI.052	SMK yang di Revitalisasi		Unit	767	1.000	1.000	1.000	1.000						
7622	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Pusat							127.666	308.554	311.554	314.454	319.629	Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
SK	Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja													
IKK	Persentase peserta didik kursus yang mendapatkan keterampilan berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja		persen	17,83	19,02	20,35	21,81	23,42						
SK	Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja													
IKK	Jumlah Lembaga Kursus yang Meningkatkan Mutunya sesuai Kebutuhan Dunia Kerja		Lembaga	1.000	1.050	1.120	1.190	1.325						
7622.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga													
7622.QDB.001	Lembaga Kursus dan Pelatihan Berbasis Dunia Kerja		Lembaga	1.000										
7622.QDB.002	Lembaga Kursus yang ditingkatkan Tata Kelolanya		Lembaga		560	600	650	750						
7622.QDB.003	Lembaga Kursus yang ditingkatkan Kualitas Pembelajaran		Lembaga		490	520	540	575						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7622.QDB .004	Lembaga Kursus yang difasilitasi untuk bermitra dengan Instansi/Lembaga/Industri		Lembaga		50	55	60	65						
7622.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7622.QDC .003	Peserta didik kursus memperoleh peningkatan keterampilan melalui uji kompetensi		Orang		1.150	1.300	1.450	1.700						
7622.QDC .U01	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja		Orang	11.790	13.528	15.031	16.534	18.272						
7622.QDC .U02	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha		Orang	7.909	9.019	10.021	11.023	12.133						
7623	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	UPT							205.045	460.567	472.455	484.990	498.269	Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
SK	Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi													
IKK	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja		persen	19,33	22,43	25,81	29,47	33,4						
IKK	Jumlah satuan pendidikan vokasi yang meningkat mutunya		Lembaga	2.754	3.754	4.754	5.754	6.754						
IKK	Jumlah model pembelajaran vokasi hasil kerja sama mitra dunia kerja yang diterapkan oleh satuan pendidikan vokasi		Model	14	28	34	40	47						
7623.PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan													
7623.PBH .001	Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja		Rekomendas i Kebijakan	14	28	35	42	49						
7623.PEC	Kerja sama													
7623.PEC. 001	Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja		Kesepakatan	105	105	105	105	105						
7623.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga													
7623.QDB .001	Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi		Lembaga	2.754	3.754	4.754	5.754	6.754						
7623.RAA	Sarana Bidang Pendidikan													
7623.RAA. 001	Sarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)		Paket	7	7	7	7	7						
7623.RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah													
7623.RBI. 001	Prasarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)		Unit	7	7	7	7	7						
7623.SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan													
7623.SCI. 001	Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja		Orang	3.036	6.072	6.072	6.072	6.072						
7623.SCI. 002	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti <i>Upskilling</i> dan <i>Reskilling</i> Berstandar Industri		Orang	6.913	17.623	17.623	17.623	17.623						
7623.SCI. 004	Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan		Orang	265	530	530	530	530						
WA	Program Dukungan Manajemen								4.216.889	5.746.449	6.278.623	6.995.550	7.832.573	
SP	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian													
IKP 5.1.1	Indeks Reformasi Hukum		Predikat	Istimewa	Istimewa	Istimewa	Istimewa	Istimewa						
IKP 5.1.2	Indeks Pelayanan Publik Kementerian		Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Pelayanan Prima	Pelayanan Prima	Pelayanan Prima						
IKP 5.1.3	Indeks Sistem Merit		Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
IKP 5.1.4	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General		Predikat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
IKP 5.1.5	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian		Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
IKP 5.1.6	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian		Predikat	BB	BB	BB	A	A						
IKP 5.1.7	Predikat Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian		Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 5.1.8	Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal 75		Nilai	80	83	86	89	92						
IKP 5.1.9	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian		Nilai	93,85	93,90	93,95	94,00	94,05						
IKP 5.1.10	Indeks Kepuasan Masyarakat		Kategori	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik						
IKP 5.1.11	Indeks SPBE Kementerian		Indeks	4,0	1,7	1,8	1,9	2,0						
IKP 5.1.12	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian		Indeks	2,41	2,66	2,79	2,91	3,05						
IKP 5.1.13	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian		Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
IKP 5.1.14	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi		Nilai	3,351	3,400	3,500	3,700	4,000						
IKP 5.1.15	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan/Pemeriksaan		persen	71	72	73	74	75						
IKP 5.1.16	Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM		persen	37	39	41	43	45						
IKP 5.1.17	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal		Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
IKP 5.1.18	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal		Predikat	AA	AA	AA	AA	AA						
IKP 5.1.19	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru		Predikat	A	A	A	A	A						
IKP 5.1.20	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru		Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
IKP 5.1.21	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah		Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
IKP 5.1.22	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah		Predikat	A	A	A	A	AA						
IKP 5.1.23	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus		Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
IKP 5.1.24	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus		Predikat	A	AA	AA	AA	AA						
IKP 5.1.25	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan		Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
IKP 5.1.26	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan		Predikat	A	A	AA	AA	AA						
IKP 5.1.27	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa		Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
IKP 5.1.28	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa		Predikat	A	A	A	A	AA						
7565	Pengelolaan Pengembangan Pendidikan, Sains, dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara	Pusat							41.229	43.888	46.097	48.412	50.837	Sekretariat Jenderal
SK	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Pengembangan Pendidikan, Sains, dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara													
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran SEAMEO dengan kategori Sangat Baik		Kategori	-	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
7565.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7565.EBA.956	Layanan BMN		Dokumen	1	1	1	1	1						
7565.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	1	1	1	1	1						
7565.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1						
7565.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7565.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit											
7565.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		Unit											
7574	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	Pusat							466.456	547.360	598.619	655.380	718.251	Ditjen Pendidikan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus													Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus													
IKK	Persentase satuan kerja di Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus yang mendapatkan Nilai Kinerja Anggaran sangat baik		persen	80	90	100	100	100						
IKK	Persentase satuan kerja di Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus yang memiliki predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A		persen	80	90	100	100	100						
7574.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7574.EBA.956	Layanan BMN		Layanan	72	72	72	72	72						
7574.EBA.957	Layanan Hukum		Layanan	19	19	19	19	19						
7574.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	30	30	30	30	30						
7574.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	1	1	1	1	1						
7574.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	12	12	12	12	12						
7574.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		Layanan	1	1	1	1	1						
7574.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	12	12	12	12	12						
7574.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7574.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit	1	1	1	1	1						
7574.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		Unit	1	1	1	1	1						
7575.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal													
7574.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		Orang	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636						
7574.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
7574.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Dokumen	13	13	13	13	13						
7574.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen	23	23	23	23	23						
7574.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen	12	12	12	12	12						
7579	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum	Pusat							26.254	34.638	39.119	44.237	50.087	Sekretariat Jenderal
SK	Meningkatnya efektivitas layanan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pemberian advokasi hukum di lingkungan Kementerian serta tata kelola Biro Hukum													
IKK	Persentase penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah diharmonisasi		persen	60	70	80	90	100						
IKK	Jumlah penanganan permasalahan hukum dan perkara yang diselesaikan		Dokumen	30	35	40	45	50						
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Hukum minimal A		Predikat	A	A	A	A	A						
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Hukum dengan kategori Sangat Baik		Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
7579.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7579.EBA.956	Layanan BMN		Dokumen	1	1	1	1	1						
7579.EBA.957	Layanan Hukum		Layanan	1	1	1	1	1						
7579.EBA	Layanan Umum		Layanan	1	1	1	1	1						

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	dan barang milik negara Kementerian, serta tata kelola Biro Keuangan dan BMN													
IKK	Persentase Satker Tertib Pengelolaan Anggaran		persen	91,0	91,5	92,0	92,5	93,0						
IKK	Persentase Jumlah Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku		persen	100	100	100	100	100						
IKK	Indeks Penilaian Mandiri atas Pengelolaan Aset Kementerian		Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Keuangan dan BMN dengan kategori Sangat Baik		Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Keuangan dan BMN minimal A		Predikat	A	A	A	A	A						
7581.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7581.EBA.956	Layanan BMN		Dokumen	2	2	2	2	2						
7581.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	1	1	1	1	1						
7581.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1						
7581.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7581.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit	153	160	35	35	35						
7581.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
7581.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen	33	21	24	24	24						
7581.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan													
7581.FAB.001	Sistem Informasi Tata Kelola Keuangan dan BMN		Sistem Informasi	1	1	1	1	1						
7581.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara													
7581.FAH.001	Pelaporan Akuntansi dan Keuangan		Dokumen	30										
7581.FAH.001	Layanan Pelaporan Akuntansi dan Keuangan		Layanan		1	1	1	1						
7581.FAH.002	Pelaporan Manajemen BMN		Dokumen	9										
7581.FAH.002	Layanan Pelaporan Manajemen BMN		Layanan		1	1	1	1						
7582	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Kerja Sama	Pusat							121.502	208.520	225.623	244.742	266.020	Sekretariat Jenderal
SK	Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Penganggaran, Akuntabilitas Kinerja, Fasilitasi Kerja Sama, serta tata kelola Biro Perencanaan dan Kerja Sama													
IKK	Persentase Unit Kerja dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal BB		persen	70	73	76	80	82						
IKK	Persentase Satuan Kerja dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik		persen	90	92	94	96	98						
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Perencanaan dan Kerja Sama dengan kategori Sangat Baik		Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
IKK	Persentase Satker Pusat dengan Predikat Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional minimal baik		persen	80	85	90	95	100						
IKK	Persentase Kerja Sama Bilateral, Multilateral, dan Nasional yang Ditindaklanjuti		persen	81	83	85	87	89						
IKK	Persentase Fasilitasi Internasional yang Ditindaklanjuti		persen	81	83	85	87	89						
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perencanaan dan Kerja Sama minimal A		Predikat	A	A	A	AA	AA						
7582.AEC	Kerja Sama													
7582.AEC.001	Kerja sama Bidang Pendidikan		Kesepakatan	1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7582.AEC.002	Layanan Kesekretariatan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO		Kesepakatan	1	1	1	1	1						
7582.BAH	Pelayanan Publik Lainnya													
7582.BAH.002	Layanan Delegasi Wakil Tetap (Dewatap) RI untuk UNESCO dan Atdikbud		Layanan	21	21	21	21	21						
7582.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7582.EBA.956	Layanan BMN		Layanan	1	22	22	22	22						
7582.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	1	1	1	1	1						
7582.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	22	22	22	22	22						
7582.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7582.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Paket	22	22	22	22	22						
7582.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		Unit											
7582.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan													
7582.FAB.001	Sistem Informasi bidang Perencanaan dan Penganggaran		Sistem Informasi	1	1	1	1	1						
7582.FAD	Perencanaan dan Penganggaran													
7582.FAD.001	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Pusat Bidang Pendidikan		Dokumen	54	54	54	54	54						
7582.FAD.002	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Transfer Daerah Bidang Pendidikan		Dokumen	4	4	4	4	4						
7582.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan													
7582.FAE.001	Akuntabilitas Kinerja		Laporan	18	18	18	18	18						
7582.FAE.002	Laporan Pemantauan dan Evaluasi		Laporan	36	36	36	36	36						
7583	Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa	Pusat							352.091	479.227	532.306	591.458	657.544	Sekretariat Jenderal
SK	Meningkatnya Tata Kelola Layanan Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa													
IKK	Persentase Pengelolaan PBJ Kementerian		persen	80	82,5	85	87,5	90						
IKK	Persentase Unit Pengolah yang Melaksanakan Arsip Digital		persen	35	50	65	80	100						
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa dengan kategori Sangat Baik		Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa minimal A		Predikat	A	A	A	A	A						
7583.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7583.EBA.001	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa		Layanan	1	1	1	1	1						
7583.EBA.956	Layanan BMN		Dokumen	44	44	44	44	44						
7583.EBA.959	Layanan Protokoler		Layanan	1	1	1	1	1						
7583.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	1	1	1	1	1						
7583.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1						
7583.EBB	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7583.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit	1	1	1	1	1						
7583.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		Unit	1	1	1	1	1						
7583.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
7583.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		Dokumen	1	1	1	1	1						
7583.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan													
7583.FAB.001	Sistem Informasi Bidang Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa		Sistem Informasi	1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7584	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Komunikasi dan Kehumasan	Pusat							103.638	104.926	116.604	128.291	139.988	Sekretariat Jenderal
SK	Meningkatnya layanan Prima di Bidang Komunikasi dan Kehumasan													
IKK	Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Terpadu		Kategori	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
IKK	Predikat keterbukaan informasi publik		Predikat	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif						
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat dengan kategori Sangat Baik		Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat minimal BB		Predikat	A	A	A	A	A						
7584.BAH	Pelayanan Publik Lainnya													
7584.BAH.001	Layanan Terpadu Kementerian		Layanan	1	1	1	1	1						
7584.BMB	Komunikasi Publik													
7584.BMB.001	Layanan Media dan Komunikasi Publik		Layanan	1										
7584.BMB.001	Layanan Media dan Komunikasi Publik		Dokumen		112	134	156	178						
7584.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7584.EBA.956	Layanan BMN		Dokumen	1	1	1	1	1						
7584.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	1	1	1	1	1						
7584.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	1	1	1	1	1						
7584.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1						
7584.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7584.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit	7	7	7	7	7						
7584.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan													
7584.FAB.001	Sistem Informasi kehumasan bidang Pendidikan		Sistem Informasi	7	7	7	7	7						
7585	Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan	Pusat							302.940	361.606	391.508	424.954	457.194	Sekretariat Jenderal
SK	Meningkatnya integritas data, pendayagunaan data pokok pendidikan, dan pemanfaatan TIK, serta tata kelola Pusat Data dan Teknologi Informasi													
IKK	Persentase kualitas data pendidikan		persen	85	87	90	92	95						
IKK	Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok pendidikan		persen	30	45	60	75	90						
IKK	Persentase Unit Utama yang mengimplementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi		persen	20	30	50	70	90						
IKK	Persentase kualitas layanan OLA (Operational Level Agreement) jaringan intra kementerian		persen	98,50	98,75	99,00	99,25	99,50						
IKK	Persentase rekomendasi yang diterbitkan berdasarkan usulan clearance TIK		persen	98,00	98,50	99,00	99,25	99,50						
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi dengan kategori Sangat Baik		Kategori	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik						
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Data dan Teknologi Informasi minimal A		Predikat	A	A	A	AA	AA						
7585.BMA	Data dan Informasi Publik													
7585.BMA.001	Pengelolaan SPBE Kementerian		Dokumen	1	2	2	3	4						
7585.BMA.002	Keamanan Informasi Kementerian		Dokumen	1	2	2	3	4						
7585.BMA.003	Integrasi Data Pendidikan dan Layanan Pendidikan		Dokumen	1	2	3	3	4						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7585.BMA.004	Integrasi Data Kebahasaan		Dokumen	1	2	3	3	4						
7585.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi													
7585.CAN.001	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit	1	2	2	3	3						
7585.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7585.EBA.956	Layanan BMN		Dokumen	2	2	2	2	2						
7585.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	4	4	4	4	4						
7585.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		Dokumen	1	1	1	1	1						
7585.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	2	2	2	2	2						
7585.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7585.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Paket	2	2	2	2	2						
7585.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		Paket	2	2	2	2	2						
7585.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal													
7585.EBC.001	SDM yang mendapatkan layanan pembinaan jabatan fungsional pengembangan teknologi pembelajaran		Orang	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250						
7585.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan													
7585.FAB.001	Sistem Informasi Layanan Pendidikan Bidang Penyediaan Data, Statistik, dan Layanan Pendidikan		Sistem Informasi		1	1	1	1						
7585.QMA	Data dan Informasi Publik													
7585.QMA.001	Data dan Informasi Pendidikan		Dokumen	1	1	1	1	1						
7586	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana	Pusat							1.807					Sekretariat Jenderal
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Organisasi dan Tata Laksana													
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Organisasi dan Tata Laksana		Kategori	Baik										
7586.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7586.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	4										
7586.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	1										
7586.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	1										
7586.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7586.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit	1										
7586.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
7586.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen	1										
7586.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		Dokumen	6										
7586.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan													
7586.FAB.001	Sistem Informasi Organisasi dan Tata Laksana		Sistem Informasi	1,00										
7587	Pengelolaan Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik	Pusat							27.281	33.031	35.326	37.801	39.574	Sekretariat Jenderal
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Prestasi Nasional													
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Prestasi Nasional dengan kategori Sangat Baik		Kategori	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik						
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Prestasi Nasional minimal A		Predikat	A	A	A	A	A						
7587.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7587.EBA.956	Layanan BMN		Layanan	1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7587.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	2	2	2	2	2						
7587.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	3	3	3	3	3						
7587.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7587.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit	3	3	3	3	2						
7588	Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter	Pusat							10.311	10.330	10.846	11.387	11.955	Sekretariat Jenderal
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter													
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penguatan Karakter dengan kategori Sangat Baik		Kategori	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik						
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Penguatan Karakter minimal BB		Predikat	BB	BB	A	A	A						
7588.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7588.EBA.956	Layanan BMN		Dokumen	2	2	2	2	2						
7588.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	1	1	1	1	1						
7588.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1						
7588.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7588.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit	13	27	15	16	17						
7588.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		Unit											
7589	Layanan Pembiayaan Pendidikan	Pusat							75.667	100.470	158.253	165.792	172.527	Sekretariat Jenderal
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan													
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dengan kategori Sangat Baik		Kategori	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik						
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB		Predikat	A	A	A	A	A						
7589.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7589.EBA.956	Layanan BMN		Dokumen	2	2	2	2	2						
7589.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	2	2	2	2	2						
7589.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	2	2	2	2	2						
7589.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7589.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit	5	5	5	5	5						
7589.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal													
7589.EBC.001	Beasiswa Unggulan		Orang	437	483	639	765	865						
7589.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
7589.EBD.001	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen		4	4	4	4						
7590	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Pusat							145.095	172.262	172.364	172.424	172.484	Sekretariat Jenderal
SK	Meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN melalui Penyelenggaraan Layanan Pelatihan secara Terintegrasi, serta tata kelola Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia													
IKK	Nilai pengembangan kompetensi Pegawai ASN yang dilaksanakan secara terintegrasi (<i>Corporate University</i>) Minimal 81		Nilai	81	82,5	84	85,5	87						
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia dengan kategori Sangat Baik		Kategori	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik						
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi		Predikat	A	A	A	A	AA						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pemerintah Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Minimal A													
7590.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7590.EBA .956	Layanan BMN		Dokumen	1	1	1	1	1						
7590.EBA .962	Layanan Umum		Layanan	1	1	1	1	1						
7590.EBA .994	Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1						
7590.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7590.EBB .951	Layanan Sarana Internal		Unit	141	822	822	822	822						
7590.EBB .971	Layanan Prasarana Internal		Unit	7	7	7	7	7						
7590.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal													
7590.EBC .996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		Orang	719	1.120	1.120	1.120	1.120						
7590.EBC .997	Layanan Pelatihan Teknis, Fungsional, PPPK dan LKM		Orang	14.268	14.800	14.800	14.800	14.800						
7590.EBC .998	Layanan Penyusunan Desain Program dan Perangkat Pembelajaran Pelatihan		Rekomendasi	4	4	4	4	4						
7591	Penguatan Pengawasan Inspektorat I	Pusat							11.685	15.138	17.408	20.020	23.023	Inspektorat Jenderal
SK	Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I													
IKK	Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,300 di wilayah kerja Inspektorat I		persen	100	100	100	100	100						
SK	Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Internal di Wilayah Kerja Inspektorat I													
IKK	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan di Wilayah Kerja Inspektorat I		persen	71	72	73	74	75						
SK	Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I													
IKK	Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I		persen	25	27	29	33	37						
7591.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
7591.EBD .001	Layanan Reviu Inspektorat I		Laporan	10	10	10	10	10						
7591.EBD .002	Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat I		Laporan	1	1	1	1	1						
7591.EBD .003	Layanan Pengawasan WBK/WBBM Inspektorat I		Laporan	4	4	4	4	4						
7591.EBD .004	Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat I		Laporan	22	21	21	21	21						
7591.EBD .005	Layanan Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat I		Laporan		1	1	1	1						
7592	Penguatan Pengawasan Inspektorat II	Pusat							11.685	19.505	21.971	24.775	27.966	Inspektorat Jenderal
SK	Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II													
IKK	Persentase satker yang mendapatkan nilai dalam Maturitas SPIP minimal 3,300 di wilayah kerja Inspektorat II		persen	100	100	100	100	100						
SK	Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Internal di Wilayah Kerja Inspektorat II													
IKK	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan di Wilayah Kerja Inspektorat II		persen	71	72	73	74	75						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7594.EBA.001	Pencegahan Korupsi dan Penanganan Kekerasan		Dokumen	2	2	2	2	2						
7594.EBA.002	Layanan Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI		Laporan	5	5	5	5	5						
7594.EBA.956	Layanan BMN		Dokumen	4	4	4	4	4						
7594.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Dokumen	10	10	10	10	10						
7594.EBA.962	Layanan Umum		Dokumen	20	20	20	20	20						
7594.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		Dokumen	4	4	4	4	4						
7594.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	24	24	24	24	24						
7594.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7594.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Paket	5	5	5	5	5						
7594.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal													
7594.EBC.001	Layanan Pengembangan Kompetensi Pegawai		Orang	355	355	355	355	355						
7594.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		Orang	355	355	355	355	355						
7594.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
7594.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen	5	5	5	5	5						
7594.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen	24	24	24	24	24						
7594.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan													
7594.FAB.001	Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Terpadu Itjen		Sistem Informasi	1	1	1	1	1						
7606	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Pusat							1.014.380	1.408.216	1.450.463	1.493.977	1.538.796	Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen													
IKK	Persentase Satuan Kerja di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik		persen	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00						
IKK	Persentase Satuan Kerja Di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang memiliki predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A		persen	97,02	97,03	97,04	97,04	97,05						
7606.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7606.EBA.956	Layanan BMN		Dokumen	80	80	80	80	80						
7606.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	14	14	14	14	14						
7606.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	1	1	1	1	1						
7606.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	39	39	39	39	39						
7606.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	39	39	39	39	39						
7606.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7606.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit		39	39	39	39						
7606.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		Unit	39	39	39	39	39						
7606.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal													
7606.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		Orang	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500						
7606.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
7606.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Dokumen	30	30	30	30	30						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7606.EBD .953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen	47	47	47	47	47						
7606.EBD .955	Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen	26	26	26	26	26						
7612	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan	Pusat							147.994	190.985	217.708	248.343	283.472	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan													
IKK	Persentase Satuan Kerja di Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik		persen	83,33	83,33	100	100	100						
IKK	Persentase Satuan Kerja di Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A		persen	83,33	100	100	100	100						
7612.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi													
7612.CAN .051	Layanan Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit		1	1	1	1						
7512.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7612.EBA .956	Layanan BMN		Dokumen	2	2	2	2	2						
7612.EBA .957	Layanan Hukum		Layanan	1	1	1	1	1						
7612.EBA .958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Dokumen	12	12	12	12	12						
7612.EBA .960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Dokumen	1	1	1	1	1						
7612.EBA .962	Layanan Umum		Layanan	6	6	6	6	6						
7612.EBA .963	Layanan Data dan Informasi		Dokumen	1	1	1	1	1						
7612.EBA .994	Layanan Perkantoran		Layanan	6	6	6	6	6						
7612.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7612.EBB .951	Layanan Sarana Internal		Unit	1	1	1	1	1						
7612.EBB .971	Layanan Prasarana Internal		Unit	1	1	1	1	1						
7612.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal													
7612.EBC .954	Layanan Manajemen SDM		Orang	490	490	490	490	490						
7612.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
7612.EBD .953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen	8	8	8	8	8						
7612.EBD .955	Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen	16	16	16	16	16						
7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Pusat							301.927	491.363	373.057	382.642	393.319	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
SK	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa													
IKK	Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik		persen	95	96	97	98	99						
IKK	Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A		persen	100	100	100	100	100						
7613.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7613.EBA .956	Layanan BMN		Dokumen	59	59	59	59	59						
7613.EBA	Layanan hubungan masyarakat dan informasi		Dokumen	42	42	42	42	42						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
.958														
7613.EBA.959	Layanan protokoler		Dokumen	31	1	1	1	1						
7613.EBA.960	Layanan organisasi dan tata kelola internal		Dokumen	34	34	34	34	34						
7613.EBA.962	Layanan umum		Layanan	34	34	34	34	34						
7613.EBA.963	Layanan data dan informasi		Dokumen	34	34	34	34	34						
7613.EBA.994	Layanan perkantoran		Layanan	34	34	34	34	34						
7613.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7613.EBB.951	Layanan sarana internal		Unit	3	2.769									
7613.EBB.971	Layanan prasarana internal		Unit	1	25.563									
7613.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal													
7613.EBC.954	Layanan manajemen SDM		Orang	1.155	1.125	1.125	1.125	1.125						
7613.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
7613.EBD.952	Layanan perencanaan dan penganggaran		Dokumen	39	9	9	9	9						
7613.EBD.953	Layanan pemantauan dan evaluasi		Dokumen	37	7	7	7	7						
7613.EBD.955	Layanan manajemen keuangan		Dokumen	272	272	272	272	272						
7613.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		Dokumen		1	1	1	1						
7613.EBD.974	Layanan penyelenggaraan kearsipan		Dokumen	10	34	34	34	34						
7619	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru	Pusat							862.942	1.287.344	1.609.180	2.011.475	2.514.344	Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru													
IKK	Persentase satker di Ditjen GTK dan PG yang memiliki predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A		persen	82,50	85,00	87,50	90,00	92,50						
IKK	Persentase satker di Ditjen GTK dan PG dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik		persen	77,50	82,50	87,50	92,50	97,50						
7619.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi													
7619.CAN.001	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit	1	1	1	1	1						
7619.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7619.EBA.956	Layanan BMN		Layanan	39	40	40	40	40						
7619.EBA.957	Layanan Hukum		Layanan	39	40	40	40	40						
7619.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	1	1	1	1	1						
7619.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	1	1	1	1	1						
7619.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	39	40	40	40	40						
7619.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		Layanan	1	1	1	1	1						
7619.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	40	40	40	40	40						
7619.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7619.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit	1	1	1	1	1						
7619.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		Unit	1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7619.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal													
7619.EBC .954	Layanan Manajemen SDM		Layanan	1	1	1	1	1						
7619.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
7619.EBD .952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Layanan	1	1	1	1	1						
7619.EBD .953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Laporan	39	40	40	40	40						
7619.EBD .955	Layanan Manajemen Keuangan		Layanan	1	1	1	1	1						
7619.EBD .961	Layanan Reformasi Kinerja		Dokumen	1	1	1	1	1						
7619.EBD .974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		Layanan	1	1	1	1	1						
7683	Penguatan Audit Investigasi	Pusat							8.568	10.653	12.251	14.089	16.202	Inspektorat Jenderal
SK	Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN													
IKK	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		persen	100	100	100	100	100						
SK	Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Investigasi													
IKK	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi		persen	71	72	73	74	75						
7683.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
7683.EBD .001	Layanan Penerapan Strategi Anti Fraud		Laporan	2										
7683.EBD .002	Layanan Penanganan Pengaduan		Laporan	67	71	71	71	71						
7683.EBD .003	Layanan tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi		Laporan		1	1	1	1						

Lampiran 2: Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga

Kode	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
04.01.01	Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	36,61	36,74	36,86	36,99	37,11	73.907	427.783	482.046	540.053	606.333						73.907	427.783	482.046	540.053	606.333
04.01.01.02	Penyediaan bantuan afirmatif untuk PAUD							73.907	427.783	482.046	540.053	606.333						73.907	427.783	482.046	540.053	606.333
04.01.02	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas (PHTC)	Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	31,14	35,6	40,07	44,53	49	16.978.633	41.758.786	60.463.599	62.756.489	64.950.265						16.978.633	41.758.786	60.463.599	62.756.489	64.950.265
04.01.02.01	Revitalisasi Prasarana Pendidikan dan Pembangunan Satuan Pendidikan Baru (PHTC)							16.978.633	41.758.786	60.463.599	62.756.489	64.950.265						16.978.633	41.758.786	60.463.599	62.756.489	64.950.265
04.01.03	Penyaluran Bantuan Pendidikan yang Tepat Sasaran	Rasio APK SMA/SMK/MA/Sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya	0,788	0,794	0,799	0,804	0,809	10.130.426	12.438.220	13.390.203	14.059.713	14.571.280						10.130.426	12.438.220	13.390.203	14.059.713	14.571.280
04.01.03.02	Penyediaan bantuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah bagi peserta didik kurang mampu							10.130.426	12.438.220	13.390.203	14.059.713	14.571.280						10.130.426	12.438.220	13.390.203	14.059.713	14.571.280
04.01.04	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal	496.810	993.620	1.720.430	2.217.240	2.714.050	280.554	768.838	797.516	828.411	861.722						280.554	768.838	797.516	828.411	861.722
04.01.04.01	Pembinaan dalam Pencegahan Anak Tidak Sekolah							179.388	300.956	323.665	348.411	375.390						179.388	300.956	323.665	348.411	375.390
04.01.04.02	Penanganan Anak Tidak Sekolah							101.166	467.882	473.851	480.000	486.332						101.166	467.882	473.851	480.000	486.332
04.02.01	Pengembangan Inovasi Pembelajaran dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Penerapan Pedagogi Modern (PTCK)	Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran	16,56	17,07	17,52	17,91	18,27	8.957.270	858.261	891.244	925.630	961.480						8.957.270	858.261	891.244	925.630	961.480
04.02.01.01	Pemanfaatan platform digital pembelajaran dalam peningkatan kompetensi							8.957.270	858.261	891.244	925.630	961.480						8.957.270	858.261	891.244	925.630	961.480
04.02.02	Penciptaan Ekosistem Satuan	Persentase satuan pendidikan formal dan	36,3	54,46	72,61	90,76	100	178.347	554.665	618.426	691.194	774.291						178.347	554.665	618.426	691.194	774.291

Kode	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Pendidikan yang Mendukung Proses Pembelajaran Berkualitas, termasuk Peningkatan Kecakapan Literasi Kelas Awal, serta Penguatan Karakter dan Wellbeing Peserta Didik dan Pendidik	nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar																				
04.02.02.01	Penguatan Pendidikan Karakter yang dilaksanakan pada satuan pendidikan bagi peserta didik dan pendidik							70.863	385.058	442.816	509.241	585.625						70.863	385.058	442.816	509.241	585.625
04.02.02.02	Peningkatan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan ASN maupun non ASN dalam bentuk finansial dan nonfinansial							78.840	117.835	121.735	125.829	130.132						78.840	117.835	121.735	125.829	130.132
04.02.02.03	Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi peserta didik							73.907	427.783	482.046	540.053	606.333						73.907	427.783	482.046	540.053	606.333
04.02.03	Pemantapan Sistem Asesmen Komprehensif	Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional:						466.037	559.906	603.234	641.129	683.357						466.037	559.906	603.234	641.129	683.357
		a. Literasi Membaca	68,62	70,62	72,62	74,62	76,62															
		b. Numerasi	67,35	69,35	71,35	73,35	75,35															
04.02.03.02	Pelaksanaan Asesmen dan Pengujian Pendidikan							424.010	494.191	532.660	565.216	601.568						424.010	494.191	532.660	565.216	601.568
04.02.03.03	Pengembangan Kebijakan dan Model Asesmen Pendidikan							42.027	65.715	70.574	75.913	81.789						42.027	65.715	70.574	75.913	81.789
04.02.04	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif (PAUD-HI)	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan PAUD-HI	64,79	79,38	93,97	100	100	40.600	68.660	71.670	74.899	78.369						40.600	68.660	71.670	74.899	78.369
04.02.04.01	Penguatan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan PAUD-HI							33.824	58.951	60.719	62.541	64.417						33.824	58.951	60.719	62.541	64.417

Kode	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
04.02. 04.02	Penguatan pendidikan, pengasuhan, peningkatan gizi dan pelayanan kesehatan anak usia dini							6.776	9.709	10.951	12.358	13.952						6.776	9.709	10.951	12.358	13.952
04.02. 06	Penerapan kurikulum yang Kontekstual Berpusat pada Peserta Didik serta Fokus pada Karakter dan Kompetensi Esensial	Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial	87,96	91,98	96	100	100	196.321	261.470	286.852	315.702	348.530						196.321	261.470	286.852	315.702	348.530
04.02. 06.01	Penyediaan buku dan bahan ajar yang berkualitas							74.278	84.518	96.247	109.688	125.096						74.278	84.518	96.247	109.688	125.096
04.02. 06.02	Pengembangan kurikulum dan model pembelajaran yang adaptif							67.192	76.939	88.259	101.265	116.210						67.192	76.939	88.259	101.265	116.210
04.02. 06.03	Penerapan kurikulum dan model pembelajaran adaptif							54.851	100.013	102.346	104.749	107.224						54.851	100.013	102.346	104.749	107.224
04.02. 08	Revitalisasi Pendidikan Nonformal	Persentase satuan pendidikan nonformal yang meningkat mutu pembelajarannya	24,43	26,85	29,28	31,7	34,12	36.605	46.214	53.146	61.117	70.285						36.605	46.214	53.146	61.117	70.285
04.02. 08.01	Penyediaan Layanan Pendidikan Nonformal							18.361	25.233	29.018	33.370	38.376						18.361	25.233	29.018	33.370	38.376
04.02. 08.02	Penguatan lembaga pendidikan nonformal							18.244	20.981	24.128	27.747	31.909						18.244	20.981	24.128	27.747	31.909
04.04. 01	Reformasi Pendidikan melalui Penguatan LPTK dan Revitalisasi Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal	71,5	85,06	85,96	86,87	87,77	864.570	735.964	846.359	973.313	1.119.310						864.570	735.964	846.359	973.313	1.119.310
04.04. 01.01	Revitalisasi LPTK dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan PPG								70.509	81.085	93.248	107.235							70.509	81.085	93.248	107.235
04.04. 01.02	Peningkatan kualitas pendidik melalui sertifikasi profesi							864.570	665.455	765.274	880.065	1.012.075						864.570	665.455	765.274	880.065	1.012.075
04.04. 02	Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru meliputi Formasi, Rekrutmen, Pengangkatan dan Penempatan,	Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki indeks pemerataan guru dengan kategori baik	40,22	47,83	55,25	62,68	70,11	13.199.505	32.932.254	34.208.670	35.216.916	36.174.490						13.199.505	32.932.254	34.208.670	35.216.916	36.174.490

Kode	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Mobilitas, Pembinaan Karier Profesional (e.g. Pelatihan, In-service Training), Perlindungan Hukum, dan Kesejahteraan Berbasis Kinerja																					
04.04.02.01	Pemenuhan dan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan							60.006	127.412	150.724	184.456	222.507						60.006	127.412	150.724	184.456	222.507
04.04.02.02	Pemenuhan Kesejahteraan Afirmatif Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam memenuhi Kekurangan Guru							563.514	710.844	765.005	796.719	830.018						563.514	710.844	765.005	796.719	830.018
04.04.02.04	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan							679.120	2.325.853	2.979.888	3.668.395	4.271.686						679.120	2.325.853	2.979.888	3.668.395	4.271.686
04.04.02.06	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berbasis Kinerja							11.773.477	29.540.150	30.038.210	30.236.731	30.453.344						11.773.477	29.540.150	30.038.210	30.236.731	30.453.344
04.04.02.07	Pendampingan Pembelajaran untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan							123.388	227.995	274.843	330.615	396.935						123.388	227.995	274.843	330.615	396.935
04.05.01	Penguatan Manajemen Kepemimpinan Lembaga Pendidikan	Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	59,47	62,44	65,56	68,84	72,28	33.259	113.146	130.117	149.635	172.080						33.259	113.146	130.117	149.635	172.080
04.05.01.02	Pendampingan dalam Peningkatan Kualitas untuk Kepala Satuan Pendidikan							33.259	113.146	130.117	149.635	172.080						33.259	113.146	130.117	149.635	172.080
04.05.02	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Pendidikan Khususnya Terkait Pemanfaatan Anggaran Pendidikan	Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	57,61	67,75	72,64	77,72	82,61	466.915	614.924	661.729	701.066	744.486						466.915	614.924	661.729	701.066	744.486
04.05.02.01	Pembinaan pemerintah daerah untuk optimalisasi							429.181	570.162	611.313	644.201	680.260						429.181	570.162	611.313	644.201	680.260

Kode	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	pemanfaatan anggaran pendidikan																					
04.05.02.02	Pengembangan Kebijakan Pendidikan							37.734	44.762	50.416	56.865	64.226						37.734	44.762	50.416	56.865	64.226
04.05.03	Penguatan Sistem Penjaminan Mutu	Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP	98,65	98,97	99,15	99,27	99,29	461.537	1.002.592	1.042.528	1.084.222	1.127.762						461.537	1.002.592	1.042.528	1.084.222	1.127.762
04.05.03.01	Pendampingan Satuan Pendidikan dalam Peningkatan Penjaminan Mutu							244.433	537.185	553.301	569.900	586.996						244.433	537.185	553.301	569.900	586.996
04.05.03.02	Penyediaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Data Pendidikan							3.196	5.508	6.334	7.284	8.376						3.196	5.508	6.334	7.284	8.376
04.05.03.03	Percepatan Akreditasi Lembaga Pendidikan							213.908	459.899	482.893	507.038	532.390						213.908	459.899	482.893	507.038	532.390
04.07.01	Penguatan Pendidikan Menengah Vokasi	Persentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang bekerja/ berwirausaha	13,42	14	14,61	15,25	15,91	1.001.488	2.320.406	2.454.541	2.607.250	2.764.447						1.001.488	2.320.406	2.454.541	2.607.250	2.764.447
04.07.01.01	Penerapan Kurikulum dan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Menengah Vokasi Berbasis Industri							758.668	1.672.743	1.789.559	1.914.855	2.049.411						758.668	1.672.743	1.789.559	1.914.855	2.049.411
04.07.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pemerataan Pendidik pada Satuan Pendidikan Menegah Vokasi							158.399	403.480	404.365	405.249	406.134						158.399	403.480	404.365	405.249	406.134
04.07.01.03	Sertifikasi Kompetensi Siswa pada Satuan Pendidikan Menegah Vokasi							59.421	215.433	227.555	249.124	265.177						59.421	215.433	227.555	249.124	265.177
04.07.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana pada Satuan Pendidikan Menengah Vokasi (DAK)							25.000	28.750	33.063	38.022	43.725						25.000	28.750	33.063	38.022	43.725
04.07.03	Penguatan Pelatihan Vokasi							26.500	39.650	42.650	45.550	50.725						26.500	39.650	42.650	45.550	50.725
04.07.03.03	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja								4.000	4.500	5.000	6.000							4.000	4.500	5.000	6.000
04.07.03.04	Fasilitasi dan Bantuan Lembaga Pelatihan Vokasi							26.500	35.650	38.150	40.550	44.725						26.500	35.650	38.150	40.550	44.725
04.09.01	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya							72.338	138.189	148.698	160.529	173.872						72.338	138.189	148.698	160.529	173.872

Kode	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
04.09.01.01	Pembinaan Talenta Seni Budaya							45.677	56.418	64.880	74.612	85.804						45.677	56.418	64.880	74.612	85.804
04.09.01.02	Penyelenggaraan Ajang Seni dan Festival Seni Budaya							26.661	81.771	83.818	85.917	88.068						26.661	81.771	83.818	85.917	88.068
04.09.02	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi							69.995	107.422	118.885	131.630	145.785						69.995	107.422	118.885	131.630	145.785
04.09.02.01	Memperluas Kumpulan Bakat (<i>Talent Pool</i>) dan akuisis Talenta Riset dan Inovasi							69.995	107.422	118.885	131.630	145.785						69.995	107.422	118.885	131.630	145.785
04.09.03	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga							60.814	97.030	111.584	128.322	147.570						60.814	97.030	111.584	128.322	147.570
04.09.03.01	Pengembangan Sistem Pembinaan Pra-Bibit, Bibit dan Talenta Potensial Bidang Olahraga							60.814	97.030	111.584	128.322	147.570						60.814	97.030	111.584	128.322	147.570
04.09.04	Penguatan Tata Kelola Manajemen Talenta Nasional (MTN)							110.762	209.827	220.605	231.968	243.946						110.762	209.827	220.605	231.968	243.946
04.09.04.01	Penguatan Basis Data Terpadu MTN							21.577	29.824	31.315	32.881	34.525						21.577	29.824	31.315	32.881	34.525
04.09.04.02	Penguatan Sinergi Pelaksanaan MTN							89.185	180.003	189.290	199.087	209.421						89.185	180.003	189.290	199.087	209.421
04.10.02	Peningkatan Budaya Kegemaran Membaca							41.621	139.025	143.470	148.744	153.837						41.621	139.025	143.470	148.744	153.837
04.10.02.01	Pembiasaan Kegemaran Membaca							18.657	108.334	112.011	116.499	120.785						18.657	108.334	112.011	116.499	120.785
04.10.02.02	Penguatan Komunitas dan Penggerak Literasi							22.964	30.691	31.459	32.245	33.052						22.964	30.691	31.459	32.245	33.052
04.19.01	Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ sederajat	87,4	87,76	88,08	88,36	88,63	3.317.868	3.320.569	3.589.922	3.771.800	3.775.909						3.317.868	3.320.569	3.589.922	3.771.800	3.775.909
04.19.01.02	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan							3.317.868	3.320.569	3.589.922	3.771.800	3.775.909						3.317.868	3.320.569	3.589.922	3.771.800	3.775.909
04.20.01	Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya	13,08	13,82	14,57	15,31	16,05	32.145	54.405	62.565	71.950	82.743						32.145	54.405	62.565	71.950	82.743
04.20.01.02	Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Lanjut Usia							32.145	54.405	62.565	71.950	82.743						32.145	54.405	62.565	71.950	82.743

Kode	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
08.02.01	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa							51.867	65.472	75.292	86.586	99.574						51.867	65.472	75.292	86.586	99.574
08.02.01.01	Penguatan Etika Sosial Budaya untuk membentuk masyarakat yang harmonis, rukun, dan berkeadaban							51.867	65.472	75.292	86.586	99.574						51.867	65.472	75.292	86.586	99.574
08.02.05	Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia	Indeks Pembangunan Kebahasaan	51,31	52,72	53,46	54,08	55,01	155.960	320.467	330.767	341.268	352.400						155.960	320.467	330.767	341.268	352.400
08.02.05.01	Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia							28.268	74.467	76.947	78.870	80.842						28.268	74.467	76.947	78.870	80.842
08.02.05.02	Pengembangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional							63.246	113.147	115.976	118.875	121.847						63.246	113.147	115.976	118.875	121.847
08.02.05.03	Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah							64.446	132.853	137.844	143.523	149.711						64.446	132.853	137.844	143.523	149.711

D. DISTRIBUSI TARGET DAN ALOKASI ANGGARAN

138.DI - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 7569 - Peningkatan Kecakapan Literasi

IKK

Program
Kegiatan
Klasifikasi Rincian *Output*
Rincian *Output*
Satuan

2.1.1.1 Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca

138.DI-Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
7569-Peningkatan Kecakapan Literasi
7569.BMA Data dan Informasi Publik
7569.BMA.003 Produk Pengayaan Pendukung Literasi
Dokumen

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	413	620	620	620	620	17.219.118	63.048.000	65.002.488	67.017.565	69.095.110
JUMLAH		413	620	620	620	620	17.219.118	63.048.000	65.002.488	67.017.565	69.095.110

IKK

Program
Kegiatan
Klasifikasi Rincian *Output*
Rincian *Output*
Satuan

2.1.1.1 Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca

138.DI-Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
7569-Peningkatan Kecakapan Literasi
7569.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
7569.QDC.004 Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik Terbina Program Literasi
Kebahasaan
Orang

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA		700	775	850	850		1.275.739	1.315.287	1.356.061	1.398.099
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN		700	775	850	850		1.264.718	1.303.924	1.344.346	1.386.021
693269	BALAI BAHASA BALI		700	775	850	850		1.359.206	1.401.341	1.444.783	1.489.571

693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT		700	775	850	850		1.434.183	1.478.643	1.524.481	1.571.739
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN		700	775	850	850		1.438.908	1.483.514	1.529.503	1.576.918
693274	BALAI BAHASA PAPUA		700	775	850	850		1.765.752	1.820.490	1.876.926	1.935.110
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR		700	775	850	850		1.264.500	1.303.700	1.344.114	1.385.782
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT		700	775	850	850		1.233.158	1.271.386	1.310.799	1.351.434
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH		700	775	850	850		1.250.265	1.289.023	1.328.983	1.370.181
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA		700	775	850	850		1.238.681	1.277.080	1.316.670	1.357.486
693279	BALAI BAHASA RIAU		700	775	850	850		1.279.354	1.319.014	1.359.903	1.402.060
693280	BALAI BAHASA ACEH		700	775	850	850		1.257.076	1.296.045	1.336.223	1.377.646
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN		700	775	850	850		1.272.718	1.312.172	1.352.850	1.394.788
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT		700	775	850	850		1.597.668	1.647.196	1.698.259	1.750.905
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH		700	775	850	850		1.646.298	1.697.333	1.749.951	1.804.199
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH		700	775	850	850		1.512.634	1.559.526	1.607.871	1.657.715
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA		700	775	850	850		1.300.131	1.340.435	1.381.989	1.424.830
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG		700	775	850	850		1.448.292	1.493.189	1.539.478	1.587.202
693287	BALAI BAHASA JAMBI		700	775	850	850		1.507.527	1.554.260	1.602.442	1.652.118
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR		700	775	850	850		1.426.183	1.470.395	1.515.977	1.562.972
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT		700	775	850	850		1.319.302	1.360.200	1.402.367	1.445.840
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA		700	775	850	850		1.266.023	1.305.270	1.345.733	1.387.451
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		700	775	850	850		1.174.360	1.210.765	1.248.299	1.286.996
693292	BALAI BAHASA BENGKULU		700	775	850	850		1.240.183	1.278.629	1.318.266	1.359.132
693293	KANTOR BAHASA BANTEN		700	775	850	850		1.232.572	1.270.782	1.310.176	1.350.791

693294	KANTOR BAHASA GORONTALO		700	775	850	850		1.328.918	1.370.114	1.412.588	1.456.378
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA		700	775	850	850		1.347.076	1.388.835	1.431.889	1.476.278
693296	BALAI BAHASA MALUKU		700	775	850	850		1.738.265	1.792.151	1.847.708	1.904.987
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU		700	775	850	850		1.622.076	1.672.360	1.724.204	1.777.654
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR		700	775	850	850		1.703.834	1.756.653	1.811.109	1.867.253
JUMLAH			21.000	23.250	25.500	25.500	-	41.745.600	43.039.714	44.373.945	45.749.537

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

2.1.1.1 Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca

138.DI-Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

7569-Peningkatan Kecakapan Literasi

7569.QGC Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan

7569.QGC.001 Satuan Pendidikan Terfasilitasi Layanan Pembinaan Bahasa

Lembaga

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA		25	25	25	25		106.532	109.834	113.239	116.750
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN		25	25	25	25		105.618	108.892	112.268	115.748
693269	BALAI BAHASA BALI		25	25	25	25		113.479	116.997	120.624	124.363
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT		25	25	25	25		119.723	123.434	127.261	131.206
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN		25	25	25	25		120.101	123.824	127.663	131.620
693274	BALAI BAHASA PAPUA		25	25	25	25		147.260	151.825	156.532	161.384
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR		25	25	25	25		105.614	108.888	112.264	115.744
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT		25	25	25	25		102.990	106.183	109.474	112.868
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH		25	25	25	25		104.374	107.610	110.945	114.385
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA		25	25	25	25		103.396	106.601	109.906	113.313
693279	BALAI BAHASA RIAU		25	25	25	25		106.746	110.055	113.467	116.984
693280	BALAI BAHASA ACEH		25	25	25	25		104.875	108.126	111.478	114.934
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN		25	25	25	25		106.141	109.431	112.824	116.321
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT		25	25	25	25		133.151	137.279	141.534	145.922
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH		25	25	25	25		137.176	141.428	145.813	150.333
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH		25	25	25	25		126.032	129.939	133.967	138.120

693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA		25	25	25	25		108.363	111.722	115.186	118.756
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG		25	25	25	25		120.620	124.359	128.214	132.189
693287	BALAI BAHASA JAMBI		25	25	25	25		125.530	129.421	133.433	137.570
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR		25	25	25	25		118.840	122.524	126.322	130.238
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT		25	25	25	25		109.920	113.328	116.841	120.463
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA		25	25	25	25		105.721	108.998	112.377	115.861
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		25	25	25	25		98.074	101.114	104.249	107.481
693292	BALAI BAHASA BENGKULU		25	25	25	25		103.493	106.701	110.009	113.419
693293	KANTOR BAHASA BANTEN		25	25	25	25		102.944	106.135	109.425	112.818
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO		25	25	25	25		110.945	114.384	117.930	121.586
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA		25	25	25	25		112.412	115.897	119.490	123.194
693296	BALAI BAHASA MALUKU		25	25	25	25		145.037	149.533	154.169	158.948
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU		25	25	25	25		135.335	139.530	143.856	148.315
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR		25	25	25	25		141.988	146.390	150.928	155.606
JUMLAH			750	750	750	750	-	3.482.430	3.590.385	3.701.687	3.816.440

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

2.1.1.3 Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik

138.DI-Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

7569-Peningkatan Kecakapan Literasi

7569.QMA Data dan Informasi Publik

7569.QMA.001 Karya Sastra yang Dialihwahanakan

Dokumen

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	34	50	50	50	50	1.100.000	4.691.050	4.836.473	4.986.403	5.140.982
JUMLAH		34	50	50	50	50	1.100.000	4.691.050	4.836.473	4.986.403	5.140.982

IKK	2.1.1.2 Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik
Program	138.DI-Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
Kegiatan	7569-Peningkatan Kecakapan Literasi
Klasifikasi Rincian <i>Output</i>	7569.QMA Data dan Informasi Publik
Rincian <i>Output</i>	7569.QMA.003 Produk Penerjemahan
Satuan	Dokumen

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA	611	611	611	611	611	5.349.676	5.520.866	5.697.533	5.879.854	6.068.010
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	97	97	97	97	97	1.598.340	1.649.487	1.702.270	1.756.743	1.812.959
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	68	68	68	68	68	1.278.500	1.319.412	1.361.633	1.405.205	1.450.172
693269	BALAI BAHASA BALI	102	102	102	102	102	2.038.822	2.104.064	2.171.394	2.240.879	2.312.587
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	35	35	35	35	35	650.860	671.688	693.182	715.363	738.255
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	62	62	62	62	62	1.029.874	1.062.830	1.096.841	1.131.939	1.168.161
693274	BALAI BAHASA PAPUA	40	40	40	40	40	744.022	767.831	792.401	817.758	843.926
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	102	102	102	102	102	2.383.958	2.460.245	2.538.972	2.620.220	2.704.067
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	99	99	99	99	99	2.313.064	2.387.082	2.463.469	2.542.300	2.623.653
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	102	102	102	102	102	1.597.218	1.648.329	1.701.076	1.755.510	1.811.686
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	85	85	85	85	85	1.413.380	1.458.608	1.505.284	1.553.453	1.603.163
693279	BALAI BAHASA RIAU	40	40	40	40	40	746.538	770.427	795.081	820.523	846.780
693280	BALAI BAHASA ACEH	51	51	51	51	51	915.807	945.113	975.356	1.006.568	1.038.778
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	41	41	41	41	41	760.114	784.438	809.540	835.445	862.179
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	56	56	56	56	56	1.172.833	1.210.364	1.249.095	1.289.066	1.330.316
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	37	37	37	37	37	685.230	707.157	729.786	753.140	777.240

693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	70	70	70	70	70	1.061.104	1.095.059	1.130.101	1.166.264	1.203.585
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	30	30	30	30	30	647.794	668.523	689.916	711.993	734.777
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	41	41	41	41	41	761.493	785.861	811.008	836.961	863.743
693287	BALAI BAHASA JAMBI	34	34	34	34	34	1.013.714	1.046.153	1.079.630	1.114.178	1.149.832
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	32	32	32	32	32	820.419	846.672	873.766	901.726	930.582
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	70	70	70	70	70	1.129.554	1.165.700	1.203.002	1.241.498	1.281.226
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	33	33	33	33	33	603.090	622.389	642.305	662.859	684.071
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	32	32	32	32	32	586.852	605.631	625.011	645.012	665.652
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	61	61	61	61	61	1.080.949	1.115.539	1.151.237	1.188.076	1.226.095
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	64	64	64	64	64	2.046.820	2.112.318	2.179.912	2.249.670	2.321.659
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	60	60	60	60	60	867.040	894.785	923.418	952.968	983.463
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	42	42	42	42	42	958.762	989.442	1.021.105	1.053.780	1.087.501
693296	BALAI BAHASA MALUKU	50	50	50	50	50	802.466	828.145	854.646	881.994	910.218
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	20	20	20	20	20	361.512	373.080	385.019	397.340	410.054
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	43	43	43	43	43	1.194.817	1.233.051	1.272.509	1.313.229	1.355.252
JUMLAH		2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	38.614.622	39.850.290	41.125.499	42.441.515	43.799.644

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
7566 Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah

IKK

Program
 Kegiatan
 Klasifikasi Rincian *Output*
 Rincian *Output*
 Satuan

2.1.1.3 Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik

138.DI-Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
 7569-Peningkatan Kecakapan Literasi
 7569.QMA Data dan Informasi Publik
 7569.QMA.004 Produk Kamus dan Pedoman Kebahasaan bagi Pelajar
 Dokumen

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	2	2	3	3	3	205.868	212.250	218.830	225.613	239.818
JUMLAH		2	2	3	3	3	205.868	212.250	218.830	225.613	239.818

IKK

Program
 Kegiatan
 Klasifikasi Rincian *Output*
 Rincian *Output*
 Satuan

2.1.1.1 Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
 7569-Peningkatan Kecakapan Literasi
 7569.QDC Data dan Informasi Publik
 7567.QDC.003 Generasi Muda Terbina Program Literasi
 Orang

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	315	-	-	-	-	1.314.683	-	-	-	-
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	590	-	-	-	-	350.000	-	-	-	-
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	590	-	-	-	-	172.720	-	-	-	-
693269	BALAI BAHASA BALI	590	-	-	-	-	280.373	-	-	-	-
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	590	-	-	-	-	322.860	-	-	-	-
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	590	-	-	-	-	525.231	-	-	-	-
693274	BALAI BAHASA PAPUA	590	-	-	-	-	831.604	-	-	-	-
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	590	-	-	-	-	714.524	-	-	-	-
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	590	-	-	-	-	378.598	-	-	-	-
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	590	-	-	-	-	663.068	-	-	-	-
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	590	-	-	-	-	376.080	-	-	-	-
693279	BALAI BAHASA RIAU	590	-	-	-	-	673.386	-	-	-	-

693280	BALAI BAHASA ACEH	590	-	-	-	-	339.985	-	-	-	-
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	590	-	-	-	-	98.100	-	-	-	-
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	590	-	-	-	-	165.387	-	-	-	-
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	590	-	-	-	-	213.470	-	-	-	-
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	590	-	-	-	-	495.567	-	-	-	-
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	590	-	-	-	-	490.079	-	-	-	-
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	590	-	-	-	-	310.170	-	-	-	-
693287	BALAI BAHASA JAMBI	590	-	-	-	-	346.017	-	-	-	-
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	590	-	-	-	-	420.662.	-	-	-	-
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	590	-	-	-	-	524.386	-	-	-	-
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	590	-	-	-	-	550.000	-	-	-	-
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	570	-	-	-	-	401.540	-	-	-	-
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	590	-	-	-	-	692.013	-	-	-	-
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	885	-	-	-	-	784.899	-	-	-	-
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	590	-	-	-	-	442.552	-	-	-	-
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	590	-	-	-	-	721.500	-	-	-	-
693296	BALAI BAHASA MALUKU	590	-	-	-	-	378.461	-	-	-	-
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	590	-	-	-	-	557.821	-	-	-	-
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	590	-	-	-	-	336.170	-	-	-	-
JUMLAH		18.290	-	-	-	-	14.451.244	-	-	-	-

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

3.1.4.2 Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

7566- Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah

7566.PEG Konferensi dan Event

7566.PEG.001 Perhelatan Karya Kreatif Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah

Kegiatan

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	2	2	2	2	2	3.298.808	7.407.000	7.636.617	7.873.352	8.117.426
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	1	1	1	1	1	360.820	372.005	383.538	395.427	407.685

693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	1	1	1	1	1	1.428.390	1.472.670	1.518.323	1.565.391	1.613.918
693269	BALAI BAHASA BALI	1	1	1	1	1	1.469.614	1.515.172	1.562.142	1.610.569	1.660.496
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	1	1	1	1	1	222.532	229.430	236.543	243.876	251.436
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	1	1	1	1	1	984.275	1.014.788	1.046.246	1.078.680	1.112.119
693274	BALAI BAHASA PAPUA	1	1	1	1	1	586.498	604.679	623.425	642.751	662.676
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	1	1	1	1	1	790.230	814.727	839.984	866.023	892.870
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	1	1	1	1	1	1.319.076	1.359.967	1.402.126	1.445.592	1.490.406
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	1	1	1	1	1	1.535.326	1.582.921	1.631.992	1.682.583	1.734.743
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	1	1	1	1	1	719.685	741.995	764.997	788.712	813.162
693279	BALAI BAHASA RIAU	1	1	1	1	1	707.410	729.340	751.949	775.260	799.293
693280	BALAI BAHASA ACEH	1	1	1	1	1	1.090.666	1.124.477	1.159.335	1.195.275	1.232.328
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	1	1	1	1	1	634.866	654.547	674.838	695.758	717.326
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	1	1	1	1	1	550.459	567.523	585.116	603.255	621.956
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	1	1	1	1	1	645.639	665.654	686.289	707.564	729.499
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	1	1	1	1	1	1.224.125	1.262.073	1.301.197	1.341.534	1.383.122
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	1	1	1	1	1	642.302	662.213	682.742	703.907	725.728
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	1	1	1	1	1	1.087.084	1.120.784	1.155.528	1.191.349	1.228.281
693287	BALAI BAHASA JAMBI	1	1	1	1	1	429.387	442.698	456.422	470.571	485.158
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	1	1	1	1	1	992.080	1.022.834	1.054.542	1.087.233	1.120.937
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	1	1	1	1	1	547.026	563.984	581.467	599.493	618.077
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	1	1	1	1	1	218.522	225.296	232.280	239.481	246.905

693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	1	1	1	1	582.238	600.287	618.896	638.082	657.863
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	1	1	1	1	1	661.290	681.790	702.925	724.716	747.182
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	1	1	1	1	1	857.247	883.822	911.220	939.468	968.591
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	1	1	1	1	1	864.476	891.275	918.904	947.390	976.759
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	1	1	1	1	1	729.569	752.186	775.503	799.544	824.330
693296	BALAI BAHASA MALUKU	1	1	1	1	1	1.714.127	1.767.265	1.822.050	1.878.534	1.936.768
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	1	1	1	1	1	670.995	691.796	713.242	735.352	758.148
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	1	1	1	1	1	691.180	712.607	734.697	757.473	780.955
JUMLAH		32	32	32	32	32	28.255.942	33.137.805	34.165.077	35.224.195	36.316.145

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

3.1.4.2 Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

7566- Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah

7566.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat

7566.QDC.001 Penutur Bahasa Daerah Terfasilitasi Program Pelindungan Bahasa Daerah

Orang

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	250	252	254	257	262	922.244	950.834	980.309	1.010.699	1.042.031
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	251	255	259	265	275	1.186.269	1.223.043	1.260.958	1.300.047	1.340.349
693269	BALAI BAHASA BALI	241	243	245	248	253	1.247.349	1.286.017	1.325.883	1.366.986	1.409.362
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	243	245	247	250	255	1.092.876	1.126.755	1.161.685	1.197.697	1.234.825
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	251	253	255	258	263	1.276.512	1.316.084	1.356.882	1.398.946	1.442.313
693274	BALAI BAHASA PAPUA	500	512	524	542	572	2.323.706	2.395.741	2.470.009	2.546.579	2.625.523

693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	252	254	256	259	264	1.302.058	1.342.422	1.384.037	1.426.942	1.471.177
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	223	225	227	230	235	744.926	768.019	791.827	816.374	841.682
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	223	225	227	230	235	883.054	910.429	938.652	967.750	997.750
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	251	253	255	258	263	1.002.842	1.033.930	1.065.982	1.099.027	1.133.097
693279	BALAI BAHASA RIAU	234	236	238	241	246	774.927	798.950	823.717	849.252	875.579
693280	BALAI BAHASA ACEH	234	236	238	241	246	505.248	520.911	537.059	553.708	570.873
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	234	236	238	241	246	833.699	859.544	886.190	913.661	941.985
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	234	236	238	241	246	945.919	975.242	1.005.475	1.036.645	1.068.781
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	223	225	227	230	235	1.075.146	1.108.476	1.142.838	1.178.266	1.214.793
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	223	225	227	230	235	1.152.630	1.188.362	1.225.201	1.263.182	1.302.341
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	223	225	227	230	235	1.036.170	1.068.291	1.101.408	1.135.552	1.170.754
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	223	225	227	230	235	1.130.002	1.165.032	1.201.148	1.238.384	1.276.774
693287	BALAI BAHASA JAMBI	250	252	254	257	262	1.230.229	1.268.366	1.307.685	1.348.224	1.390.019
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	260	264	268	274	284	1.070.754	1.103.947	1.138.170	1.173.453	1.209.830
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	240	242	244	247	252	1.235.238	1.273.530	1.313.010	1.353.713	1.395.678
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	233	235	237	240	245	1.212.323	1.249.905	1.288.652	1.328.600	1.369.787
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	283	285	287	290	295	903.779	931.796	960.682	990.463	1.021.167
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	223	225	227	230	235	994.119	1.024.937	1.056.710	1.089.468	1.123.241
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	423	427	431	437	447	1.773.370	1.828.344	1.885.023	1.943.459	2.003.706
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	223	225	227	230	235	1.049.008	1.081.527	1.115.055	1.149.621	1.185.260
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	307	309	311	314	319	1.500.397	1.546.909	1.594.863	1.644.304	1.695.278

693296	BALAI BAHASA MALUKU	260	262	264	267	272	940.421	969.574	999.631	1.030.619	1.062.569
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	229	231	233	236	241	1.049.669	1.082.209	1.115.757	1.150.346	1.186.006
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	297	299	301	304	309	1.505.163	1.551.823	1.599.930	1.649.527	1.700.663
JUMLAH		7.741	7.817	7.893	8.007	8.197	33.900.047	34.950.948	36.034.428	37.151.495	38.303.191

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

3.1.4.2 Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

7566- Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah

7566.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat

7566.QDD.001 Pelestari Bahasa dan Sastra Daerah yang Difasilitasi dan Diapresiasi
(Komunitas dan Perseorangan)

Kelompok Masyarakat

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	0	30	35	40	50	0	4.000.000	4.124.000	4.251.844	4.383.651
JUMLAH		0	30	35	40	50	-	4.000.000	4.124.000	4.251.844	4.383.651

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

3.1.4.1 Persentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan Aksara yang Terverifikasi dalam Peta Kebinekaan

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

7566- Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah

7566.QMA Data dan Informasi Publik

7566.QMA.002 Peta Kebinekaan Bahasa dan Sastra

Dokumen

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	3	3	3	3	3	3.918.515	5.167.315	5.327.502	5.492.654	5.662.927
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	1	1	1	1	1	104.250	158.019	162.918	167.968	173.175
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	1	1	1	1	1	102.150	154.836	159.636	164.585	169.687

693269	BALAI BAHASA BALI	1	1	1	1	1	126.330	191.488	197.424	203.544	209.854
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	1	1	1	1	1	147.216	223.146	230.064	237.195	244.549
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	1	1	1	1	1	149.232	226.202	233.214	240.444	247.898
693274	BALAI BAHASA PAPUA	1	1	1	1	1	1.495.620	2.267.021	2.337.299	2.409.755	2.484.457
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	1	1	1	1	1	102.090	154.745	159.542	164.488	169.587
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	1	1	1	1	1	94.123	145.287	149.791	154.434	159.222
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	1	1	1	1	1	98.400	149.152	153.776	158.543	163.458
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	1	1	1	1	1	96.240	145.878	150.400	155.063	159.870
693279	BALAI BAHASA RIAU	1	1	1	1	1	104.820	158.883	163.808	168.886	174.122
693280	BALAI BAHASA ACEH	1	1	1	1	1	99.750	151.198	155.885	160.718	165.700
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	1	1	1	1	1	98.847	157.428	162.308	167.340	172.527
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	1	1	1	1	1	255.444	387.195	399.198	411.573	424.332
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	1	1	1	1	1	316.176	479.251	494.108	509.425	525.217
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	1	1	1	1	1	192.480	291.756	300.800	310.125	319.739
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	1	1	1	1	1	109.380	165.795	170.935	176.234	181.697
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	1	1	1	1	1	153.954	233.359	240.593	248.052	255.741
693287	BALAI BAHASA JAMBI	1	1	1	1	1	189.750	287.618	296.534	305.727	315.204
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	1	1	1	1	1	142.395	218.180	224.944	231.917	239.106
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	1	1	1	1	1	114.870	174.117	179.515	185.080	190.817
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	1	1	1	1	1	102.360	155.155	159.965	164.924	170.036
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	1	1	1	1	93.510	141.740	146.134	150.664	155.335
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	1	1	1	1	1	96.660	146.515	151.057	155.740	160.568
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	1	1	1	1	1	95.550	144.832	149.322	153.951	158.723
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	1	1	1	1	1	118.500	179.619	185.187	190.928	196.847

693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	1	1	1	1	1	122.940	186.349	192.126	198.082	204.222
693296	BALAI BAHASA MALUKU	1	1	1	1	1	456.502	1.289.729	1.329.711	1.370.932	1.413.431
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	1	1	1	1	1	163.972	440.290	453.939	468.011	482.519
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	1	1	1	1	1	410.310	621.937	641.217	661.095	681.589
JUMLAH		33	33	33	33	33	9.872.336	14.994.035	15.458.850	15.938.074	16.432.155

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
7567 Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

3.1.2.1 Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

7567- Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia

7567.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

7567.BDB.001 Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan

Lembaga

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	45	-	-	-	-	852.069	548.785	565.797	583.337	601.421
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	50	25	25	25	25	168.011	181.988	187.630	193.446	199.443
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	50	25	25	25	25	167.999	181.903	187.542	193.356	199.350
693269	BALAI BAHASA BALI	50	25	25	25	25	138.771	189.839	195.724	201.791	208.047
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	50	25	25	25	25	167.999	193.687	199.691	205.882	212.264
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	50	25	25	25	25	167.999	216.595	223.309	230.232	237.369
693274	BALAI BAHASA PAPUA	50	25	25	25	25	163.046	236.916	244.260	251.832	259.639
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	50	25	25	25	25	138.747	203.856	210.176	216.691	223.408
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	50	25	25	25	25	195.829	201.056	207.289	213.715	220.340
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	50	25	25	25	25	167.999	195.873	201.945	208.205	214.660
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	50	25	25	25	25	163.873	202.778	209.064	215.545	222.227
693279	BALAI BAHASA RIAU	50	25	25	25	25	167.999	227.943	235.009	242.295	249.806
693280	BALAI BAHASA ACEH	50	25	25	25	25	137.902	202.037	208.300	214.757	221.415
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	50	25	25	25	25	167.999	216.595	223.309	230.232	237.369
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	50	25	25	25	25	184.303	182.104	187.749	193.569	199.570

693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	50	25	25	25	25	131.334	198.651	204.809	211.158	217.704
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	50	25	25	25	25	161.493	212.163	218.740	225.521	232.512
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	50	25	25	25	25	161.529	183.183	188.862	194.716	200.753
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	50	25	25	25	25	167.999	192.461	198.427	204.579	210.920
693287	BALAI BAHASA JAMBI	50	25	25	25	25	167.999	207.187	213.610	220.232	227.059
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	50	25	25	25	25	391.934	231.012	238.173	245.557	253.169
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	50	25	25	25	25	166.675	203.442	209.749	216.251	222.955
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	50	25	25	25	25	167.999	207.816	214.258	220.900	227.748
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	50	25	25	25	25	167.999	171.622	176.942	182.427	188.083
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	50	25	25	25	25	167.999	204.094	210.421	216.944	223.669
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	50	25	25	25	25	195.133	202.742	209.027	215.507	222.188
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	50	25	25	25	25	162.531	175.234	180.666	186.267	192.041
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	50	25	25	25	25	142.197	200.083	206.286	212.680	219.274
693296	BALAI BAHASA MALUKU	50	25	25	25	25	163.057	210.191	216.707	223.425	230.351
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	50	25	25	25	25	167.999	212.035	218.608	225.385	232.372
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	50	25	25	25	25	167.999	193.972	199.985	206.185	212.576
JUMLAH		1.545	750	750	750	750	6.002.421	6.587.843	6.792.066	7.002.620	7.219.701

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*Rincian *Output*

Satuan

3.1.2.2 Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

7567- Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia

7567.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

7567.BDB.002 Komunitas Penggerak Literasi Terbina

Lembaga

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	14	14	14	14	14	140.000	144.340	148.815	153.428	158.184
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	29	29	29	29	29	290.000	298.990	308.259	317.815	327.667
693269	BALAI BAHASA BALI	20	20	20	20	20	200.000	206.200	212.592	219.183	225.977
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	19	19	19	19	19	190.000	195.890	201.963	208.223	214.678
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	36	36	36	36	36	300.000	309.300	318.888	328.774	338.966
693274	BALAI BAHASA PAPUA	26	26	26	26	26	230.000	237.130	244.481	252.060	259.874
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	12	12	12	12	12	120.000	123.720	127.555	131.510	135.586
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	90	90	90	90	90	573.496	591.274	609.604	628.502	647.985
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	69	69	69	69	69	420.000	433.020	446.444	460.283	474.552
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	39	39	39	39	39	250.000	257.750	265.740	273.978	282.472
693279	BALAI BAHASA RIAU	48	48	48	48	48	200.000	206.200	212.592	219.183	225.977
693280	BALAI BAHASA ACEH	44	44	44	44	44	200.000	206.200	212.592	219.183	225.977
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	33	33	33	33	33	329.075	339.276	349.794	360.638	371.817
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	41	41	41	41	41	330.000	340.230	350.777	361.651	372.862
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	20	20	20	20	20	200.000	206.200	212.592	219.183	225.977
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	19	19	19	19	19	190.000	195.890	201.963	208.223	214.678
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	34	34	34	34	34	250.000	257.750	265.740	273.978	282.472

693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	39	39	39	39	39	300.000	309.300	318.888	328.774	338.966
693287	BALAI BAHASA JAMBI	23	23	23	23	23	230.000	237.130	244.481	252.060	259.874
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	44	44	44	44	44	427.568	440.823	454.488	468.577	483.103
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	87	87	87	87	87	608.000	626.848	646.280	666.315	686.971
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	18	18	18	18	18	180.000	185.580	191.333	197.264	203.379
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	23	23	23	23	23	230.000	237.130	244.481	252.060	259.874
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	20	20	20	20	20	200.000	206.200	212.592	219.183	225.977
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	158	158	158	158	158	1.494.343	1.540.668	1.588.428	1.637.670	1.688.437
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	33	33	33	33	33	330.000	340.230	350.777	361.651	372.862
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	45	45	45	45	45	300.000	309.300	318.888	328.774	338.966
693296	BALAI BAHASA MALUKU	37	37	37	37	37	370.000	381.470	393.296	405.488	418.058
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	20	20	20	20	20	200.000	206.200	212.592	219.183	225.977
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	39	39	39	39	39	390.000	402.090	414.555	427.406	440.656
JUMLAH		1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	9.672.482	9.972.329	10.281.471	10.600.197	10.928.803

IKK

Program
Kegiatan
Klasifikasi Rincian Output
Rincian Output
Satuan

3.1.1.2 Persentase Penutur Teruji yang Sesuai Dengan Predikat Kemahiran Berbahasa Profesi

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
7567- Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia
7567.BMA Data dan Informasi Publik
7567.BMA.001 Instrumen Kemahiran Bahasa Indonesia yang Tersusun
Dokumen

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	7	7	7	7	7	2.025.372	2.088.159	2.152.891	2.219.631	2.288.440
JUMLAH		7	7	7	7	7	2.025.372	2.088.159	2.152.891	2.219.631	2.288.440

IKK	3.1.1.3 Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya
Program	138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
Kegiatan	7567- Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia
Klasifikasi Rincian <i>Output</i>	7567.PEG Konferensi dan <i>Event</i>
Rincian <i>Output</i>	7567.PEG.001 Perhelatan Karya Kreatif Pembinaan Bahasa dan Sastra
Satuan	Kegiatan

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	4	4	4	4	4	6.824.887	7.036.458	7.254.589	7.479.481	7.711.345
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	4	4	4	4	4	252.363	260.186	268.252	276.568	285.141
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	4	4	4	4	4	694.797	716.336	738.542	761.437	785.041
693269	BALAI BAHASA BALI	4	4	4	4	4	451.118	465.103	479.521	494.386	509.712
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	4	4	4	4	4	403.289	415.791	428.680	441.970	455.671
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	4	4	4	4	4	462.690	477.033	491.821	507.068	522.787
693274	BALAI BAHASA PAPUA	4	4	4	4	4	1.556.288	1.604.533	1.654.273	1.705.556	1.758.428
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	4	4	4	4	4	493.837	509.146	524.929	541.202	557.980
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	4	4	4	4	4	499.024	514.494	530.443	546.887	563.840
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	4	4	4	4	4	598.499	617.052	636.181	655.903	676.236
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	4	4	4	4	4	565.494	583.024	601.098	619.732	638.944
693279	BALAI BAHASA RIAU	4	4	4	4	4	525.427	541.715	558.508	575.822	593.673
693280	BALAI BAHASA ACEH	4	4	4	4	4	322.074	332.058	342.352	352.965	363.907
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	4	4	4	4	4	480.937	495.846	511.217	527.065	543.404
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	4	4	4	4	4	494.922	510.265	526.083	542.391	559.205

693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	4	4	4	4	4	476.500	491.272	506.501	522.202	538.391
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	1	4	4	4	4	349.434	360.266	371.435	382.949	394.821
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	4	4	4	4	4	590.014	608.304	627.162	646.604	666.649
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	4	4	4	4	4	435.950	449.464	463.398	477.763	492.574
693287	BALAI BAHASA JAMBI	4	4	4	4	4	358.460	369.572	381.029	392.841	405.019
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	4	4	4	4	4	227.994	235.062	242.349	249.862	257.607
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	3	4	4	4	4	614.370	633.415	653.051	673.296	694.168
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	4	4	4	4	4	540.983	557.753	575.044	592.870	611.249
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4	4	4	4	4	306.773	316.283	326.088	336.196	346.619
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	4	4	4	4	4	399.760	412.153	424.929	438.102	451.683
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	4	4	4	4	4	594.922	613.365	632.379	651.983	672.194
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	4	4	4	4	4	496.678	512.075	527.949	544.316	561.190
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	3	4	4	4	4	453.917	467.988	482.496	497.453	512.875
693296	BALAI BAHASA MALUKU	1	4	4	4	4	479.092	493.944	509.256	525.043	541.319
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	4	4	4	4	4	280.668	289.369	298.339	307.588	317.123
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	3	4	4	4	4	488.367	503.506	519.115	535.208	551.799
JUMLAH		115	124	124	124	124	21.719.528	22.392.833	23.087.011	23.802.709	24.540.593

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*Rincian *Output*

Satuan

3.1.1.3 Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

7567- Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia

7567.QDC. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat

7567.QDC.001 Penutur Bahasa Terbina

Orang

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	275	175	175	175	175	319.784	329.697	339.918	350.455	361.319
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	275	175	175	175	175	247.240	254.904	262.806	270.953	279.353
693269	BALAI BAHASA BALI	275	175	175	175	175	348.171	358.964	370.092	381.565	393.394
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	275	175	175	175	175	363.850	375.129	386.758	398.748	411.109
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	275	175	175	175	175	278.570	287.206	296.109	305.288	314.752
693274	BALAI BAHASA PAPUA	275	175	175	175	175	706.460	728.360	750.939	774.219	798.219
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	275	175	175	175	175	485.900	500.963	516.493	532.504	549.012
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	275	175	175	175	175	541.506	558.293	575.600	593.443	611.840
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	275	175	175	175	175	345.806	356.526	367.578	378.973	390.721
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	275	175	175	175	175	546.832	563.784	581.261	599.280	617.858
693279	BALAI BAHASA RIAU	275	175	175	175	175	249.209	256.934	264.899	273.111	281.578
693280	BALAI BAHASA ACEH	275	175	175	175	175	469.399	483.950	498.953	514.420	530.367
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	275	175	175	175	175	345.595	356.308	367.354	378.742	390.483
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	275	175	175	175	175	283.076	291.851	300.899	310.227	319.844
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	275	175	175	175	175	304.425	313.862	323.592	333.623	343.966

693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	275	175	175	175	175	696.809	718.410	740.681	763.642	787.315
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	275	175	175	175	175	280.240	288.927	297.884	307.119	316.639
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	275	175	175	175	175	351.290	362.180	373.408	384.983	396.918
693287	BALAI BAHASA JAMBI	275	175	175	175	175	293.881	302.991	312.384	322.068	332.052
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	275	175	175	175	175	559.142	576.475	594.346	612.771	631.767
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	275	175	175	175	175	270.228	278.605	287.242	296.146	305.327
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	275	175	175	175	175	424.087	437.234	450.788	464.762	479.170
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	275	175	175	175	175	231.105	238.269	245.656	253.271	261.122
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	275	175	175	175	175	278.502	287.136	296.037	305.214	314.676
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	275	175	175	175	175	545.624	562.538	579.977	597.956	616.493
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	275	175	175	175	175	245.855	253.477	261.334	269.436	277.788
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	275	175	175	175	175	375.976	387.631	399.648	412.037	424.810
693296	BALAI BAHASA MALUKU	275	175	175	175	175	437.234	450.788	464.763	479.170	494.025
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	275	175	175	175	175	633.383	653.018	673.261	694.133	715.651
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	275	175	175	175	175	397.770	410.101	422.814	435.921	449.435
JUMLAH		8.250	5.250	5.250	5.250	5.250	11.856.949	12.224.514	12.603.474	12.994.182	13.397.002

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*Rincian *Output*

Satuan

3.1.1.2 Persentase Penutur Teruji yang Sesuai dengan Predikat Kemahiran Berbahasa Profesinya

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

7567- Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia

7567.QDC. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat

7567.QDC.002 Penutur Bahasa Teruji

Orang

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	115	116	117	118	120	1.794.801	1.850.440	1.907.803	1.966.945	2.027.921
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	3.630	3.666	3.703	3.740	3.777	152.548	157.277	162.153	167.179	172.362
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	10.709	10.816	10.924	11.033	11.144	245.000	252.595	260.425	268.499	276.822
693269	BALAI BAHASA BALI	5.274	5.327	5.380	5.434	5.488	308.167	317.720	327.570	337.724	348.194
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	2.954	2.984	3.013	3.044	3.074	264.000	272.184	280.622	289.321	298.290
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	834	842	851	859	868	200.000	206.200	212.592	219.183	225.977
693274	BALAI BAHASA PAPUA	8.029	8.109	8.190	8.272	8.355	864.178	890.968	918.588	947.064	976.423
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	20.819	21.027	21.237	21.450	21.664	527.650	544.007	560.871	578.258	596.184
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	15.900	16.059	16.220	16.382	16.546	275.000	283.525	292.314	301.376	310.719
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	16.300	16.463	16.628	16.794	16.962	274.093	282.590	291.350	300.382	309.694
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	9.243	9.335	9.429	9.523	9.618	370.000	381.470	393.296	405.488	418.058

693279	BALAI BAHASA RIAU	5.242	5.294	5.347	5.401	5.455	168.000	173.208	178.577	184.113	189.821
693280	BALAI BAHASA ACEH	1.996	2.016	2.036	2.056	2.077	374.880	386.501	398.483	410.836	423.572
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	3.897	3.936	3.975	4.015	4.055	274.880	283.401	292.187	301.245	310.583
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	2.806	2.834	2.862	2.891	2.920	199.500	205.685	212.061	218.635	225.412
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	1.485	1.500	1.515	1.530	1.545	216.137	222.837	229.745	236.867	244.210
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	1.386	1.400	1.414	1.428	1.442	183.800	189.498	195.372	201.429	207.673
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	4.546	4.591	4.637	4.684	4.731	200.820	207.045	213.464	220.081	226.904
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	4.390	4.434	4.478	4.523	4.568	241.034	248.506	256.210	264.152	272.341
693287	BALAI BAHASA JAMBI	2.087	2.108	2.129	2.150	2.172	382.470	394.327	406.551	419.154	432.148
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	6.834	6.902	6.971	7.041	7.111	394.020	406.235	418.828	431.812	445.198
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	8.037	8.117	8.199	8.281	8.363	350.000	360.850	372.036	383.569	395.460
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	1.362	1.376	1.389	1.403	1.417	200.000	206.200	212.592	219.183	225.977
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	8.830	8.918	9.007	9.098	9.189	121.000	124.751	128.618	132.605	136.716
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	2.896	2.925	2.954	2.984	3.014	318.930	328.817	339.010	349.519	360.355

693293	KANTOR BAHASA BANTEN	29.316	29.609	29.905	30.204	30.506	529.764	546.187	563.118	580.575	598.573
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	628	634	641	647	653	241.551	249.039	256.759	264.719	272.925
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	714	721	728	736	743	115.000	118.565	122.241	126.030	129.937
693296	BALAI BAHASA MALUKU	1.406	1.420	1.434	1.449	1.463	111.255	114.704	118.260	121.926	125.705
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	2.694	2.721	2.748	2.776	2.803	230.575	237.723	245.092	252.690	260.523
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	2.210	2.232	2.254	2.277	2.300	143.473	147.921	152.506	157.234	162.108
JUMLAH		186.569	188.432	190.315	192.223	194.143	10.272.526	10.590.974	10.919.295	11.257.793	11.606.784

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

3.1.1.3 Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

7567- Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia

7567.QDC. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat

7567.QDC.003 Generasi Muda Terbina Program Literasi

Orang

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
				2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	-	590	590	590	590	-	191.005	196.926	203.031	209.325
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	-	590	590	590	590	-	142.393	146.807	151.358	156.050
693269	BALAI BAHASA BALI	-	590	590	590	590	-	178.678	184.217	189.928	195.816
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	-	590	590	590	590	-	187.011	192.808	198.785	204.948
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	-	590	590	590	590	-	217.109	223.839	230.778	237.933
693274	BALAI BAHASA PAPUA	-	590	590	590	590	-	244.162	251.731	259.535	267.580

693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	-	590	590	590	590	-	225.466	232.455	239.662	247.091
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	-	590	590	590	590	-	194.244	200.266	206.474	212.874
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	-	590	590	590	590	-	227.484	234.536	241.807	249.303
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	-	590	590	590	590	-	193.880	199.890	206.087	212.476
693279	BALAI BAHASA RIAU	-	590	590	590	590	-	228.601	235.688	242.994	250.527
693280	BALAI BAHASA ACEH	-	590	590	590	590	-	189.481	195.355	201.411	207.655
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	-	590	590	590	590	-	131.120	135.185	139.375	143.696
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	-	590	590	590	590	-	139.654	143.983	148.447	153.049
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	-	590	590	590	590	-	138.618	142.915	147.346	151.913
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	-	590	590	590	590	-	213.322	219.935	226.753	233.782
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	-	590	590	590	590	-	211.861	218.429	225.200	232.181
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	-	590	590	590	590	-	182.702	188.366	194.205	200.225
693287	BALAI BAHASA JAMBI	-	590	590	590	590	-	190.388	196.290	202.375	208.649
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	-	590	590	590	590	-	206.878	213.291	219.903	226.720
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	-	590	590	590	590	-	216.815	223.536	230.466	237.610
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	-	590	590	590	590	-	221.769	228.644	235.732	243.039
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	-	570	570	570	570	-	198.981	205.149	211.509	218.066
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	-	590	590	590	590	-	235.740	243.048	250.582	258.350
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	-	885	885	885	885	-	242.378	249.892	257.638	265.625
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	-	590	590	590	590	-	204.936	211.289	217.839	224.592
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	-	590	590	590	590	-	240.055	247.497	255.169	263.079
693296	BALAI BAHASA MALUKU	-	590	590	590	590	-	222.776	229.682	236.802	244.143

693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	-	590	590	590	590	-	194.121	200.139	206.343	212.740
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	-	590	590	590	590	-	188.372	194.212	200.232	206.439
JUMLAH		-	17.975	17.975	17.975	17.975	-	6.000.000	6.186.000	6.377.766	6.575.477

IKK

Program
Kegiatan
Klasifikasi Rincian *Output*
Rincian *Output*
Satuan

3.1.2.2 Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
7567- Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia
7567.QDD. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
7567.QDD.001 Komunitas Literasi yang Difasilitasi dan Diapresiasi
Kelompok Masyarakat

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	100	100	100	100	100	5.736.764	6.086.569	6.275.253	6.469.785	6.670.349
JUMLAH		100	100	100	100	100	5.736.764	6.086.569	6.275.253	6.469.785	6.670.349

IKK

Program
Kegiatan
Klasifikasi Rincian *Output*
Rincian *Output*
Satuan

3.1.2.2 Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
7567- Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia
7567.QDD. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
7567.QDD.002 Komunitas Sastra yang Difasilitasi dan Diapresiasi
Kelompok Masyarakat

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	100	100	100	100	100	6.513.236	6.715.146	6.923.316	7.137.939	7.359.215
JUMLAH		100	100	100	100	100	6.513.236	6.715.146	6.923.316	7.137.939	7.359.215

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*Rincian *Output*

Satuan

3.1.3.1 Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

7567- Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia

7567.QMA. Data dan Informasi Publik

7567.QMA.003 Korpus Kebahasaan yang Dikembangkan

Dokumen

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	2	2	2	2	2	692.399	714.550	736.701	759.539	783.084
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	1	1	1	1	1	193.194	199.375	205.556	211.928	218.498
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	1	1	1	1	1	195.732	201.994	208.256	214.712	221.368
693269	BALAI BAHASA BALI	1	1	1	1	1	206.065	212.657	219.249	226.046	233.054
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	1	1	1	1	1	171.368	176.850	182.332	187.985	193.812
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	1	1	1	1	1	185.301	191.229	197.157	203.269	209.570
693274	BALAI BAHASA PAPUA	1	1	1	1	1	162.151	167.339	172.527	177.875	183.389
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	1	1	1	1	1	193.904	200.107	206.310	212.706	219.300
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	1	1	1	1	1	162.151	167.339	172.527	177.875	183.389
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	1	1	1	1	1	182.549	188.389	194.229	200.250	206.458
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	1	1	1	1	1	162.151	167.339	172.527	177.875	183.389
693279	BALAI BAHASA RIAU	1	1	1	1	1	162.151	167.339	172.527	177.875	183.389
693280	BALAI BAHASA ACEH	1	1	1	1	1	205.946	212.535	219.124	225.916	232.920
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	1	1	1	1	1	209.258	215.953	222.648	229.550	236.666
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	1	1	1	1	1	243.228	251.009	258.790	266.813	275.084
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	1	1	1	1	1	162.151	167.339	172.527	177.875	183.389
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	1	1	1	1	1	172.949	178.482	184.015	189.719	195.601

693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	1	1	1	1	1	162.151	167.339	172.527	177.875	183.389
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	1	1	1	1	1	187.545	193.545	199.545	205.731	212.108
693287	BALAI BAHASA JAMBI	1	1	1	1	1	162.151	167.339	172.527	177.875	183.389
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	1	1	1	1	1	218.055	225.031	232.007	239.199	246.614
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	1	1	1	1	1	225.508	232.722	239.936	247.374	255.043
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	1	1	1	1	1	179.211	184.944	190.677	196.588	202.682
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	1	1	1	1	187.034	193.018	199.002	205.171	211.531
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	1	1	1	1	1	178.400	184.107	189.814	195.699	201.765
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	2	1	1	1	1	209.109	215.799	222.489	229.386	236.497
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	1	1	1	1	1	203.940	210.464	216.988	223.715	230.650
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	1	1	1	1	1	229.313	236.649	243.985	251.549	259.347
693296	BALAI BAHASA MALUKU	1	1	1	1	1	239.926	247.602	255.278	263.191	271.350
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	1	1	1	1	1	205.620	212.198	218.776	225.558	232.551
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	1	1	1	1	1	202.889	209.380	215.871	222.563	229.462
JUMLAH		32	32	32	32	32	6.453.500	6.659.962	6.866.421	7.079.280	6.453.500

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

3.1.3.1 Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

7567- Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia

7567.QMA. Data dan Informasi Publik

7567.QMA.004 Produk Kodifikasi dan Pembakuan Bahasa

Dokumen

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	8	9	9	10	10	12.762.050	13.157.674	13.565.561	13.986.094	14.419.663

693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	2	2	2	2	2	164.000	169.084	174.326	179.730	185.301
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	3	3	3	3	3	150.000	154.650	159.444	164.387	169.483
693269	BALAI BAHASA BALI	2	2	2	2	2	168.613	173.840	179.229	184.785	190.513
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	2	2	2	2	2	141.536	145.924	150.447	155.111	159.920
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	2	2	2	2	2	153.735	158.501	163.414	168.480	173.703
693274	BALAI BAHASA PAPUA	4	4	4	4	4	298.123	307.365	316.893	326.717	336.845
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	2	2	2	2	2	145.680	150.196	154.852	159.653	164.602
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	2	2	2	2	2	156.513	161.365	166.367	171.525	176.842
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	2	2	2	2	2	154.773	159.571	164.518	169.618	174.876
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	2	2	2	2	2	222.000	228.882	235.977	243.293	250.835
693279	BALAI BAHASA RIAU	2	2	2	2	2	150.625	155.294	160.109	165.072	170.189
693280	BALAI BAHASA ACEH	2	2	2	2	2	155.120	159.929	164.887	169.998	175.268
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	2	2	2	2	2	157.890	162.785	167.831	173.034	178.398
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	2	2	2	2	2	217.189	223.922	230.863	238.020	245.399
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	2	2	2	2	2	183.462	189.149	195.013	201.058	207.291
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	2	2	2	2	2	234.930	242.213	249.721	257.463	265.444
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	3	3	3	3	3	222.692	229.595	236.713	244.051	251.617
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	2	2	2	2	2	145.843	150.364	155.025	159.831	164.786
693287	BALAI BAHASA JAMBI	3	3	3	3	3	227.353	234.401	241.667	249.159	256.883
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	3	3	3	3	3	191.344	197.276	203.391	209.696	216.197
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	2	2	2	2	2	145.365	149.871	154.517	159.307	164.246

693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	3	3	3	3	3	233.176	240.404	247.857	255.541	263.462
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2	2	2	2	2	146.677	151.224	155.912	160.745	165.728
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	3	3	3	3	3	258.236	266.241	274.495	283.004	291.777
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	2	2	2	2	2	144.951	149.444	154.077	158.854	163.778
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	3	3	3	3	3	232.270	239.470	246.894	254.548	262.439
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	4	4	4	4	4	313.731	323.457	333.484	343.822	354.480
693296	BALAI BAHASA MALUKU	3	3	3	3	3	152.816	157.553	162.437	167.473	172.665
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	3	3	3	3	3	225.629	232.623	239.835	247.270	254.935
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	2	2	2	2	2	249.500	257.235	265.209	273.430	281.907
JUMLAH		81	82	82	83	83	18.505.822	19.079.502	19.670.967	20.280.767	20.909.471

**138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
7568 Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia**

IKK

Program
Kegiatan
Klasifikasi Rincian *Output*
Rincian *Output*
Satuan

3.2.2.1 Persentase Bahan Kebahasaan dan Kesastraan yang Dimanfaatkan di Forum Internasional

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
7568- Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia
7568.BDC. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
7568.BDC.001 Sastrawan Berkarya di Mancanegara
Orang

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA	2	5	5	8	10	403.967	3.126.529	3.223.451	3.323.378	3.426.403
JUMLAH		2	5	5	8	10	403.967	3.126.529	3.223.451	3.323.378	3.426.403

IKK

Program
Kegiatan
Klasifikasi Rincian *Output*
Rincian *Output*
Satuan

3.2.2.1 Persentase Bahan Kebahasaan dan Kesastraan yang Dimanfaatkan di Forum Internasional

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
7568- Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia
7568.BMA. Data dan Informasi Publik
7568.BMA.002 Fasilitasi Penerjemahan dan Penjurubahasaan
Dokumen

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA	25	32	38	44	50	402.720	1.412.475	1.456.262	1.501.406	1.547.949
JUMLAH		25	32	38	44	50	402.720	1.412.475	1.456.262	1.501.406	1.547.949

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*Rincian *Output*

Satuan

3.2.1.1 Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indoneisa bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Luar Negeri)

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

7568- Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia

7568.BMA. Data dan Informasi Publik

7568.BMA.003 Bahan Fasilitasi Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

Dokumen

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA	4	4	4	4	4	1.930.680	1.990.531	2.052.238	2.115.857	2.181.448
JUMLAH		4	4	4	4	4	1.930.680	1.990.531	2.052.238	2.115.857	2.181.448

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*Rincian *Output*

Satuan

3.2.1.1 Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indoneisa bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Luar Negeri)

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

7568- Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia

7568.PEG. Konferensi dan Event

7568.PEG.001 Perhelatan Karya Kreatif Diplomasi Kebahasaan

Kegiatan

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	1.406.200	1.449.792	1.494.736	1.541.073	1.588.846
JUMLAH		1	1	1	1	1	1.406.200	1.449.792	1.494.736	1.541.073	1.588.846

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*Rincian *Output*

Satuan

3.2.1.1 Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indoneisa bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Luar Negeri)

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

7568- Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia

7568.QDB. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

7568.QDB.001 Lembaga Terfasilitasi Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

Lembaga

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA	129	129	130	131	132	19.102.825	19.695.013	20.305.558	20.935.030	21.584.016
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	12	12	13	14	15	128.109	132.080	136.175	140.396	144.749
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	9	9	10	11	12	98.296	101.343	104.485	107.724	111.063
693269	BALAI BAHASA BALI	9	9	10	11	12	98.296	101.343	104.485	107.724	111.063
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	6	6	7	8	9	68.484	70.607	72.796	75.052	77.379
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	12	12	13	14	15	128.108	132.079	136.174	140.395	144.747
693274	BALAI BAHASA PAPUA	12	12	13	14	15	128.107	132.078	136.173	140.394	144.746
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	12	12	13	14	15	128.109	132.080	136.175	140.396	144.749
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	12	12	13	14	15	128.109	132.080	136.175	140.396	144.749
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	12	12	13	14	15	128.108	132.079	136.174	140.395	144.747
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	6	6	7	8	9	68.483	70.606	72.795	75.051	77.378
693279	BALAI BAHASA RIAU	6	6	7	8	9	68.484	70.607	72.796	75.052	77.379
693280	BALAI BAHASA ACEH	9	9	10	11	12	98.296	101.343	104.485	107.724	111.063
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	6	6	7	8	9	65.801	67.841	69.944	72.112	74.348
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	6	6	7	8	9	68.485	70.608	72.797	75.054	77.380

693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	6	6	7	8	9	68.485	70.608	72.797	75.054	77.380
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	9	9	10	11	12	98.295	101.342	104.484	107.723	111.062
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	9	9	10	11	12	98.297	101.344	104.486	107.725	111.064
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	9	9	10	11	12	98.296	101.343	104.485	107.724	111.063
693287	BALAI BAHASA JAMBI	6	6	7	8	9	68.484	70.607	72.796	75.052	77.379
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	6	6	7	8	9	68.484	70.607	72.796	75.052	77.379
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	9	9	10	11	12	98.296	101.343	104.485	107.724	111.063
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	6	6	7	8	9	68.485	70.608	72.797	75.054	77.380
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	6	6	7	8	9	68.485	70.608	72.797	75.054	77.380
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	6	6	7	8	9	68.483	70.606	72.795	75.051	77.378
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	12	12	13	14	15	128.109	132.080	136.175	140.396	144.749
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	6	6	7	8	9	68.484	70.607	72.796	75.052	77.379
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	12	12	13	14	15	128.108	132.079	136.174	140.395	144.747
693296	BALAI BAHASA MALUKU	9	9	10	11	12	98.296	101.343	104.485	107.724	111.063
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	9	9	10	11	12	98.295	101.342	104.484	107.723	111.062
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	9	9	10	11	12	98.297	101.344	104.486	107.725	111.064
JUMLAH		387	387	418	449	480	21.929.779	22.609.602	23.310.500	24.033.125	24.778.152

138.WA - Program Dukungan Manajemen

7613 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

3.1.1.1 Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal A

138.WA Program Dukungan Manajemen

7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

7613.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal

7613.EBA.956 Layanan BMN

Layanan

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	26	26	26	26	26	1.799.091	1.854.863	1.912.364	1.971.647	2.032.768
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693269	BALAI BAHASA BALI	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	1	1	1	1	1	9.220	9.506	9.801	10.104	10.418
693274	BALAI BAHASA PAPUA	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299

693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693279	BALAI BAHASA RIAU	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693280	BALAI BAHASA ACEH	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693287	BALAI BAHASA JAMBI	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693296	BALAI BAHASA MALUKU	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
JUMLAH		42	38	38	38	38	2.129.091	2.195.093	2.263.141	2.333.298	2.405.630

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*Rincian *Output*

Satuan

3.1.1.1 Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal A

138.WA Program Dukungan Manajemen

7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

7613.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal

7613.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

Layanan

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	11	11	11	11	11	3.628.709	3.741.199	3.857.176	3.976.749	4.100.028
693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	333.215	343.545	354.195	365.175	376.495
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	1	1	1	1	1	257.600	265.586	273.819	282.307	291.059
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	1	1	1	1	1	49.420	50.952	52.532	54.160	55.839
693269	BALAI BAHASA BALI	1	1	1	1	1	255.970	263.905	272.086	280.521	289.217
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	1	1	1	1	1	165.560	170.692	175.984	181.439	187.064
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	1	1	1	1	1	165.734	170.872	176.169	181.630	187.261
693274	BALAI BAHASA PAPUA	1	1	1	1	1	185.395	191.142	197.068	203.177	209.475
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	1	1	1	1	1	250.630	258.400	266.410	274.669	283.183
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	1	1	1	1	1	279.744	288.416	297.357	306.575	316.079
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	1	1	1	1	1	244.080	251.646	259.448	267.490	275.783
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	1	1	1	1	1	258.150	266.153	274.403	282.910	291.680

693279	BALAI BAHASA RIAU	1	1	1	1	1	175.550	180.992	186.603	192.387	198.352
693280	BALAI BAHASA ACEH	1	1	1	1	1	163.510	168.579	173.805	179.193	184.748
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	1	1	1	1	1	150.000	154.650	159.444	164.387	169.483
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	1	1	1	1	1	242.130	249.636	257.375	265.353	273.579
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	1	1	1	1	1	251.269	259.058	267.089	275.369	283.905
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	1	1	1	1	1	233.572	240.813	248.278	255.975	263.910
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	1	1	1	1	1	210.168	216.683	223.400	230.326	237.466
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	1	1	1	1	1	227.250	234.295	241.558	249.046	256.767
693287	BALAI BAHASA JAMBI	1	1	1	1	1	352.485	363.412	374.678	386.293	398.268
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	1	1	1	1	1	164.798	169.907	175.174	180.604	186.203
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	1	1	1	1	1	216.578	223.292	230.214	237.351	244.708
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	1	1	1	1	1	286.881	295.774	304.943	314.397	324.143
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	1	1	1	1	288.596	297.542	306.766	316.276	326.081
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	1	1	1	1	1	147.155	151.717	156.420	161.269	166.268
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	1	1	1	1	1	269.621	277.979	286.597	295.481	304.641
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	1	1	1	1	1	195.694	201.761	208.015	214.464	221.112
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	1	1	1	1	1	224.869	231.840	239.027	246.437	254.076
693296	BALAI BAHASA MALUKU	1	1	1	1	1	224.230	231.181	238.348	245.737	253.354

693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	1	1	1	1	1	243.840	251.399	259.192	267.227	275.511
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	1	1	1	1	1	110.175	113.590	117.112	120.742	124.485
JUMLAH		42	42	42	42	42	10.452.578	10.776.608	11.110.683	11.455.114	11.810.222

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

3.1.1.1 Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal A

138.WA Program Dukungan Manajemen

7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

7613.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal

7613.EBA.959 Layanan Protokoler

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	1	1	1	1	1	450.319	464.279	478.672	493.510	508.809
JUMLAH		1	1	1	1	1	450.319	464.279	478.672	493.510	508.809

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

3.1.1.1 Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal A

138.WA Program Dukungan Manajemen

7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

7613.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal

7613.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

Layanan

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	1	1	1	1	1	1.150.449	1.186.113	1.222.882	1.260.792	1.299.876

693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	185.256	190.999	196.920	203.024	209.318
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	130.036	134.067	138.223	142.508	146.926
693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	424.616	437.779	451.350	465.342	479.768
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	1	1	1	1	1	101.300	104.440	107.678	111.016	114.457
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	1	1	1	1	1	85.718	88.375	91.115	93.939	96.852
693269	BALAI BAHASA BALI	1	1	1	1	1	127.514	131.467	135.542	139.744	144.076
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	1	1	1	1	1	32.983	34.005	35.060	36.146	37.267
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	1	1	1	1	1	32.468	33.475	34.512	35.582	36.685
693274	BALAI BAHASA PAPUA	1	1	1	1	1	43.125	44.462	45.840	47.261	48.726
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	1	1	1	1	1	87.218	89.922	92.709	95.583	98.546
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	1	1	1	1	1	48.932	50.449	52.013	53.625	55.288
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	1	1	1	1	1	26.676	27.503	28.356	29.235	30.141
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	1	1	1	1	1	24.200	24.950	25.724	26.521	27.343
693279	BALAI BAHASA RIAU	1	1	1	1	1	39.750	40.982	42.253	43.563	44.913
693280	BALAI BAHASA ACEH	1	1	1	1	1	78.662	81.101	83.615	86.207	88.879
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	1	1	1	1	1	58.440	60.252	62.119	64.045	66.031
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	1	1	1	1	1	41.740	43.034	44.368	45.743	47.161
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	1	1	1	1	1	192.126	198.082	204.222	210.553	217.080
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	1	1	1	1	1	192.913	198.893	205.059	211.416	217.970
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	1	1	1	1	1	34.700	35.776	36.885	38.028	39.207
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	1	1	1	1	1	69.486	71.640	73.861	76.151	78.511
693287	BALAI BAHASA JAMBI	1	1	1	1	1	37.660	38.827	40.031	41.272	42.552
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	1	1	1	1	1	115.782	119.371	123.072	126.887	130.820

693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	1	1	1	1	1	60.390	62.262	64.192	66.182	68.234
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	1	1	1	1	1	102.801	105.988	109.273	112.661	116.153
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	1	1	1	1	216.000	222.696	229.600	236.717	244.055
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	1	1	1	1	1	235.957	243.272	250.813	258.588	266.605
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	1	1	1	1	1	429.593	442.910	456.641	470.796	485.391
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	1	1	1	1	1	96.369	99.356	102.436	105.612	108.886
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	1	1	1	1	1	83.963	86.566	89.249	92.016	94.869
693296	BALAI BAHASA MALUKU	1	1	1	1	1	96.519	99.511	102.596	105.776	109.055
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	1	1	1	1	1	52.752	54.387	56.073	57.812	59.604
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	1	1	1	1	1	92.392	95.256	98.209	101.254	104.392
JUMLAH		34	34	34	34	34	4.828.486	4.978.169	5.132.492	5.291.600	5.455.639

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

3.1.1.1 Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal A

138.WA Program Dukungan Manajemen

7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

7613.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal

7613.EBA.962 Layanan Umum

Layanan

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	1	1	1	1	1	899.523	927.408	956.158	985.799	1.016.359
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	739.699	762.630	786.271	810.646	835.776
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	664.634	685.238	706.480	728.381	750.961

693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	812.728	837.923	863.898	890.679	918.290
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	1	1	1	1	1	337.008	347.455	358.226	369.331	380.781
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	1	1	1	1	1	241.213	248.691	256.400	264.348	272.543
693269	BALAI BAHASA BALI	1	1	1	1	1	272.871	281.330	290.051	299.043	308.313
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	1	1	1	1	1	231.950	239.140	246.554	254.197	262.077
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	1	1	1	1	1	233.165	240.393	247.845	255.529	263.450
693274	BALAI BAHASA PAPUA	1	1	1	1	1	290.196	299.192	308.467	318.030	327.888
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	1	1	1	1	1	245.906	253.529	261.388	269.492	277.846
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	1	1	1	1	1	297.233	306.447	315.947	325.741	335.839
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	1	1	1	1	1	235.836	243.147	250.684	258.456	266.468
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	1	1	1	1	1	241.274	248.753	256.465	264.415	272.612
693279	BALAI BAHASA RIAU	1	1	1	1	1	387.954	399.981	412.380	425.164	438.344
693280	BALAI BAHASA ACEH	1	1	1	1	1	263.877	272.057	280.491	289.186	298.151
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	1	1	1	1	1	278.985	287.634	296.550	305.743	315.221
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	1	1	1	1	1	294.307	303.431	312.837	322.535	332.533
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	1	1	1	1	1	404.989	417.544	430.488	443.833	457.591
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	1	1	1	1	1	233.211	240.441	247.894	255.579	263.502
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	1	1	1	1	1	171.718	177.041	182.530	188.188	194.022
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	1	1	1	1	1	248.811	256.524	264.476	272.675	281.128
693287	BALAI BAHASA JAMBI	1	1	1	1	1	134.880	139.061	143.372	147.817	152.399
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	1	1	1	1	1	239.135	246.548	254.191	262.071	270.195
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	1	1	1	1	1	182.857	188.526	194.370	200.395	206.608

693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	1	1	1	1	1	222.213	229.102	236.204	243.526	251.075
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	1	1	1	1	316.579	326.393	336.511	346.943	357.698
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	1	1	1	1	1	421.224	434.282	447.745	461.625	475.935
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	1	1	1	1	1	231.481	238.657	246.055	253.683	261.547
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	1	1	1	1	1	105.000	108.255	111.611	115.071	118.638
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	1	1	1	1	1	225.443	232.432	239.637	247.066	254.725
693296	BALAI BAHASA MALUKU	1	1	1	1	1	250.545	258.312	266.320	274.575	283.087
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	1	1	1	1	1	113.369	116.883	120.507	124.243	128.094
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	1	1	1	1	1	78.811	81.254	83.773	86.370	89.047
JUMLAH		34	34	34	34	34	10.548.625	10.875.632	11.212.777	11.560.373	11.918.745

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

3.1.1.1 Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal A

138.WA Program Dukungan Manajemen

7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

7613.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal

7613.EBA.963 Layanan Data dan Informasi

Layanan

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	1	1	1	1	1	808.897	756.666	780.123	804.306	829.240
JUMLAH		1	1	1	1	1	808.897	756.666	780.123	804.306	829.240

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*Rincian *Output*

Satuan

3.1.1.1 Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik

138.WA Program Dukungan Manajemen

7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

7613.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal

7613.EBA.994 Layanan Perkantoran

Layanan

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	1	1	1	1	1	108.312.779	111.670.475	115.132.260	118.701.360	122.381.102
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	10.098.763	10.411.825	10.734.591	11.067.364	11.410.452
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	6.406.394	6.604.992	6.809.747	7.020.849	7.238.495
693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	10.112.671	10.426.164	10.749.375	11.082.606	11.426.166
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	1	1	1	1	1	4.454.783	4.592.881	4.735.261	4.882.054	5.033.397
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	1	1	1	1	1	3.947.778	4.070.159	4.196.334	4.326.420	4.460.539
693269	BALAI BAHASA BALI	1	1	1	1	1	4.067.071	4.193.150	4.323.138	4.457.155	4.595.327
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	1	1	1	1	1	3.910.675	4.031.906	4.156.895	4.285.759	4.418.617
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	1	1	1	1	1	3.900.000	4.020.900	4.145.548	4.274.060	4.406.556
693274	BALAI BAHASA PAPUA	1	1	1	1	1	4.218.710	4.349.490	4.484.324	4.623.338	4.766.662
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	1	1	1	1	1	6.033.809	6.220.857	6.413.704	6.612.528	6.817.517
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	1	1	1	1	1	4.643.135	4.787.072	4.935.471	5.088.471	5.246.214

693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	1	1	1	1	1	7.595.180	7.830.631	8.073.380	8.323.655	8.581.688
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	1	1	1	1	1	4.452.900	4.590.940	4.733.259	4.879.990	5.031.270
693279	BALAI BAHASA RIAU	1	1	1	1	1	5.309.349	5.473.939	5.643.631	5.818.583	5.998.960
693280	BALAI BAHASA ACEH	1	1	1	1	1	4.521.863	4.662.041	4.806.564	4.955.568	5.109.190
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	1	1	1	1	1	4.489.022	4.628.182	4.771.655	4.919.577	5.072.084
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	1	1	1	1	1	3.571.787	3.682.512	3.796.670	3.914.367	4.035.712
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	1	1	1	1	1	2.756.138	2.841.578	2.929.667	3.020.487	3.114.122
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	1	1	1	1	1	3.698.435	3.813.086	3.931.292	4.053.162	4.178.810
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	1	1	1	1	1	2.822.574	2.910.074	3.000.286	3.093.295	3.189.187
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	1	1	1	1	1	3.527.257	3.636.602	3.749.337	3.865.566	3.985.399
693287	BALAI BAHASA JAMBI	1	1	1	1	1	3.668.001	3.781.709	3.898.942	4.019.809	4.144.423
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	1	1	1	1	1	3.432.040	3.538.433	3.648.125	3.761.217	3.877.814
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	1	1	1	1	1	3.802.701	3.920.585	4.042.123	4.167.429	4.296.619
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	1	1	1	1	1	3.413.423	3.519.239	3.628.336	3.740.814	3.856.779
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	1	1	1	1	1.905.000	1.964.055	2.024.941	2.087.714	2.152.433
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	1	1	1	1	1	2.288.961	2.359.919	2.433.076	2.508.502	2.586.265
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	1	1	1	1	1	2.601.603	2.682.253	2.765.403	2.851.130	2.939.515
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	1	1	1	1	1	2.818.930	2.906.317	2.996.413	3.089.301	3.185.070

693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	1	1	1	1	1	2.507.766	2.585.507	2.665.657	2.748.293	2.833.490
693296	BALAI BAHASA MALUKU	1	1	1	1	1	3.793.309	3.910.902	4.032.140	4.157.136	4.286.007
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	1	1	1	1	1	1.796.934	1.852.639	1.910.071	1.969.283	2.030.331
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	1	1	1	1	1	2.014.792	2.077.251	2.141.645	2.208.036	2.276.485
JUMLAH		34	34	34	34	34	246.894.533	254.548.264	262.439.260	270.574.877	278.962.698

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik

138.WA Program Dukungan Manajemen

7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

7613.EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

7613.EBB.951 Layanan Sarana Internal

Unit

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	1	0				538.154	
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1	1	0	0	0	865.338	326.334			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1	0	0	0	0	570.400				
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	1	0	0			650.000		
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	0	0	1					670.000
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	10	0	0	0		128.888			
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	1	0	0			397.179		

7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	34	0	0	0		497.002			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	0	0	0	0					
693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	1	0	0	1		60.000			560.337
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	0	0	0					
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	36	0	0	0		622.154			
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	0	1					422.257
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	51	0	0	0		335.738			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	50	0	0	0		687.000			
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	1	0	0			452.556		
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	13	0	0	0		157.735			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	0	0	0	0					
693269	BALAI BAHASA BALI										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	1	0	0			650.000		
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	23	0	0	0		229.631			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	1	0	0	0		62.400			
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	0	1					401.040
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	0	0	1					560.000

[illegible]

7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	0	1					402.522
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	0	0	0					
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	50	0	0	0		250.000			
693279	BALAI BAHASA RIAU										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	0	0					
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	20	0	0	0		168.902			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	23	0	0	0		297.000			
693280	BALAI BAHASA ACEH										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	0	1					401.541
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	50	0	0	0		316.102			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	155	0	0	0		547.680			
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	0	1					516.336
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	38	0	0	0		360.324			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	50	0	0	0		687.793			
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	0	1					593.776
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	15	0	0	0		443.657			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	6	0	0	0		278.816			
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	0	1					569.091

7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	7	0	0	0		445.482			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	3	0	0	0		139.085			
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	1	0	0	0		431.180			
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	0	0	0					
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	123	0	0	0		325.507			
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	1	0	0			514.131		
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	0	0	0					
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	0	0	0	0					
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	1	0	0	0		400.000			
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	20	0	0	0		259.307			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	0	0	0	0					
693287	BALAI BAHASA JAMBI										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	1	0	0	0		423.851			
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	43	0	0	0		224.105			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	0	0	0	0					
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	0	0					
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	2	0	0	0		28.632			

[illegible]

7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	0	1					545.823
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	5	0	0	0		245.511			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	35	0	0	0		567.900			
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	1	0	0			432.789		
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	40	0	0	0		493.456			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	6	0	0	0		100.000			
693296	BALAI BAHASA MALUKU										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	0	1					585.988
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	0	0	0					
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	0	0	0	0					
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	1	0	0			375.725		
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	0	0	0					
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	0	0	0	0					
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	1	0			460.155		
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	3	0	0	0		46.095			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	2	1	0	0		35.000	1.500.000		
JUMLAH		3	1481	14	5	14	1.872.936	15.928.890	8.464.512	2.179.723	7.179.504

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*Rincian *Output*

Satuan

Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik

138.WA Program Dukungan Manajemen

7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

7613.EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

7613.EBB.971 Layanan Prasarana Internal

Unit

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA										
7613.EBB.971.998	Rehab/Renovasi Gedung/Bangunan	1	0	0	0	1	66.138				4.500.000
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA										
7613.EBB.971.998	Rehab/Renovasi Gedung/Bangunan	0	0	0	1	0				450.000	
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT										
7613.EBB.971.998	Rehab/Renovasi Gedung/Bangunan	0	1	0	0	0		3.301.724			
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN										
7613.EBB.971.998	Rehab/Renovasi Gedung/Bangunan	0	0	1	0	0			1.300.000		
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT										
7613.EBB.971.998	Rehab/Renovasi Gedung/Bangunan	0	0	0	0	1					5.600.000
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA										
7613.EBB.971.998	Rehab/Renovasi Gedung/Bangunan	0	1	0	0	0		8.700.000			
693279	BALAI BAHASA RIAU										
7613.EBB.971.998	Rehab/Renovasi Gedung/Bangunan	0	0	0	1	0				35.000.000	
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN										
7613.EBB.971.998	Rehab/Renovasi Gedung/Bangunan	0	0	0	0	1					6.700.000

693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA										
7613.EBB.971.998	Rehab/Renovasi Gedung/Bangunan	0	0	1	0	0			15.000.000		
693292	BALAI BAHASA BENGKULU										
7613.EBB.971.998	Rehab/Renovasi Gedung/Bangunan	0	1	0	0	0		30.000			
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR										
7613.EBB.971.998	Rehab/Renovasi Gedung/Bangunan	1	0	1	0	0	77.700		30.000.000		
JUMLAH		2	3	3	2	3	143.838	12.031.724	46.300.000	35.450.000	16.800.000

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

3.1.1.1 Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik

138.WA Program Dukungan Manajemen

7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

7613.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal

7613.EBC.954 Layanan Manajemen SDM

Orang

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	1	909	909	909	909	5.945.646	6.129.961	6.319.990	6.515.910	6.717.903
JUMLAH		1	909	909	909	909	5.945.646	6.129.961	6.319.990	6.515.910	6.717.903

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*Rincian *Output*

Satuan

3.1.1.1 Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik

138.WA Program Dukungan Manajemen

7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

7613.EBD.Layanan Manajemen Kinerja Internal

7613.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Dokumen

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	9	9	9	9	9	4.906.619	5.058.724	5.215.545	5.377.227	5.543.921
JUMLAH		9	9	9	9	9	4.906.619	5.058.724	5.215.545	5.377.227	5.543.921

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*Rincian *Output*

Satuan

3.1.1.1 Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik

138.WA Program Dukungan Manajemen

7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

7613.EBD.Layanan Manajemen Kinerja Internal

7613.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Dokumen

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	8	8	8	8	8	1.759.666	1.814.216	1.870.456	1.928.440	1.988.222
JUMLAH		8	8	8	8	8	1.759.666	1.814.216	1.870.456	1.928.440	1.988.222

IKK

Program 138.WA Program Dukungan Manajemen
Kegiatan 7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Klasifikasi Rincian *Output* 7613.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal
Rincian *Output* 7613.EBD.954 Layanan Manajemen Keuangan
Satuan Dokumen

3.1.1.1 Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	7	3	3	3	3	2.273.819	2.344.307	2.416.981	2.491.907	2.569.156
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	17	8	8	8	8	331.595	341.874	352.473	363.399	374.665
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	22	8	8	8	8	399.592	411.979	424.751	437.918	451.493
693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA	16	8	8	8	8	230.762	237.916	245.291	252.895	260.735
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	3	6	6	6	6	51.288	52.878	54.517	56.207	57.950
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	8	6	6	6	6	154.428	159.215	164.151	169.240	174.486
693269	BALAI BAHASA BALI	8	6	6	6	6	145.790	150.309	154.969	159.773	164.726
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	2	6	6	6	6	141.699	146.092	150.621	155.290	160.104
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	7	6	6	6	6	132.948	137.069	141.319	145.699	150.216
693274	BALAI BAHASA PAPUA	10	6	6	6	6	152.390	157.114	161.985	167.006	172.183
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	5	6	6	6	6	79.032	81.482	84.008	86.612	89.297
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	7	6	6	6	6	126.158	130.069	134.101	138.258	142.544

693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	7	6	6	6	6	129.132	133.135	137.262	141.517	145.904
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	12	6	6	6	6	224.716	231.682	238.864	246.269	253.903
693279	BALAI BAHASA RIAU	3	6	6	6	6	54.573	56.265	58.009	59.807	61.661
693280	BALAI BAHASA ACEH	5	6	6	6	6	92.500	95.368	98.324	101.372	104.514
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	6	6	6	6	6	111.515	114.972	118.536	122.211	125.999
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	4	6	6	6	6	61.902	63.821	65.799	67.839	69.942
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	4	6	6	6	6	72.570	74.820	77.139	79.530	81.996
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	5	6	6	6	6	79.099	81.551	84.079	86.686	89.373
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	9	6	6	6	6	147.842	152.425	157.150	162.022	167.045
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	5	6	6	6	6	94.702	97.638	100.665	103.785	107.002
693287	BALAI BAHASA JAMBI	2	6	6	6	6	25.602	26.396	27.214	28.058	28.927
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	5	6	6	6	6	66.424	68.483	70.606	72.795	75.052
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	2	6	6	6	6	41.628	42.918	44.249	45.621	47.035
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	2	6	6	6	6	26.886	27.719	28.579	29.465	30.378
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	5	6	6	6	6	92.450	95.316	98.271	101.317	104.458
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	5	6	6	6	6	92.930	95.811	98.781	101.843	105.000
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	4	6	6	6	6	49.607	51.145	52.730	54.365	56.050
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	7	6	6	6	6	115.797	119.387	123.088	126.903	130.837
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	4	6	6	6	6	39.560	40.786	42.051	43.354	44.698

693296	BALAI BAHASA MALUKU	7	6	6	6	6	106.139	109.429	112.822	116.319	119.925
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	7	6	6	6	6	114.158	117.697	121.346	125.107	128.986
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	5	6	6	6	6	118.639	122.317	126.109	130.018	134.049
JUMLAH		227	207	207	207	207	6.177.872	6.369.386	6.566.837	6.770.409	6.980.292

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

3.1.1.1 Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik

138.WA Program Dukungan Manajemen

7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

7613.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal

7613.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja

Layanan

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	-	1	1	1	1	-	100.000	103.100	106.296	109.591
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	-	1	1	1	1	-	100.000	103.100	106.296	109.591
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	-	1	1	1	1	-	100.000	103.100	106.296	109.591
693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA	-	1	1	1	1	-	100.000	103.100	106.296	109.591
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693269	BALAI BAHASA BALI	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693274	BALAI BAHASA PAPUA	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796

693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693279	BALAI BAHASA RIAU	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693280	BALAI BAHASA ACEH	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693287	BALAI BAHASA JAMBI	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693296	BALAI BAHASA MALUKU	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
JUMLAH		-	34	34	34	34	-	1.900.000	1.958.900	2.019.626	2.082.234

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*Rincian *Output*

Satuan

3.1.1.1 Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik

138.WA Program Dukungan Manajemen

7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

7613.EBD.Layanan Manajemen Kinerja Internal

7613.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

Dokumen

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	1	1	1	1	1	475.000	489.725	504.906	520.559	536.696
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	40.590	41.848	43.146	44.483	45.862
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	50.000	51.550	53.148	54.796	56.494
693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA	-	1	1	1	1	50.000	51.550	53.148	54.796	56.494
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	1	1	1	1	1	15.000	15.465	15.944	16.439	16.948
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	1	1	1	1	1	15.000	15.465	15.944	16.439	16.948
693269	BALAI BAHASA BALI	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693274	BALAI BAHASA PAPUA	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	1	1	1	1	1	15.000	15.465	15.944	16.439	16.948
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693279	BALAI BAHASA RIAU	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693280	BALAI BAHASA ACEH	1	1	1	1	1	15.000	15.465	15.944	16.439	16.948

693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	1	1	1	1	1	15.000	15.465	15.944	16.439	16.948
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693287	BALAI BAHASA JAMBI	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	1	1	1	1	1	15.000	15.465	15.944	16.439	16.948
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	1	1	1	1	1	15.000	15.465	15.944	16.439	16.948
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693296	BALAI BAHASA MALUKU	-	1	1	1	1	-	15.000	15.465	15.944	16.439
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	-	1	1	1	1	-	15.000	15.465	15.944	16.439
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	-	1	1	1	1	-	15.000	15.465	15.944	16.439
JUMLAH		10	34	34	34	34	720.590	1.097.228	1.131.242	1.166.310	1.202.467

Target Kinerja Periode 2025—2029 Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	%	64	68	72	76	80
		Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	%	24	30	36	42	48
2	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia	Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya	%	41	43	45	47	49
		Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	%	60	63	66	69	72
3	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan	Persentase lembaga terbina yang meningkatkan kualitas penggunaan bahasanya	%	59,93	63,136	66,342	69,548	72,754
		Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkatkan kualitas kinerjanya	%	50	55	60	65	70
4	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	%	11,55	23,1	34,66	46,21	57,76
5	Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	%	6,4	17,6	17,9	18,5	18,8
		Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Rasio	1:18	1:20	1:22	1:25	1:30
6	Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA	Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terasilitasi (Dalam Negeri)	%	50	55,5	56	56,5	57
7	Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	Nilai	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	Predikat	A	A	A	A	A

Kerangka Pendanaan Periode 2025—2029 Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur

Kode	Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribuan)				
		2025	2026	2027	2028	2029
DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran					
7569	Peningkatan Kecakapan Literasi	4.187.564	2.287.103	2.470.071	2.692.500	2.961.750
DU	Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan					
7566	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	2.335.650	1.729.828	1.902.810	2.093.091	2.302.400
7567	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia	258.747	2.805.642	3.058.150	3.363.965	3.700.360
7568	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia	234.909	84.896	151.500	169.680	186.648
WA	Program Dukungan Manajemen					
7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	6.777.485	7.802.785	8.022.900	8.664.700	9.444.523

